EDISI PERTAMA

# ISU -ISU STRATEGI

## MAKRO EKONOMI

Dr. R. Agoes Kamaroella, Msi
Dr. Farahdilla Kutsiyah

# Isu-isu Strategi Makro Ekonomi

**Dr. R. Agoes Kamaroellah**

Jakad Publishing
Book & Journal

**2018**

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

# Isu-isu Strategi Makro Ekonomi

**Penulis**
Dr. R. Agoes Kamaroellah

**Desain Cover**
Rio Wednri Wijaya

**Layout**
Lutfiah
Setyaningrum

Copyright © 2018 Jakad Publishing
Surabaya

**Diterbitkan & Dicetak Oleh**
CV. Zifatama Jawara
Group Of Jakad Publishing Surabaya 2018
Jl. Gayung Kebon Sari I No. 1 Surabaya
Telp. : 0812 3440 8577
E-mail : jakadmedia@gmail.com
IKAPI No. 149/JTI/2014

ISBN : 978-602-52213-2-3

**Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang**
**Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119**
**Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014**
**Tentang Hak Cipta.**

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Isu-Isu Strategis Makro Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa selesainya Buku Isu-Isu Strategis Makro Ekonomi adalah berkat bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Effendie, SE. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Makro Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya penulisan Buku Isu-Isu Strategis Makro Ekonomi.

Semoga atas bantuan dan bimbingannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amien

Akhirnya semoga Buku Isu-Isu Strategis Makro Ekonomi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Penulis,

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....……...…… i
DAFTAR ISI….....…….……..... ii

BAB I SISTEM EKONOMI, POLITIK EKONOMI ..... 1
1. Definisi Sistem Ekonomi ..……...…… 1
2. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik.…… 11
3. Macam- macam sistem ekonomi ..…… 24
4. Sistem perekonomian indonesia..... 33
5. Perkembangan sistem ekonomi indonesia setelah orde baru …… 40
6. Para pelaku ekonomi …… 42
7. Peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia 42
8. EVALUASI……... 43
9. DAFTAR PUSTAKA……... 55

BAB II PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN EKONOMI 56
1. PENDAPATAN NASIONAL ……...…... …… 56
2. PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL…….. 63
3. PERTUMBUHAN EKONOMI ..... 78
4. EVALUASI…… 90
5. DAFTAR PUSTAKA…… 94

BAB III PEMBANGUNAN EKONOMI …….…… 95
1. PERBEDAAN PERTUNBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI ……..……. 98
2. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PEMBANGUNAN EKONOMI ..... 99
3. KRETERIA…… 105

BAB IV KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN ..... 111
I. MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA ..... 111
II. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP ..... 112
III. KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PROSES PEMBANGUNAN ..... 112
IV. KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN NASIONAL ..... 113
BAB V DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN ..... 117
I. DISTRIBUSI PENDAPATAN..... 117
II. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA ..... 117
III. KETIDAK MERATAAN DITRIBUSI PENDAPATAN .... 119
IV. KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ..... 121
V. KESENJANGAN SOSIAL ..... 123
BAB VI PENGELURAAN KONSUMSI MASYARAKAT
I. PENGERTIAN KONSUMSI ..... 126
II. PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT ..... 126
III. POLA KONSUMSI MASYARAKAT ..... 127
IV. DIMENSI KETIMPANGAN PENGELUARAN KONSUMSI ..... 128
V. TABUNGAN MASYARAKAT ..... 130
BAB VII UANG ..... 131
I. FUNGSI ..... 134
II. SYARAT-SYARAT ..... 136
III. JENIS ..... 136
IV. TEORI NILAI UANG ..... 139
V. TEORI UANG STATIS ..... 140
VI. UANG DALAM EKONOMI ..... 141

BAB VII INVESTASI ..... 143
I I. PENGERTIAN INVESTASI ..... 143
II. PERKEMBANGAN DAN SASARAN UMUM INVESTASI ..... 144
III. KETIMPANGAN INVESTASI ..... 146
IV. KESENJANGAN REALISASI INVESTASI ..... 147
V. KEBIJAKSANAAN INVESTASI ..... 148
VI. BKPM DAN PERATURAN INVESTASI ..... 149
BAB IX PENGELUARAN PEMERINTAH ..... 151
I. PENGERTIAN PENGELURAN PEMERINTAH ..... 151
II. PERAN DISTRIBUTIF PEMERINTAH ..... 154
BAB X PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL ..... 156
I. PENGERTIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL ..... 156
II. PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL ..... 157
III. TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL ..... 159
IV. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN NERACA PEMBAYARAN ..... 162
V. UTANG LUAR NERERI ..... 163
BAB XI INFLASI ..... 166
I. PENDAHULUAN ..... 166
II. PENGERTIAN DASAR..... 166
III. PENGGOLANGAN INFLASI ..... 168
IV. JENIS INFLASI MENURUT SIFATNYA ..... 168
V. JENIS INFLASI MENERU SEBABNYA ..... 169
VI. EFEK INFLASI ..... 171
VII. DAMPAK ADANYA INFLASI ..... 173
VIII. DAMPAK INFLASI TERHADAP INDIVIDU DAN MASYARAKAT ..... 174
IX. INFLASI DAN PENGANGGURAN ..... 174
X. CARA MENCEGAH INFLASI ..... 175

BAB XII KEBIJAKAN EKONOMI DALAM NEGERI ..... 176
I. KEBIJAKAN MONETER ..... 176
II. JENIS-JENIS KEBIJAKAN MONETER ..... 177
III. TUJUAN KEBIJAKAN MONETER ..... 178
IV. DEVALUASI MATA UANG ..... 179
V. DEVALUASI DI INDONESIA ..... 180
VI. PERANAN PEMERINTAH ..... 181
VII. KEBIJAKAN FISKAL ..... 190
VIII. ADANYA KEWIRASWASTAAN ..... 190
BAB XIII MENEROPONG KONDISI PEREKONOMIAN: EKONOMI KELEMBAGAN ..... 193
I. KONSEP EKONOMI KELEMBAGAAN ..... 193
1. Definisi ..... 194
2. Ekonomi Kelembagaan dan Ekonomi *Mainstream* ..... 195
3. Ekonomi Kelembagaan Tradisional *vs* Ekonomi Kelembagaan Baru ..... 197
4. Lembaga dan Pertumbuhan Ekonomi ..... 202
5. Lembaga Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi ..... 206
6. Hak Kepemilikan ..... 207
II. KONTRAK, STRUKTUR TATA KELOLA DAN PROSEDUR PENEGAKAN ..... 208
1. Kontrak ..... 208
2. Struktur Tata Kelola ..... 214
3. Prosedur Penegakan ..... 216
4. Teori Agensi ..... 218
5. Hubungan antara Tipe Kontrak - Struktur Tata Kelola- Prosedur Penegakan ..... 221
III. BIAYA TRANSAKSI ..... 222
1. Konsep dan Definisi Biaya transaksi ..... 223
2. Asumsi Perilaku Manusia dalam Ekonomi Biaya Transaksi ..... 226
3. Dimensi Biaya Transaksi ..... 228
4. Determinan Biaya Transaksi ..... 229

IV. MODAL SOSIAL ..... 232
1. Definisi Modal Sosial ..... 232
2. Sumber Modal Sosial dan Dampaknya: Positif *vs* Negatif..... 236
V. PERTANYAAN DAN MASALAH ..... 238
VI. DISKUSI ..... 238

BAB XIV PENGUATAN KELEMBAGAAN DI PEDESAAN DALAM UPAYA MENGURANGI KEMISKINAN ..... 240
I. LEMBAGA, PEDESAAN, DAN KEMISKINAN ..... 240
II. POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN ..... 243
III. PESANTREN, PEMBANGUNAN, DAN KEMISKINAN . 245
IV. METODOLOGI ..... 249
V. MODAL SOSIAL PESANTREN ..... 251
1. Kepercayaan ..... 260
2. Jaringan ..... 261
3. Bukti Empiris Modal Sosial Pesantren Melembaga dalam Kehidupan Masyarakat di Sekitar Pesantren ..... 262
VI. PERTANYAAN DAN MASALAH ..... 276
VII. DISKUSI ..... 276

DAFTAR PUSTAKA .....……

# BAB I

# SISTEM EKONOMI, POLITIK EKONOMI

Standar Kompetensi :

Memahami tentang sitem ekonomi, struktur ekonomi dan politik ekonomi

Kompetensi Dasar :

1. Menjelaskan sistem ekonomi
2. Menjelaskan tentang struktur ekonomi
3. Menjelaskan hubungan sistem Ekonomi dan Sistem Politik
4. Menjelaskan sistem Politik dan Rezim Ekonomi Politik

Indikator :

1. Mengidentifikasi sistem ekonomi
2. Mengidentifikasi struktur ekonomi
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi
4. Membedakan keuntungan dan kerugian macam-macam sistem ekonomi

## 1. Definisi Sistem Ekonomi

Perihal sistem ekonomi apa–atau sistem ekonomi yang bagaimana – yang diterapkan atau berlangsung di Indonesia, sering dipertanyakan dan diperdebatkan. Pertanyaan sederhana yang jawabannya pelik ini bukan saja mengundang rasa ingin tahu mahasiswa ekonomi sendiri, tetapi juga kalangan awan. Suatu uraian ringkas mengenai pengertian sistem itu sendiri, kompleksitas sebuah sistem dan keterjalinan antar sistem, serta mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada sehingga dapat menjadi pengantar pemahaman yang memadai.

Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan system ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi

yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi/falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi.

**Struktur Ekonomi Indonesia**

Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan Struktur ekonomi dapat dilihat setidak tidaknya berdasarkan **4 macam sudut tinjauan** yaitu: **(1) tinjauan makro-sektoral, (2) tinjauan keruangan, (3) tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, (4) tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.** Dua hal yang disebut pertama merupakan tinjauan ekonomi murni, sedangkan dua yang terakhir merupakan tinjauan politik .

Berdasarkan **tinjauan makro-sektoral**, sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya: agraris, industrial atau niaga tergantung pada sektor produksi apa /mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. Dilihat makro sektoral berdasarkan konstribusi **sektor-sektor produksi** (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestik bruto perekonomian Indonesia yang hingga tahun 1990 masih **agraris** kini sudah berstruktur **industrial**. **Keindustrian struktur ekonomi** sesungguhnya belum sejati, masih sangat dini. Keindustrian nya barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk produk domestik bruto atau pendapatan nasional . Keindustrian yag ada belum didukung dengan konstribusi sektoral dalam menyerap tenaga atau angkatan kerja

Jadi, ditinjau secara **makro-sektoral** struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian, dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris akan tetapi penyumbang utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu

berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur yang agraris ke struktur yang industrial .

Berdasarkan **tinjauan keruangan ( spasial )**, perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan /tradisional dan berstruktur kekotaan/ modern . hal ini bergantung pada apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional mewarnai kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah relative modern yang mewarnai nya .

Berdasarkan **tinjauan penyelenggaraan kenegaraan**, perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis . struktur ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan. Dilihat dari kacamata politik, sejak awal orde baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an **perekonomian Indonesia berstruktur etatis**, yaitu pemerintah atau negara merupakan pelaku utama ekonomi. Sementara ini, perekonomian Indonesia masih **berstruktur borjuis,** karena baru kalangan pemodal dan usahawanlah yang dapat cepat menanggapi undangan pemerintah untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional, belum mengarah ke struktur **perekonomian yang egaliter**, **yaitu struktur perekonomian** dimana rakyatlah yang berperan lebih banyak dalam perekonomian nasional, negara melayani rakyat, semua anggota masyarakat adalah sederajat.

Berdasarkan **tinjauan birokrasi pengambilan keputusan** dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentrallistis dan yang desentralistis . Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya, struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralis. Pembuatan keputusan lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan.

Namun sejak awal era pembangunan jangka panjang tahap ke dua struktur ekonomi sentralis mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk desentralisasi dan demokrasi ekonomi kian besar.

Jadi struktur ekonomi yang sedang dihadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang tradisional. Perekonomian Indonesia sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial, dari struktur yang etatis ke borjuis, **yaitu struktur** perekonomian dimana kalangan pemodal dan usahawan yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian dari struktur yang kedesaan/tradisional ke kekotaan/modern. Sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentalistis.

**Produk Domistik Bruto (PDB), Indikator Penting untuk Mengukur Perekonomian Negara**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan peneliti untuk menganalisis keadaan makro ekonomi. Data Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki peran yang cukup penting dalam menganalisis suatu permasalahan makro ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, diantara kegunaan data Produk Domestik Bruto (PDB) antara lain adalah untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Selain itu, dari data Produk Domestik Bruto (PDB) ini juga dapat diturunkan menjadi beberapa indikator ekonomi lainnya. Sebelum kita membahasnya secara lebih detail, mari kita bahas tentang Produk Domestik Bruto (PDB) itu sendiri, bagaimana pendekatan penghitungannya dan cara menghitungnya.

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

   Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor, yaitu :

- Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan,
- Penrtambangan dan penggalian,
- Industri pengolahan,
- Listrik, gas dan air bersih,
- Konstruksi,
- Perdagangan, hotel, dan restoran,
- Pengangkutan dan komunikasi,
- Keuangan, real estate dan jasa perusahaan,
- Jasa – jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah,

2. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran/Penggunaan

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta (PC).
- Pengeluaran konsumsi pemerintah (GC).
- Pembentukan modal tetap (TCF)
- Perubahan inventori/stok (S).
- Ekspor neto (ekspor (EX) dikurangi impor (IM)).

Dalam persamaan matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = PC + GC + TCF + S + (EX-IM)$$

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Dari data Produk Domestik Bruto (PDB) yang ada, juga dapat diturunkan beberapa indikator ekonomi lainnya, antara lain Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar dan atas dasar biaya faktor biaya produksi serta indikator angka-angka per kapita.

**Struktur Ekonomi Indonesia, Analisis Deskriptif**

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Gambaran kondisi struktur ekonomi Indonesia dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Struktur ekonomi dikatakan berubah apabila kontribusi/pangsa Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor ekonomi yang mulanya dominan digantikan oleh sektor ekonomi lain, dalam analisis deskriptif ini, kita akan melihat bagaimana kondisi struktur ekonomi Indonesia dari tahun 1983 sampai 2010.

Untuk memudahkan analisis, sektor-sektor dalam perekonomian akan dikelompokan menjadi 3 sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer merupakan gabungan dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder merupakan gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor tersier merupakan gabungan dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berlangsung secara berkesinambungan pada periode sebelum krisis ekonomi (pertumbuhan tidak pernah berada di bawah 6,40 persen) dan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat, ternyata memberi kemajuan yang cukup berarti terhadap perubahan struktur ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ekonomi ini terlihat dari perubahan komposisi sektor ekonomi atas kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka waktu tahun 1983-2010.

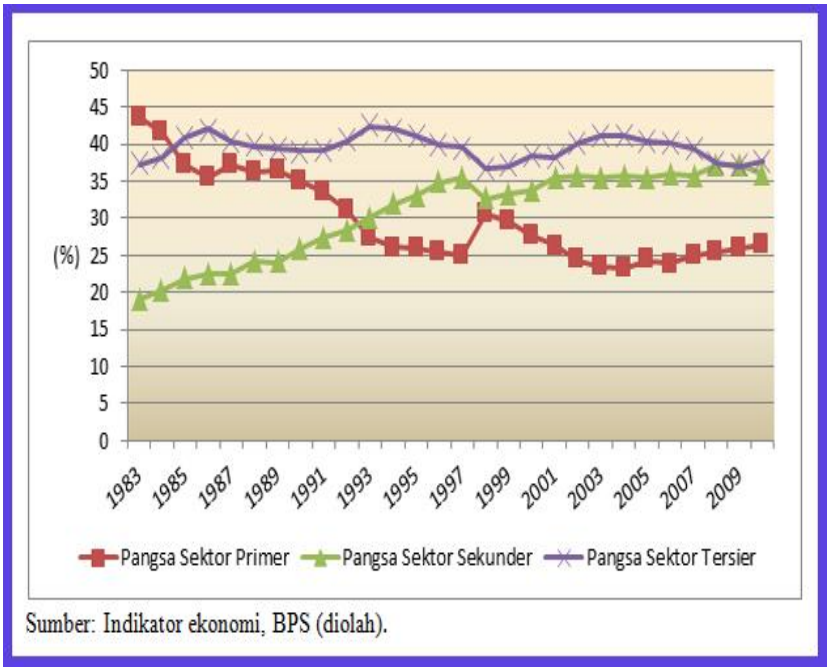


Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia Tahun 1983-2010

Dilihat dari lapangan usaha utama, kontribusi sektor primer terhadap PDB pada tahun 1983 adalah sebesar 43,64 persen dan pada tahun 2010 tinggal 26,49 persen. Sementara itu, kontribusi sektor sekunder yang semula hanya sebesar 19,08 persen pada tahun 1983 menjadi sekitar 35,89 persen pada tahun 2010. Sedangkan sektor tersier mengalami perubahan yang relatif konstan, kontribusi

sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 1983 sebesar 37,29 persen dan pada tahun 2010 sebesar 37,62 persen, tidak jauh berbeda dengan tahun 1983. Hal ini menunjukkan telah terjadi transformasi perekonomian atau perubahan struktur ekonomi Indonesia yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan semakin meningkatnya peran sektor nonprimer.

Terlihat bahwa telah terjadi perubahan pada struktur ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya pangsa sektor primer dan semakin meningkatnya pangsa sektor nonprimer terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari periode 1983-2010. Perkembangan kontribusi sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode sebelum krisis ekonomi (1983-1996) menunjukkan bahwa dominasi produk yang dihasilkan perekonomian Indonesia mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Pada tahun 1983 pangsa sektor primer masih cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 43,64 persen, sedangkan sektor sekunder sebesar 19,08 persen dan sektor tersier sebesar 37,29 persen. Pangsa sektor primer terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kemudian berangsur-angsur turun hingga hanya sebesar 25,33 persen pada tahun 1996, sedangkan sektor sekunder justru terus mengalami peningkatan. Pangsa sektor sekunder terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 1996 menjadi 34,80 persen, meningkat 15,72 persen dari tahun 1983. Sektor tersier mengalami perkembangan yang relatif konstan selama periode 1983-1996. Selama periode tersebut tercatat pangsa sektor tersier terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 37,29 persen sampai 42,44 persen.

Pada periode terjadinya krisis ekonomi (tahun 1997-1999) struktur perekonomian Indonesia relatif tidak mengalami perubahan yang berarti, kecuali

sektor pertanian. Pada tahun 1997, sektor primer memiliki pangsa sebesar 24,94 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan meningkat cukup besar pada tahun 1998 menjadi 30,67 persen dan kemudian turun kembali menjadi 29,61 persen pada tahun 1999. Pangsa sektor sekunder terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti, pangsa sektor ini sebesar 35,48 persen pada tahun 1997, 32,64 persen pada tahun 1998 dan meningkat menjadi 33,36 persen pada tahun 1999. Sedangkan sektor tersier memiliki pangsa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar antara 36,69 persen sampai 39,58 persen selama periode krisis ekonomi ini.

Setelah melewati krisis ekonomi, perubahan struktur Indonesia terlihat dari semakin menurunnya pangsa sektor primer dari tahun 2000 sampai 2004. Pangsa sektor primer terus mengalami penurunan dari 27,67 persen pada tahun 2000 menjadi 23,28 persen pada tahun 2004. Pada periode yang sama, pangsa sektor sekunder terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru cenderung mengalami peningkatan dari 33,86 persen pada tahun 2000 menjadi 35,69 persen pada tahun 2004, walaupun pada tahun 2003 sempat mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa sektor tersier pada tahun 2000-2004 tidak mengalami perubahan yang cukup berarti, pada tahun 2000-2001 pangsa sektor ini mengalami penurunan, namun pada tahun 2002-2003 mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 pangsa sektor tersier adalah sebesar 41,07 persen, meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan turun 0,03 persen pada tahun 2004.

Selama tahun 2005-2010, sektor yang terlihat cenderung meningkat pangsanya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sektor primer. Pangsa sektor primer pada tahun 2010 adalah sebesar 26,49 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2005 yang memiliki pangsa sebesar 24,27 persen saat itu. Pada tahun 2008-2010 sektor sekunder dan tersier terlihat memiliki pangsa yang relatif mirip terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu berkisar antara

35,89 persen sampai 37,62 persen. Namun, secara umum pangsa sektor primer masih tetap berada di bawah pangsa sektor sekunder dan tersier.

Jika kita lihat dari hasil analisis deskriptif di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Indonesia selama tahun 1983-2010. Sejak tahun 1985, peran sektor primer telah digeser oleh sektor tersier, kemudian pada tahun 1993 sektor primer kembali digeser oleh sektor sekunder. Pada tahun 2009 sektor sekunder merupakan sektor yang memiliki peran paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun pada tahun 2010 kembali digeser oleh sektor tersier. Sampai tahun 2010 peran sektor primer masih berada di bawah sektor tersier dan sekunder. Hal ini menunjukan bahwa proses transformasi struktur ekonomi Indonesia telah menuju ke arah industrialisasi, dimana peran sektor primer mulai digantikan oleh peran sektor lainnya, terutama sektor sekunder yang mengalami peningkatan kontribusi cukup besar dan signifikan hampir di tiap tahun dibanding sektor lainnya.

Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem social atau system kemasyarakatan, makhluk-makhluk hidup dan benda alam. Untuk suatu system kehidupan atau system lingkungan; barang atau alat, untuk suatu system peralatan; data; catatan; atau kumpulan fakta, untuk suatu system informasi; atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.

Keserasian hubungan antar subjek (antar objek) termasuk bagian atau syarat sebuah sistem karena, sebagai suatu “organisasi” setiap sistem tentu mempunyai tujuan tertentu. Keserasian itulah yang akan dijadikan petunjuk apakah sistem itu dapat berjalan/dijalankan.sehingga pada gilirannya kelak

akan dapat dinilai apakah tujuan yang diinginkan oleh system itu akan tercapai atau tidak. Guna membentuk dan memelihara keseraisan itu maka diperlukan kaidah atau norma-norma tertentu yang harus dipatuhi oleh subjek subjek (objek-objek) yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain.

Kaidah atau norma dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar orang.

Contohnya aturan-aturan dalam suatu sistem kekerabatan, peraturan-peraturan dalam suatu sistem politik atau pemerintahan. Kaidah itu juga bisa berupa ketentuan-ketentuan teknis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar komponen sebuah alat atau perlengkapan. Misalnya spesifikasi teknis untuk suatu sistem mesin uap, tata-letak mesin-mesin dalam sisten "ban-berjalan" pada kegiatan produksi di sebuah pabrik. Norma tadi bisa pula berupa ketentuan-ketentuan administrasif. Umpamanya syarat penerimaan dan promosi dalam sistem kepegawaian, standar prestasi dalam sistem penggajian.

**2. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik**

Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Sistem ekonomi:

- Subyek/obyek: manusia (subyek) dan barang ekonomi (obyek)
- Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
- Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian

Sheridan (1998), *economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness.*

Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi

yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian... produksi, distribusi, konsumsi.

Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:

a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i) Pengendalian stabilitas ekonomi
j) Pengambilan keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik

| **KUTUB. A** | **KONTEKS** | **KUTUB. Z** |
|---|---|---|
| **Liberalisme** | ***Ideoligi politik*** | **Komunisme (menghapus hak perorangan)** |
| **Demokrasi** | ***Rejim pemerintahan*** | **Otokrasi atau otoriter (kekuasaan tak terbatas)** |
| **Egaliterisme (Berderajad sama)** | ***Penyelenggaraan kenegaraan*** | **Etatitsme (Lebih mementingkan negara)** |
| **Desentralisme** | ***Struktur birokrasi*** | **Sentralisme** |
| **Kapitalisme** | ***Ideologi ekonomi*** | **Sosialisme** |
| **Mekanisme pasar** | ***Pengelolaan ekonomi*** | **Perencanaan terpusat** |

Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:

- Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi

- Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
- Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

**1. Kapitalisme dan Sosialisme**

Sistem Ekonomi yang esktrim:

(a) Sistem ekonomi kapitalis

- Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
- Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
- Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
- Campur tangan pemerintah sangat minim
- Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
- USA

(b) Sistem ekonomi sosialis

- Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
- Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
- Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
- Campur tangan pemerintah sangat tinggi
- Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
- USSR

(c) Sistem ekonomi campuran

- Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara

- Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
- Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
- Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
- Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah

**2. Persaingan terkendali**

Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.

Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);

- Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
- Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
- Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
- Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

**3. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme**

Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:

(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.

Y = C + I + G + (X-M)

Y adalah pendatan nasional.

Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.

Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.

Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.

## Sistem Politik Dan Rezim Ekonomi Politik

Sistem Politik Dan Rezim Ekonomi Politik Tujuan Instruksional Khusus (TIK) memberikan penjelasan mengenai pokok bahasan :

1. Rezim atau Sistem Politik
2. Rezim Politik dan Kehidupan Ekonomi

3. Sistem Ekonomi Politik
4. Paradigma dan Sistem Ekonomi Politik
5. Ekonomi Politik dalam Proses Pembangunan

**Pokok Bahasan 1.**

**Rezim atau Sistem Politik**

Rezim berasal dari kata *regime* yang berarti *a form or sytem of government, a government power*. Dengan pengertian ini, yang dimaksud dengan rezim sesungguhnya sama dengan pengertian sistem. Maka apa yang dimaksud dengan sistem politik sama artinya dengan rezim politik dan rezim ekonomi politik. Melalui pendekatan sosiologi politik, Maurice Duverger memberikan pengertian rezim politik sebagai lembaga politik yang secara historis memiliki jenis tersendiri yang berbeda dari satu negara ke negara lain, mengembangkan struktur kelembagaan tersendiri dimana kehidupan politik itu terjadi. Struktur kelembagaan ini merupakan bagian dari kerangka sosial yang secara keseluruhan terdiri dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk faktor geogratis dan demografis, dengan demikian, rezim politik adalah sistem politik yang berlaku disuatu negara pada suatu periode tertentu dengan mengembangkan sistem kelembagaan politik tertentu sesuai dengan kerangka sosial budaya yang ada di negara tersebut.

Studi sosiologi politik dari Maurice Duverger, mencoba mengklasifikasikan rezim politik menjadi;

1) Klasifikasi purba, yang terdiri dari monarkhi, oligarki dan demokrasi. Terkait dengan hal ini, Aristoteles membedakannya berdasarkan korup atau tidaknya suatu pemerintahan. Rezim politik berbentuk tirani, oligharki dan demokrasi, sedangkan bentuk pemerintahan murnimya adalah monarkhi, aristokrasi dan timokrasi (demokrasi dngan pemilihan yang terbatas).

2) Klasifikasi hukum pada masa sekarang. Ahli hukum percaya pada praktik Trias politica Montesquieu. Klasifikasi rezim politik dibuat berdasarkan hubungan internal antara kekuasaan dan elemen yang berbeda yang membentuk negara. Terdiri dari tiga jenis rezim, yaitu; a) rezim dengan pemerintahan perwakilan, b) rezim dengan pemusatan kekuasaan dan c) rezim parlementer, yang kemudian dikembangkan menjadi sistem parlementer dan sistem presidensial.

3) Klasifikasi Sosiologi Modern. Terdiri dari dua jenis utama yaitu a) rezim pluralitas atau demokratis dimana mengizinkan tuntutan politik secara terbuka dan bebas melalui partai-partai politik secara terbuka dan bebas, dan b) rezim Unitarian atau otokratis lebih menyaratkan bahwa konflik dan tuntutan politik secara resmi tidak diperkenankan.

**Pokok Bahasan 2.**

**Rezim Politik dan Kehidupan Ekonomi**

Rezim ekonomi politik menurut Maurice Deverger dapat dilihat dari dua pandangan : **pertama;** pandangan kaum marxis yang mengatakan bahwa rezim ekonomi politik mencerminkan sistem produksi dalam suatu masyarakat. Kepemilikan faktor produksi dikuasai oleh satu kelompok masyarakat yang disebut kaum kapitalis atau bourjuis dan kelompok yang tidak memiliki faktor produksi dan hanya menjadi bagian dari factor produksi tersebut yaitu kaum buruh atau proletar**. Kedua**, paham liberal, yang melebih-lebihkan independensi lembaga-lembaga politik dalam hubungannya dengan ekonomi, dengan kata lain, intervensi politik terhadap kehidupan ekonomi sangat kecil, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Pembedaan ini selanjutnya dapat dilihat dari sistem perekonomian yang terdapat disuatu negara.

Sistem Perekonornian dapat diartikan sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian (pemerintah dan swasta) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan membantu masyarakat untuk

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Adapun bentuk umum dari sistem perekonomian adalah :

1. Sistem pasar bebas (*Free Enterprise Economy*) atau perekonomian pasar dengan prinsip Lassez Faire. Cirinya 1) pemerintah tidak campur tangan dan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dan 2) masyarakat bebas menentukan alokasi sumber daya, jenis pekerjaan, usaha dan jenis barang
2. Sistem ekonomi Campuran (*Mixed economy*) dengan pengendalian dan control oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Campur tangan berupa: penetapan peraturan, sebagai pelaku ekonomi dan pelaksana kebijakan pemerintah,
3. Sistem Ekonomi Perencanaan (*Central Planed*) dimana pemerintah menentukan sepenuhnya corak kegiatan ekonomi yang akan diberlakukan

**Pokok Bahasan 3.**

**Sistem Ekonomi Politik**

Ekonomi politik dalam bahasa Yunani terdiri dari kata: Oikonomike dan Polis yang secara umum berarti keterkaitan erat antara faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan komersial.

Martin Staniland mengatakan ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek,politik. Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara baik dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lain yang bersifat deterministik, atau hubungan yang bersifat timbal balik (resiprositas atau suatu proses perilaku yang berlangsung terus menerus.

Robert Dahl dan Charles Lindblom dalam bukunya *Politics, Economics* dan Walfare tahun 1953 memuat perkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yaitu :

1. Ada perbedaaan sudut pandang antara ekonomi konvensional dengan ekonomi politik terutama berkaitan dengan interaksi ekonomi politik di zaman modern
2. Ada perbedaan antara ekonomi politik klasik dan ekonomi politik modern yang berkaitan dengar dinamika hubungan antara pasar dengan kebijakan pemerintah serta masyarakat yang terkena dampak dari hubungan itu
3. Ada kerancuan antara ekonomi politik dengan studi ekonomi pembangunan
4. Ekonomi politik dalam menganalisis berbagai masalah selain memakai pendekatan kuantitatif juga memakai teori-teori atau alat analisis dan ilmu sosial lain
5. Ekonomi politik digunakan pula untuk membahas masalah-masalah sosial lain sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian, dan
6. Ekonomi politik modern banyak membahas ketidakadilan berkaitan dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan dan struktur lainnya, baik dalam ekonomi nasional maupun ekonomi internasional.

Adam Smith, ekonomi politik adalah cabang ilmu negarawan atau legislator dengan tujuan 1) menciptakan suatu sumber income masyarakat dan 2) menyediakan daya bagi negara agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Gregory dan Stuart mencoba menjelaskan keterlibatan negara dalam kehidupan ekonomi suatu negara dengan mengemukakan empat aspek. Mereka membuat suatu kerangka analisis yang membedakan sistem ekonomi politik atas empat aspek dan masing-masing aspek mengandung dua sisi. Keempat aspek itu adalah sebagai berikut :

1. Organisasi pembuatan keputusan yang mengandung dua sisi yaitu sentralisasi dan desentralisasi
2. Penyediaan informasi dan koordinasi yang mengandung sisi mekanisme pasar dan melalui perencanaan pemerintah

3. Hak kepemilikan yang mengandung sisi hak milik pribadi dan umum atau kooperatif yang memuat unsur pemilikan pribadi dan umum
4. Sistem insentif apakah bersifat moral atau material

Berdasarkan kategori ini maka didapatkan kategori sistem ekonomi politik yaitu kapitalisme, sosialisme pasar dan, sosialisme terencana. Gastil mengkategorikan sistem ekonomi politik sebagai berikut:

1. Sistem kapitalisme dengan ciri kebebasan ekonomi seluas-luasnya, membatasi intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar
2. Etatisme kapitalis, dengan ciri negara cukup banyak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan secara langsung menangani sejumlah kegiatan ekonomi, namun dalam batas tertentu pemerintah tetap mengakui fungsi pasar dan hak milik perorangan.
3. Kapitalisme campuran, dengan ciri dalarn sistem ini pemerintah sangat aktif menangani redistribusi pendapatan, mengintervensi dan mengatur mekanisme pasar secara langsung, namun jumlah sumberdaya ekonomi tidak merampas porsi mayoritas perekonomian nasional
4. Sosialisme campuran, dengan ciri kebebasan ekonomi dalam batas tertentu masih ada, hak milik pribadi dan inisiatif individu masih diakui, namun pemerintah memiliki peran yang dominan dalam perekonomian sehingga sistem ini sudah termasuk dalam sistem sosialis.
5. Sistem sosialisi, dengan ciri pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan segenap kegiatan ekonomi, individu sangat dibatasi bahkan tertekan.

**Pokok Bahasan 4.**

**Paradigma Dan Sistem Ekonomi Politik :**

Secara garis besar terdapat empat bentuk sistem ekonomi politik yang cukup domonan yaitu Kapitalisme. Sosialisme, Komunisme dan sistem ekonomi campuran. Yang secara sederhana dapat dipetakan dalam persamaan sebagai berikut : SEP = *f* (Sdi), dimana : SEP = sistem ekonomi politik, SDi = sifat dasar pokok, SD1 = sifat dasar kepemilikan, SD2 = sifat dasar dalam inisiatif pembentukan badan usaha, SD3 = insentif ekonomi, SD4 = mekanisme pembentukan harga, SD5 = kompetisi atau persaingan, SD6 = struktur organisasi dan SD7= jenis insentif/dorongan, dalam bentuk tabel, semua sifat dasar tersebut dalam sistem ekonomi politik perkaitannya sebagai berikut ;

**Tabel 4.1.**

**Sifat dasar ekonomi politik. dalam berbagai sistem perkonomian**

| No | Sifat Dasar | Kapitalisme | Sosialisme | Komunisme | Campuran |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **SD 1** | Kepemilikan Individu | Industri dasar dimiliki negara | Sisanya Seluruhnya dimiliki negara | Individu dan negara |
| **2** | **SD 2** | Individu | Partnership | Koporasi Usaha bersama pada industri dasar dan individu lainnya dan Negara | Individu dan Negara |
| **3** | **SD 3** | Keuntungan sebagai motif utama | Motif ekonomi dan non ekonomi | Insentif terbatas Ekonomi | Sosial, politik, |
| **4** | **SD 4** | Pemerintah | Birokrasi Negara | Birokrasi | Hukum pasar |
| **5** | **SD 5** | Ada | Bila negara mau | Tidak ada | Antara ada dan tidak |
| **6** | **SD 6** | Desentralisasi | Semi sentralisasi | Sentralisasi penuh | Desentralisasi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **SD 7** | Dorongan Materialistik | Sosialistik | Sosialistik | Ideologi Gabungan |

Sumber : Didik J. Rachbini, 1996

**Keterangan:**

No Sifat Dasar Kapitalisme Sosialisme Komunisme Campuran

1 SD1 = sifat dasar kepemilikan Individu Industri dasar dimiliki negara, sisanya Seluruhnya dimiliki negara Individu dan Negara

2 SD2 = sifat dasar dalam inisiatif pembentukan badan usaha Individu Partnership Koporasi Usaha bersama pada industri dasar dan individu lainnya Negara Individu dan Negara

3 SD3 = insentif ekonomi Keuntungan sebagai motif utama Motif ekonomi dan non
ekonomi Insentif terbatas Ekonomi, sosial, politik, dll

4 SD4 = mekanisme pembentukan harga Pasar (S&D) Pemerintah birokrasi Negara Birokrasi hukum pasar

5 SD5 = kompetisi atau persaingan Eksis Ada, bila negara mau Tidak ada Antara ada dan tidak

6 SD6 = struktur organisasi Desentralisasi Semi sentralisasi Sentralisasi penuh Desentralisasi

7 SD7 = jenis insentif/dorongan Materialistik sosialistik Untuk Ideologi Gabungan

**Pokok Bahasan 5.**

**Ekonomi Politik Dalam Proses Pembangunan**

Pemikiran ekonomi politik dalam rangka pelaksanaan pembangunan disuatu negara paling tidak mengikuti pendekatan: 1) Liberal : Penekanan bekerjanya mekanisme pasar karena logika ekonomi rasional dan 2) Marxis: Penekanan pada telaah terhadap kekuatan kekuasaan yang banyak mempengaruhi hasil proses politik.

Sementara itu, Martin Staniland berpendapat proses pembangunan dapat mengikuti salah satu dari kelompok berikut :

1. Ortodox liberalism yang sangat mengagungkan individualisme, baik perilaku dan kepentingannya. Pandangan terhadap individu seperti ini bersifat sangat fundamental sehingga masyarakat hanya dipandang sebagai agregasi dari sintesa seluruh kepentingan individu masyarakatnya.
2. Sosial Critique of Liberalism, yang menyerang pandangan sangat liberal, karena dalam pandangan liberalisme, individu seolah-olah hidup dalam isolasi dan ruang kosong. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat juga sangat membentuk individu di dalamnya baik dari sifat, kepentingan dan perilakunya.
3. Economism dan Politicism. Econornism yang pandangannya lebih mirip pada liberalisme, yang melihat bahwa proses politik merupakan hasil dari proses non politik. Jika kelompok liberal memandang proses politik sebagai hasil dari sintesa proses interaksi individu maka economism melihat proses politik merupakan muara dari kekuatan yang ada (sosial forces). Politicism melihat bahwa struktur politik lebih menjadi penentu yang membangun kepentingan-¬kepentingan tertentu dan dapat memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi tertentu.

**3. Macam-macam Sistem Ekonomi**

***a. Sistem Ekonomi Tradisional***

***Pengertian:***

- Sistem ekonomi tradisonal merupakan system ekonomi, yang dasar atau pola pemikiran di dalam mengolah factor produksi masih sangat terbatas.
- Biasanya, ini disebabkan oleh keterbatasan keahlian maupun modalnya.
- Cara berproduksi hanya mengandalkan tenaga manusia, dan tergantung dari factor alam

*Ciri-cirinya:*

1. Belum ada pembagian kerja.
2. Pertukaran dilaksanakn dengan jalan barter, belum mengenal uang
3. Hasil produksi, sistem distribusi terbentuk karena kebiasaan (tradisi) yang berlaku di dalam masyarakat.
4. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Kehidupan masyarakatnya bersifat kekeluargaan
6. Tanah merupakan sumber kehidupan dan sumber kemakmuran

Sumber kebutuhan didapat dari tanah pertanian yang dikerjakan secara bermasyarakat, untuk kemakmuran bersama.

b. ***Sistem Ekonomi Terpusat***.

***Pengertian:***

Sistem ekonomi terpusat ialah suatu sistem yang seluruh kebijaksanaan perekonomian diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Di dalam ini, perekonomian berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Rakyat hanya menjalankan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

***Ciri-cirinya:***

1. Suatu alat dan sumber produksi adalah milik negara. Karena alat-alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai negara maka hak milik perseorangan tidak ada. Setiap orang di dalam negara yang menganut system perekonomian ini tidak mempunyai apa-apa.

   Mereka hanya sebagai pelaksana, hanya sebagai objek.
2. Kebijaksanaan perekonomian diatur oleh pemerintah

   Pemerintah sebagai penguasa akan membuat rencana pembangunan nasionalnya. Segala kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sepenuhnya berada di tangan pemerintah, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasannya.
3. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

   Jenis-jenis pekerjaan di dalam suatu negara serta pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Rakyat tidak bisa memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang dikehendaki. Karena tidak bebas untuk berpindah-pindah pekerjaan.

   Negara-negara yang menjalankan ssstem ekonomi terpusat antara lain:
   - Indonesia pada tahun 1960 an
   - Uni Soviet
   - RRC

***Keuntungan Sistem Ekonomi Terpusat***

1. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian.
2. Pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industri/produksi.
3. Pemerintah mengatur distribusi barang-barang produksi.
4. Mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

***Kelemahannya:***

1. Hak milik perseorangan tidak ada kecuali barang-barang yang sudah dibagikan

2. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga tidak berkembang dan cenderung mati.
3. Bersifat paternalistis. Apa yang dikatakan oleh pemerintah selalu benar, sehingga rakyat wajib patuh

***Sitem ekonomi terpusat timbul karena***

1. Sistem liberasl membawa kehancuran dan menimbulkan eksploitasi bagi manusia lain.
2. Merupakan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan secara cepat yang disebabkan belum siapnya masyarakat dalam suatu perencanaan.

***c. Sistem Ekonomi Liberal***

***Pengertian:***

Sistem ekonomi liberal merupakan system perekonomian yang kehidupan ekonomi diserahkan kepada sector swasta tanpa campur tangan pemerintah.

Sistem ekonomi liberal muncul karena ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya yang terkenal " *An Inguiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nation*" Inti yang dikemukakan oleh Smith yaitu tentang penyelidikan factor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Dengan segala sesuatu untuk mencapai suatu kemakmuran dengan melalui kerja. Pada system ekonomi liberal, masalah perekonomian tidak berada di tangan negara/pemerintah, tetapi pada rakyat.Rakyatlah yang mengatur perekonomiannya sendiri, pemerintah hanya mengawasi.

***Ciri-ciri sistem liberal***

1. Semua alat dan sumber produksi berada di tangan perseorangan, masyarakat atau perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini masyarakat

secara individu maupun kelompok diberi kebebasan untuk mengatur dan memilikinya.

2. Adanya pembagian kelas dalam masyarakat yaitu:
   a. kelas pemilik
   b. kelas pekerja
3. Adanya persaingan antarpengusaha.

   Karena setiap orang diberi kebebasan memiliki dan berusaha maka persaingan antarpengusaha tidak dapat dielakkan. Masing-masing bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.

**Negara-negara penganut system liberal**

1. Indonesia pada tahun 1950.
2. Negara-negara kapitalis, tetapi tidak murni liberal, karena pemerintah turut serta campur tangan, misalnya:
   - Prancis
   - Amerika Serikat
   - Inggris
   - Belanda

**Kebaikan system ekonomi liberal**

1. Setiap individu bebas mengatur perekonomiannya dan tidak perlu menunggu perintah dari pemerintah sehingga bebas berusaha mencapai laba sebesar-besarnya.
2. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi.
3. Adanya persaingan antarpengusaha mendorong kemajuan.
4. Produksi berdasarkan atas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**Keburukan*:***

1. Menimbulkan eksploitasi (penindasan) terhadap manusia yang lain, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
2. Menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat

3. Sering menimbulkan krisis, sebab kehidupan ekonomi tidak menentu.
4. Tidak adanya pemerataan pendapatan, karena setiap orang berlomba-lomba mencari laba besar.

***d. Sistem ekonomi nasional (demokrasi ekonomi Indonesia)***

Sistem ekonomi nasional dijalankan oleh negara berdasarkan pandangan hidup negara itu sendiri. Negara yang menganut paham liberal tentu akan menyususn sistem perekonomiannya dengan sistem ekonomi bebas. Negara yang menganut paham sosialis, komunis, tentu akan mengatur perekonomiannya berdasarkan sistem terpimpin.

Indonesia adalah negara yang menganut dan berdasarkan Pancasila maka perekonomiannya disusun sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam Pancasila. Rangkaian penyusunannya yang terkandung tentu tertumpu pada landasan ideal Pancasila yaitu pada sila ke 5 " Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang kemudian disusun dalam UUD 1945 (landasan struktural) antara lain pasal 33 UUD 1945 yang kemudian diopersionalkan (landasan opersional) melalui ketetapan MPR berupa Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN)

Sistem ekonomi nasional dijalankan di Indonesia pada masa Orde Baru yang kemudian dikenal dengan demokrasi ekonomi Indonesia. Sistem inilah yang menjadi pola untuk perkembangan dan kegiatan usaha ekonomi di Indonesia.

**Sistem ekonomi yang pernah diterapkan di Indonesia**

Sejak kemerdekaan 17-08-1945 sampai saat ini Indonesia sudah pernah menjalankan sistem ekonomi:

a. Sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an
b. Sistem etatisme atau sistem ekonomi terpimpin pada tahun 1960-an

c. Demokrasi ekonomi Indonesia pada zaman Orde Baru

Di dalam GBHN Tap MPR – RI 1988 No.II/MPR/1988 dikatakan bahwa:

Di dalam demokrasi ekonomi Indonesia ditentukan bahwa masyarakat harus lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Adapun pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia bertitik tolak pada pasal 33 UUD 1945 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat.

**Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia.**

1. Perekonomian disusun dan diusahakan secara bersama berdasar pada asas kekeluargaan.
2. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan digunakan setelah mendapat persetujuan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan diawasi oleh lembaga perwakilan rakyat.

5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

**Ciri-ciri negatif demokrasi ekonomi Indonesia**

Ciri-ciri ini harus dihindarkan sebab:

1. Sistem free figh liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme, yaitu negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Pemisahan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

**e. Tata Ekonomi Dunia Baru**

**Pengertian:**

Tata ekonomi dunia baru adalah cara atau sistem pengaturan ekonomi suatu negara dengan pengelolaan faktor produksi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut dalam mencapai kemakmuran.

**Hal-hal yang menyebabkan semakin suramnya perekonomian dunia antara lain:**

1. Keterbatasan energi
2. Kurangnya jumlah makanan karena bertambah seperti deret hitung dan semakin bertambahnya penduduk yang bertambah seperti deret ukur.
3. Terbatasnya sumber-sumber daya alam.

Pada tahun 1974 di Roma dilaksanakan konferensi pangan dunia (Word Food Conference) Negara-negara peserta konferensi menyerukan kepada negara-negara yang mempunyai persediaan pangan agar membantu negara-negara lain yang mengalami kekurangan pangan. Konferensi pangan dunia ini dilaksanakan karena persediaan pangan dunia memang sangat memprihatinkan sebagai penyebab hal tersebut antara lain:

- Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat pesat, sehingga mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap pangan, sedangkan areal pertanian semakin sempit.
- Meningkatnya harga energi yang dapat menghambat laju peningkatan produksi pertanian.
- Adanya bencana alam seperti kemarau panjang, banjir, gempa bumi yang semuanya mengakibatkan rusaknya tanaman pangan, sehingga penduduk mengalami kelaparan.

Sehingga dengan demikian maka kelompok Roma mempunyai tujuan antara lain; menelaah dan mengkaji dunia yang rumit dan kompleks serta menganalisis kecenderungan-kecenderunganya.

Selain dari itu sidang khusus PBB mengeluarkan deklarasi dan aksi pembentukan ekonomi dunia baru yang terdiri dari kelompok Roma dan Dialog Utara Selatan. Dialog Utara-Selatan yang dimaksud yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh negara-negara bagian utara dengan negara-negara di bagian selatan belahan bumi. Yang mempunyai tujuan

memelihara hubungan baik agar dapat bersama saling membantu demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Oleh karena itu melalui dialog diharapkan terjadi suatu kerjasama yang erat di segala bidang perekonomian. Negara-negara berkembang dalam dialog ini biasanya menerima bantuan dari negara-negara maju. Bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang tidak sama, tergantung keadaan negara yang akan menerima bantuan. Bantuan yang diberikan antara lain berupa uang, teknologi, kemudahan-kemudahan dalam perdagangan dan pembayaran internasional.

Negara-negara yang termasuk kelompok Utara, antara lain:

- Amerika Serikat
- Jepang
- Perancis
- Italia
- Uni Sovviet
- Jerman Barat
- Belanda
- Inggris
- Spanyol

Sedangkan kelompok Selatan (negara-negara berkembang) antara lain:

- Indonesia
- Singapura
- Philipina
- India
- Negara-negara Afrika Selatan
- Malaysia
- Birma
- Bangladesh
- Negara-negara Amerika Latin

Pada tahun 1974 sidang khusus PBB mengeluarkan deklarasi dan aksi pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru yang mengatur antara lain:

a. Cara pendistribusian persediaan sumber-sumber alam seperti energi, beberapa jenis bahan mentah serta komoditi-komoditi lainnya.

b. Menghapus permainan dan persaingan antara negara-negara kaya untuk mendapatkan bahan baku semurah-murahnya dan menjual hasil produksi setinggi-tingginya di negera-negara miskin.
c. Setiap negara baik negara kaya maupun negara miskin secara bersama-sama berusaha meningkatkan kesejahteraan.

Selain hal tersebut diatas tata ekonomi dunia baru mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pembangunan masing-masing negara erat hubungannya dengan pembangunan negara lain
2. Negara-negara di dunia merupakan suatu kesatuan yang mempunyai nasib dan kepentingan sama.

**Dasar pertimbangan terbentuknya tata ekonomi dunia baru adalah:**

1. Kebutuhan antara negara yang satu dengan negara lainnya berbeda-beda.
2. Negara manapun tidak mampu berdiri sendiri.
3. Adanya ketergantungan negara-negara sedang berkembang pada negara-negara maju.
4. ledakan penduduk yang mengakibatkan pengangguran disertai dengan kekurangan pangan yang melanda negara-negara miskin.

## 4. Sistem Perekonomian Indonesia

1. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk

perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.

Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

2. Sistem Perekonomian Indonesia

Berdasarkan Demokrasi Pancasila Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD'45, sistem perekonomian pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti

bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

a) Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

b) Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif Demokrasi Pancasila dipilih, karena memiliki ciriciri positif yang diantaranya adalah (Suroso,1993) :

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dngan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima ciri utama sistem ekonomi Pancasila yaitu:

a) Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta.
b) Manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial.
c) Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitaririanisme atau pemerataan sosial.
d) Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
e) Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

3. Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free fight liberalism, Etatisme, dan Monopoli

Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya:

a) Free fight liberalism ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin.
b) Etatisme yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
c) Monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti 'keinginan sang monopoli'

Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan 'mungkin campuran', namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an - tahun1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun1960-an - masa orde baru.

Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 - tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:

1. Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi.
2. Program/ Sumitro Plan tahun 1951.
3. Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960

Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia.

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:

1. Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusankeputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerahdaerah, dan masalah politik sejenisnya.
2. Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.

3. Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13 kabinet berganti saat itu. Akibatnya program dan rencana yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.
4. Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping putusan individu/ pribadi, dan partai lebih dominan daripada kepentingan pemerintah dan negara.
5. Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950 – 1957) dan etatisme (1958 – 1965). Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah 'terjadi' di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti berikut:
    1. Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
    2. Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek 'Mercu Suar'.
    3. Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali.

Keadaan tersebut masih diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2%.

**5. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru**

Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 - 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945.

Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi.

Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk:

1. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/ kapitalis dan etatisme/ komunis).
2. Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum. Tercatat bahwa :

1. Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%
2. Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%
3. Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%
4. Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%

Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969. Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama namun kegiatan ekonomi lebiih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar.

Ciri-ciri ekonomi kerakyatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat.
2. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai keadilan serta kualitas hidup
3. Mewujudkan pembangungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Menjamin kesempatan bekerja dan berusaha
5. Memperlakukan seluruh rakyat secara adil

**6. Para Pelaku Ekonomi**

a) Tiga Pelaku Ekonomi (Agen-agen pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi)

Dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu:

1. Pemilik faktor produksi
2. Konsumen
3. Produsen

Maka jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi :

1. Sektor rumah tangga
2. Sektor swasta
3. Sektor pemerintah
4. Sektor luar negeri

Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok (sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi), yakni:

Sek. Swasta -> Koperasi -> Sek. Pemerintah

Sek. Pemerintah -> Sek. Swasta -> Koperasi

Koperasi -> Sek. Pemerintah -> Sek. Swasta

**7. Peranan Pemerintah Dalam Sistem Ekonomi Indonesia**

Dalam sistem perekonomian Indonesia pemerintah memiliki peranan yang cukup besar yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut:

1) Pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien.
2) Pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu.
3) Pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian.

**EVALUASI**

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Apa sisi negatif Sistem Ekonomi Merkantilisme (kel 2)
2. Apa keuntungan menggunakan SE Merkatilisme (kel 3)
3. Apa maksud istilah Proteksionisme dan Politik Kolonial pada SE Merkatilisme (kel 4)
4. Apakah SE Merkatilisme dapat diterapkan di Indonesia. (kel 5)
5. Istilah Merkatilisme berarti untuk mengadakan pertukaran. Apakah maksud pertukaran dalam istilah tersebut. (kel 6)
6. Apakah SE Merkatilisme hanya mengandalkan aset atau modal yang berupa logam mulia saja? Jelaskan (ke 7)
7. Apakah saat ini masih ada negara yang menganut SE Merkatilisme, kalau ada sebutkan. (kel 8)
8. dalam kondisi perekonomian internasional seperti saai ini, apakah SE Merkatilisme dapat diterapkan. (kel 9)

9. Ciri-ciri SE Merkatilisme disebutkan bahwa Negara adalah satu-satunya penguasa ekonomi. Jelaskan maksud dan contoh aplikasinya. (kel 10)
10. Jelaskan keuntungan dan kerugian negara yang menerapkan SE Merkatilisme. (kel 11)
11. Jelaskan keuntungan dan kerugian penerapan SE Merkatilisme. (kel 12)
12. Pelaksanaan Merkatilime, negara membuat peraturan yang berbentuk proteksionisme yaitu negara mendukung ekspor dengan insentif dan menghalangi impor dengan tarif. Indonesia yang juga menerapkan melakukan proteksi, apakah juga menggunakan SE Merkatilisme. (kel 13)
13. Jelaskan sebab-sebab kemunduran SE Merkatilisme akhir abad ke-18. (kel 14)
14. Apakah dampak positif dan negatif bagi Indonesia, jika menganut SE Merkatilisme. (kel 15)
15. Apa keburukan Sistem Ekonomi Merkantilisme. (kel 16)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Apa hubungan SE Fisiokrat dan SE Kapitalisme (kel 1)
2. Negara mana yang menganut SE Kapitalisme? Apa dampak yang dirasakan oleh negara tersebut?Jelaskan (kel 3)
3. Apa yang menjadi sebab munculnya SE Fisiokrat (kel 4)
4. Apa keuntungan dan kerugian jika negara menggunakan sistem Kapitalisme. (kel 5)
5. Apa hubungan kaum Kapitalisme dan Fisiokrat. (kel 6)
6. Bagaimana ciri-ciri SE Fisiokrat dan SE Kapitalisme, berikan contoh negara-negara yang menganutnya.(ke 7)
7. Sebutkan kelebihan dan kekurangan SE Kapitalisme. (kel 8)
8. Apa yang menyebabkan perubahan aliran ekonomi Merkantilisme menjadi Fisiokrat dan akhirnya menjadi aliran Kapitalisme. Apa yang menjadi pembeda ke-3 aliran tersebut, beserta sisi positif dan negatifnya. (kel 9)

9. Apa yang membuat Laissez Faire menjadi bahan kajian yang menarik dan memberi corak bagi para ekonom klasik saat ini. (kel 10)
10. Apakah dalam penerapan azas pengembangan hak milik pribadi sangat menguntungkan dalam kapitalisme. (kel 11)
11. Dari keempat bentuk kapitalilisme, mana yang paling menguntungkan bagi negara yang menjalankan. (kel 12)
12. Kebebasan yang bagaimanakah yang terdapat pada fisiokrat dan kapitalisme. (kel 13)
13. Apakah ada hubungan antara SE Fisiokrat dan Kapitalisme. (kel 14)
14. Apa perbedaan aliran Laissez Faire dengan aliran klasik Adam Smith di sistem perekonomian merkantilisme. (kel 15)
15. Teori apakah yang dimiliki oleh kaum Fisiokrat. (kel 16)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Dalam SE Sosialis, Pemerintah atau negara berperan kuat di bidang apa. (kel 1)
2. Apa keunggulan SE Sosialis daripada SE Kapitalisme berkaitan dengan kekuasaan pemerintah (kel 2)
3. Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat (The Six Major Historical Stages). Jelaskan dan beri contohnya. (kel 4)
4. Salah satu kelemahan-kelemahan dari SE Sosialis adalah tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, bagaimana nsaib orang-orang yang tidak mempunyai uang atau modal (orang miskin)? Apakah pemerintah sudah menyediakan atau menyiapkan pekerjaan untuk orang miskin tersebut? Jika ya, apakah pekerjaannya sama dengan orang kaya? Apakah kebijakan tersebut adil. (kel 5)
5. Sistem Ekonomi Sosialis mempunyai beberapa prinsip dasar yaitu pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik. Contoh disiplin politik itu seperti apa. (kel 6)
6. Bagaimana peranan pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis sesuai dengan tujuan SE tersebut. (kel 7)

7. Apa yang dimaksud dengan evolusi alamiah Kapitalisme menuju ke Sosialisme. (kel 8)
8. Jelaskan peranan individu, saudagar (kapitalis), dan pemerintah pada sistem ekonomi sosialis. (kel 9)
9. Mengapa individu dianggap fiksi belaka dalam SE Sosialis. Bukankah setiap indivudu memiliki HAM yang sama antara satu dengan lainnya. (kel 10)
10. Bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjasi pada SE Sosialis. (kel 11)
11. Apakah setelah diterapkannya SE Sosialis, tidak ada lagi kesenjangan sosial? Jelaskan. (kel 12)
12. Tahap-tahap apa saja yang ada dari Sosialisme menuju Komunisme. (kel 13)
13. Sebutkan satu contoh negara yang menganut SE Sosialis? Jelaskan bagaimana perekonomian negara tersebut saat penerapannya. (kel 14)
14. Jelaskan teori yang dipaparkan oleh Marx dalam bidang ekonomi. (kel 15)
15. Jelaskan maksud Teori Nilai Lebih, Teori pemusatan, Teori Pemupukan, Teori Pemiskinan dan teori Krisis. (kel 16)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Bagaimanakah dampak penggunaan SE Islam di sebuah negara. (kel 1)
2. Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, mengapa tidak menganut SE Islam. (kel 2)
3. Bisakah SE Islam diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. (kel 3)
4. Bagaimana jika Indonesia seluruhnya menganut SE Islam. (kel 5)
5. Apakah maksud Universal dan Elastis dalam aturan Ekonomi Islam. (kel 6)
6. Bagaimana menurut pandangan Saudara, SE Islam dapat disejajarkan dengan SE Kapitalisme atau Sosialisme (seperti dalam makalah). (kel 7)

7. Negara manakah yang 100 % menganut ekonomi Islam. (kel 8)
8. Apa pendapat Saudara tentang perbankan Syariah di Indonesia. Jika dikenakan pajak oleh Bank Indonesia, bagaimana hulumnya menurut pandangan sistem ekonomi Islam. (kel 9)
9. Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, mengapa tidak menganut SE Islam. (kel 10)
10. Bisakah SE Islam diterapkan di Indonesia yang mayorits beragama Islam, dan banyak pemuka agama (kel 11)
11. Apakah hambatan dalam penerapan sistem ekonomi Islam. (kel 12)
12. bagaimana menurut sistem ekonomi Islam tentang bunga bank. (kel 13)
13. Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam dapat disejajarkan dengan sistem ekonomi lain, berbeda dengan sistem ekonomi lain, serta berposisi tengah di antara sistem ekonomi laim. (kel 14)
14. Apa manfaat sistem ekonomi Islam di Indonesia. (kel 15)
15. Dalam konsep distribusi kekayaan, terdapat mekanisme pasar, mekanisme pasar seperti apa dan bagaimana penerapannya. (kel 16)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Pada pasal 23 UUD 45, perubahan mengatur tentang APBN yang mengatur penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana bila dana APBN menyalahi UU? (kel 1)
2. Pasal 33 UUD terutama pasal 3 meyebutkan bahwa Bumi, aira dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. (kel 2)
3. Seberapa besar peran pemerintah dalam memakmurkan rakyat sesuai UUD 1945. (kel 3)

4. Jelaskan keterkaitan semua pasal ekonomi dan bagaimana sejarah terbentuknya UUD pasal ekonomi tersebut. (kel 4)
5. Kendala apa saja yang ditimbulkan konstitusi pada sektor ekonomi. (kel 6)
6. Bagaimana peran pemerintah terhadap pasal 27 UUD 1945 yang kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. (kel 7)
7. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan materiil atau kebutuhan dasar, berikan contohnya. (kel 8)
8. Bagaimana komentar Saudara terhadap pasal 27 UUD 1945, dengan keadaan yang ada di Indonesia saat ini. (kel 9)
9. Jelaskan dan berikan contoh pelaksanaan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. (kel 10)
10. Dalam pasal 28 disebutkan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak dasar untuk dipenuhi oleh negara, apa saja hak dasar tersebut dan kenapa realitanya tidak ada. (kel 11)
11. Dalam pasal 28 disebutkan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak dasar untuk dipenuhi oleh negara, apa saja hak dasar tersebut. (kel 12)
12. Apakah undang-undang yang telah dibuat pemerintah dalam bidang ekonomi sudah teralisasi. (kel 13)
13. Apakah sistem ekonomi di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan UD pasal ekonomi yang telah ditetapkan. (kel 14)
14. Sebutkan contoh yang mencerminkan pasal 27 UUD 1945 saat ini. (kel 15)
15. Jelaskan pendapat anda tentang pasal 27 UUD 1945, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada saat ini. (kel 15)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Dari 5 pemikiran tokoh-tokoh yang ada di slide anda, menurut kelompok anda, pemikiran yang mana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia saat ini. (kel 1)

2. Konsep pemikiran emil salim tentang SEP dan Mubyarto berbeda, jelaskan perbedaanya. (kel 2)
3. Apakah langkah-langkah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa orde baru efektif dan benar-benar diterapkan.Jelaskan.(kel 3)
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pendapat Wilopo dan Wijoyo. (kel 4)
5. Apa yang dimaksud dengan SEP. (kel 5)
6. Dari ke-5 tokoh pemikir sistem ekonomi indonesia, menurut anda mana yang sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia. (kel 7)
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tercapainya keseimbangan antara sistem komando dan sistem pasar. (kel 8|)
8. Apakah saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, karena dalam penerapannya tidak ditemukan sistem tersebut. (kel 9)
9. Dari kelima pemikiran para tokoh mengenai Sistem ekonomi Indonesia, menurut kelompok anda bagaimanakah simpulan dari perdebatan kelima tokoh tersebut. (kel 10)
10. Bagaimana menurut Anda perkembangan perekonomian Indonesia yang sempat menjadi kontroversi di kalangan pemikir sistem ekonomi Indonesia. (kel 11)
11. Apakah yang dimaksud dengan keseimbangan antara sistem komando dan sistem pasar menurut Emil Salim. (kel 12)
12. Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi pasar dengan perencanaan menurut Emil Salim. (kel 13)
13. Apa yang mengakibatkan krisis berkelanjutan di Indonesia selama masa reformasi ini. (kel 14)
14. Pada masa reformasi ini, perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berkelanjutan menjadi krisis ekonomi. Bagaimana pendapat Saudara. (kel 15)

15. Pada masa orba lalu ada beberapa kebijakan ekonomi, salah satunya mengundang investor asing, apa tujuan kebijakan tersebut, penerapan dan keuntungan yang diperoleh Indonesia. (kel 16)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Mengapa pada setiap Repelita selalu difokuskan pada pertanian. (kel 1)
2. Apakah yang dimaksud dengan pola konglomerasi. (kel 2)
3. Dari semua Repelita yang ada, mana yang menurut kelompok anda sudah diterapkan di Indonesia. (kel 3)
4. Pola konglomerasi itu seperti apa. (kel 4)
5. Mengapa sekarang tidak diterapkan Repelita. (kel 5)
6. Apa manfaat diadakannya Repelita di Indonesia. (kel 6)
7. Jelaskan dampak negatif pelaksanaan Repelita terhadap masyarakat. (kel 8)
8. Repelita keberapa yang menunjukkan keberhasilan dan ketidakberhasilan, apa yang melatarbelakangi hal tersebut. (kel 9)
9. Apa maksud dan manfaat pola konglomerasi sehingga strategi pembangunan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan pola konglomerasi. (kel 10)
10. Apa tujuan utama dirancangnya Repelita. Apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan harapan. (kel 11)
11. Dalam Repelita VI berbagai langkah deregulasi dan debirokrasi diteruskan. Jelaskan seperti langkah-langkah tersebut. (kel 12)
12. Kenapa Repelita tidak digunakan lagi sekarang. (kel 13)
13. Apa hubungan antara Repelita dan GBHN. (kel 14)
14. Bagaimana hambatan Repelita VI dalam mencapai pertumbuhan ekonomi khususnya sektor Industri. (kel 15)

15. dalam trilogi pembangunan terdapat 3 sasaran. Apaka ketiga sasaran tersebut sudah terlaksana, dan berikan contoh nyata yang sudah terjadi di Indonesia. (kel 16)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Dengan adanya RPJM, mengapa masih ada RPJP dan RKP? Padahal RPJM tersebut telah mencakup keseluruhan rencana pembangunan. (kel 1)
2. Sejak diadakannya RPJM, apakah ada keuntungan atau kerugian dari RPJM tersebut. (kel 2)
3. Jelaskan apa saja strategi pembangunan ekonomi dan berikan contohnya. (kel 3)
4. Sebutkan visi dan misi dari RPJM, dan sebutkan target-target pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran. (kel 4)
5. Jika RPJM tidak berhasil, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah. (kel 5)
6. Apakah RPJM berjalan lancar, bagaimana hasil dari RPJM. (kel 6)
7. Apa perbedaan Repelita dan RPJM. (kel 7)
8. Apa hubungan RPJM dengan rencana kerja 100 hari presiden. (kel 9)
9. Bagaimana pelaksanaan RPJM 2010-2014, berikan contohnya. (kel 10)
10. Jelaskan maksud strategi pembangunan pro growth, pro job, pro poor. (kel 11)
11. Apakah program pembangunan pemerintah sudah mencakup solusi dari permasalahan yang ada. (kel 12)
12. Apa yang membedakan RPJM dengan Repelita, dan apa keunggulan RPJM. (kel 13)
13. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan RPJM di tingkat propinsi dan kabupaten. (kel 14)
14. Jelaskan pengertian 3 strategi pembangunan. (kel 15)
15. Apakah visi dan misi dari RPJM. (kel 16)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Banyak atau sedikitnya jumlah penduduk di Indonesia itu berdampak apa. (kel 1)
2. Apa kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyebaran penduduk yang tidak merata dan laju pertumbuhan yang masih relatif tinggi. (kel 2)
3. Menurut kelompok anda, bagaimana perilaku atau tindakan pemerintah dalam mengatasi krisis nilai tukar yang terjadi di Indonesia. (kel 3)
4. Apa yang dimaksud dengan baby boom. Bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam rangka baby boom tersebut. (kel 4)
5. Bagaimana cara pemerintah menghadapi arus urbanisasi. (kel 5)
6. apakah tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah kekurangan modal selain peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. (kel 6)
7. bageimana peran dan usaha pemerintah dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk tanpa ada keseimbangan lapangan kerja yang tersedia. (kel 7)
8. Apa yang dilakukan pemerintah jika kebijakan kependudukan tidak berhasil. (kel 8)
9. Bagaimana pengaruh antara pertumbuhan penduduk di Indonesia dan pembangunan perekonomian di Indonesia. (kel 10)
10. Apakah kebijakan yang direncanakan pemerintah telah dilaksanakan semua. Jika belum apa yang menjadi hambatan pelaksanaanyan. (kel 11)
11. Arus urbanisasi yang deras dapat menimbulkan masalah bagi kota yang didatangi termsuk masalah sosial. Masalah sosial seperti apa, jelaskan cara mengatasi. (kel 12)
12. Kebijakan apa yang tepat untuk meratakan penduduk. (kel 13)
13. Bagaimana mengatasi arus urbanisasi yang terjadi begitu deras. (kel 14)

14. Jika permintaan barang melebihi penawaran, apakah yang terjadi pada perekonomian. Bagaimana kaitannya dengan masalah masalah kependudukan . (kel 15)
15. Bagaimana cara memaksimalkan kinerja penduduk Indonesia. (kel 16)

**Pertanyaan untuk kelompok**

1. Mengapa lulusan universitas semakin sulit mencari pekerjaan?padahal angka pengangguran semakin sedikit. (kel 1)
2. Menurut pendapat anda, seperti apa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Mengapa orang lebih banyak memilih pekerjaan di luar negeri daripada di negara sendiri. (kel 2)
3. mengapa permasalahan pengangguran tidak akan mungkin bisa diatasi oleh pemerintah sendiri. (kel 3)
4. Bagimana hambatan pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. (kel 4)
5. Bagaimana individu menanamkan jiwa wirausaha. (kel 5)
6. Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. (kel 6)
7. Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, berikan contohnya. (kel 7)
8. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ketenagakerjaan, mengingat banyak tenaga kerja yang menjadi TKI. (kel 8)
9. Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, apa saja kebijakan mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi. (kel 9)
10. Permasalah ketenagakerjaan dipengaruhi SDM dan SDA. Bagaimana meningkatkan SDM dan SDA untuk mengurangi tingkat pengangguran. (kel 10)
11. Apakah program pembangunan pemerintah sudah mencakup solusi dari permasalah yang ada. (kel 11)

12. Apakah program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah telah terealisasi dan program mana yang paling berhasil. (kel 12)
13. Apa program pemerintah untuk mengatasi pengangguran saat ini. (kel 13)
14. Bagaimana usaha pemerintah dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. (kel 14)
15. Menurut pendapat Saudara, bagaimana kondisi tenaga kerja di Indonesia sekarang. (kel 15).

**PERTANYAAN UNTUK DISKUSI**

1. Tuliskan pengertian dari sistem politik dan sistem ekonomi politik !
2. Bagaimana keterkaitan antara rezim politik dengan kehidupan ekonomi!
3. Jelaskan kembali paradigma dan sistem ekonomi politik berdasarkan system perekonomian yang berlaku di dunia !
4. Bagaimana keterkaitan antara ekonomi politik dengan proses pembangunan, jelaskan !

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Budiardjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
2. Cholisin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
3. Duveiger, M,. 1995, Sosiologi Politik, Rajawali, Jakarta
4. Hatington, Samuel. 2004. *Tertib Politik Pada masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Raja Grafindo.
5. Hidayat, Imam. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
6. Lane, J. E., dan Ersson, S., 1994, Ekonomi Politik Komparatif, alih bahasa Haris
7. Munandar, Raja Grafindo Persada, Jakarta
8. Nasiwan. 2009. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
9. Philipus, Ng., dan Aini, N., 2004, Sosiologi dan Politik, Raja Grafindo Persada, Jakarta
10. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
11. Rachbini, D.J., 1996, Ekonomi Politik: Paradigma, Teori, Dan Perspektif Baru, CIDES- INDEF, Jakarta
12. Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
13. Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. (http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem-kepartaian-dan-partai politik.html)

# BAB II

# PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN EKONOMI

**Standar Kompetensi :**

Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), Pendapatan Nasional (PN)

Kompetensi Dasar :

1. Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, PN
2. Menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional
3. Membandingkan PDB dan pendapatan perkapita Indonesia dengan negara lain

**Indikator** :

1. Mendeskripsikan konsep PDB, PNB, PNN, PI, Pendapatan Disposibel (disposible income)
2. Menghitung Pendapatan Per Kapita
3. Mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional
4. Membedakan metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, produksi dan pengeluaran
5. Menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran
6. Membandingkan PDB dan pendapatan perkapita Indonesia dengan negara lain

## I. PENDAPATAN NASIONAL

**Pengertian:**

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas **Pendapatan nasional** adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di

suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. **Sejarah**

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

**Konsep Pendapatan Nasional**

1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)

   Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan

2. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)

   PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.

   Rumus

   GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

3. NNP (Net National Product)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

Rumus :

NNP = GNP – Penyusutan

4. NNI (Net National Income)

   NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)

   Rumus :

   NNI = NNP – Pajak tidak langsung

5. PI (Personal Income)

   PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan *transfer payment*.

   Rumus :

   PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )

6. DI (Disposible Income)

   DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

   Rumus :

   DI = PI – Pajak langsung

**Penjelasan tentang Konsep Pendapatan Nasional**

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

1. **Produk Domestik Bruto (GDP)**

   Produk domestik bruto (*Gross Domestic Product*) merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari ***Gross Domestic Product*** (GDP) dianggap bersifat bruto/kotor.

**Pendapatan Nasional merupakan salah satu ukuran Pertumbuhan Ekonomi suatu Negara**

**2. Produk Nasional Bruto (GNP)**

Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

3. **Pendapatan Nasional Neto (NNI)**

Pendapatan Nasional Neto (*Net National Income*) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

4. **Pendapatan Perseorangan (PI)**

Pendapatan perseorangan (*Personal Income*)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (*transfer payment*). *Transfer payment* adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya

keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

5. **Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)**

Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable income* ini diperoleh dari *personal income* (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

**Penghitungan**

Jasa perbankan turut memengaruhi besarnya pendapatan nasional

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

2. Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai *jasa* dan *barang jadi* (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
3. Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (*Consumption*), pemerintah (*Government*), pengeluaran investasi (*Investment*), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor ($X - M$)

**Contoh perhitungan ( dalam milyar rupiah ):**

| | | |
|---|---|---|
| Produk Nasional Bruto (GNP) | | Rp 70.000 ,- |
| Dikurangi penyusutan dan penggantian benda-benda modal | | (Rp 7.000,-) |
| Produk nasional neto ( NNP ) | | Rp 63.000,- |
| Dikurangi pajak-pajak tidak langsung | | Rp 13.000,- |
| Pendapatan nasional neto ( NNI ) | | Rp 50.000,- |
| Dikurangi laba yang ditahan dalam : | | |
| perusahaan | Rp 4.000,- | |
| pajak perseroan | Rp 6.000,- | |
| iuran jaminan social | Rp 1.500,- | |
| | | ( Rp 11.500,-) |
| | | Rp 38.500,- |
| Tambahan transfer-payments | | Rp. 4.000,- |

| | |
|---|---|
| Pendapatan Perseorangan ( Personal Income ) | Rp. 42.500,- |
| Dikurangi pajak langsung | (Rp. 1.000,-) |
| Disposible Income ( DI ) | Rp. 41.500,- |
| Dikurangi simpanan perseorangan | ( Rp. 7.000,-) |
| Pengeluaran-pengeluaran konsumsi | **Rp. 34.500,-** |

**II. PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL**

1. Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional

   Tujuan mempelajari pendapatan nasional :

   a. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara
   b. Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun
   c. Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.

2. Manfaat mempelajari pendapatan nasional

   a. Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara
   b. Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar propinsi
   c. Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara
   d. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.

3. Perhitungan Pendapatan Nasional

   a. Metode Produksi

      Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu.

      Rumus Pendekatan produksi : Y = Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 +…..(PXQ)n

      P = harga

      Q = kuantitas

b. Metode Pendapatan

Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan *(rent, wage, interest, profit)* yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Y = r + w + i + p

c. Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

Y = C + I + G + (X – M)

**Metode Penghitungan Pendapatan Nasional**

Mengenai data pendapatan nasional di Indonesia dikumpulkan dan dihitung serta disajikan oleh Biro Pusat Statistik Penghitungan pendapatan nasional dimulai dengan Produk Domistik Bruto. Sebagaimana diketahui bahwa Produk Domistik Bruto (PDB) itu sendiri dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu:

**(1) Pendekatan produksi**

Menurut **pendekatan produksi**, Produk Domistik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yang dimaksud secara garis besar dipilih-pilih menjadi 11 sektor atau lapangan usaha yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) bangunan; (6) perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintahan; dan (11) jasa-jasa.

**(2) Pendekatan pendapatan**

Sedangkan menurut **pendekatan pendapatan,** PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh factor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji; sewa tanah; bunga modal; dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatn ini per sektor disebut *nilai tambah bruto sektoral*. Oleh sebab itu PDB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha. Secara matematis. Pendapatan nasioanal yang didistribusikan kepada seluruh anggota masyarakat pemilik faktor produksi ditulis sebagai berikut:

$$\mathbf{NI = W + R + i + \eta}$$

**Keterangan:**

***NI*** **= *nasional income atau pendapatan nasional***

**W = jumlah upah dan gaji yang diterima buruh dan karyawan**

**R = jumlah sewa tanah yang diterima pemilik tanah**

**i = jumlah bunga yang diterima pemilik modal**

**$\eta$ = jumlah keuntungan yang diterima oleh para pengusaha**

**(3) Pendekatan pengeluaran**

Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi antara lain (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domistik bruto dan perubahan stok; (3)

pengeluaran konsumsi pemerintah; serta (4) nilai ekspor neto (yaitu nilai ekspor dikurangi impor) dalam jangka waktu setahun Secara matematis.dapat dinyatakan sebagai persamaan dari variable-variabel makro, yaitu:

$$GNP = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

| | |
|---|---|
| ***GNP*** | ***= pendapatan nasional bruto*** |
| **C** | **= pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa** |
| **I** | **= pengeluaran untuk barang-barang modal** |
| **G** | **= pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa** |
| **X** | **= nilai barang ekspor** |
| **M** | **= nilai barang impor** |

**Pendapatan perkapita**

**Pendapatan perkapita** adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.

*Perbandingan per Kapita Indonesia dengan Negara lain*

Pendapatan per kapita Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ternyata masih termasuk rendah. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel 1.2.

*Tabel 1.2. Perbandingan PNB per Kapita Negara-negara ASEAN Tahun 1999.*

| Negara | PNB per Kapita ( US $ ) |
|---|---|
| Singapura | 30.170,00 |
| Malaysia | 3.670,00 |
| Thailand | 2.160,00 |
| Filipina | 1.050,00 |
| Indonesia | 640,00 |
| Kamboja | 260,00 |

Sementara itu, pertumbuhan PNB Riil Per Kapita di dunia dapat Anda pelajari tabel 1.3.

*Tabel 1.3 Pertumbuhan PNB Riil Per Kapita.*

| Kelompok Negara-negara | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Proyeksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2000 | 2001 |
| Negara Industri | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 2,5 |
| Negara Industri Utama | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,3 |
| Amerika Serikat | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 2,2 |
| Inggris | 2,4 | 2,2 | 4,6 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 1,9 |
| Italia | 2,7 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 3,0 |
| Jepang | 1,2 | 4,8 | 1,3 | - 2,8 | 0,1 | 0,7 | 1,6 |
| Jerman | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 2,2 | 1,4 | 2,7 | 3,2 |
| Kanada | 1,7 | - 0,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 1,7 |
| Perancis | 1,4 | 0,7 | 1,6 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 2,8 |
| Negara Industri lainnya | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 1,3 | 3,9 | 3,9 | 3,5 |
| Negara Berkembang | 4,2 | 4,9 | 4,3 | 1,6 | 2,2 | 3,9 | 3,9 |
| Berdasarkan kawasan | | | | | | | |
| Afrika | 1,1 | 3,0 | 0,5 | 0,7 | - 0,1 | 1,9 | 2,1 |
| Asia | 7,4 | 6,7 | 5,3 | 2,7 | 4,7 | 4,9 | 4,7 |
| Eropa dan Timur Tengah | - 1,6 | 5,5 | 2,9 | 0,6 | - 1,4 | 2,6 | 2,1 |
| Amerika Latin | 1,1 | 1,0 | 4,2 | - 0,1 | - 1,4 | 2,5 | 3,1 |
| Negara Industri Baru Asia | 5,8 | 5,0 | 4,3 | - 3,2 | 6,6 | 5,5 | 5,1 |

Berdasarkan tabel 1.3, secara umum pada tahun 1998 pertumbuhan PNB Riil Per Kapita di dunia mengalami penurunan sebagaimana halnya Indonesia kecuali negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada dan Perancis.

Hal ini terjadi, karena di dunia yang arus globalisasinya semakin gencar, kejadian atau masalah yang terjadi di suatu negara atau kawasan tertentu akan berdampak pula pada negara lainnya.

**Hubungan Pendapatan Nasional, Penduduk dan Pendapatan Perkapita**

Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita negara yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu negara.

Untuk lebih memperjelas, perhatikan tabel di bawah ini!

*Tabel 1.1 Contoh Perhitungan Pendapatan per Kapita tahun 1999*

| Negara | PDB per tahun ( juta US $) | Penduduk (juta) | Pendapatan per Kapita (US $) |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 130.600 | 204 | 640 |
| India | 427.740 | 980 | 440 |
| Malaysia | 81.311 | 22 | 3.670 |
| Singapura | 95.453 | 3 | 30.170 |
| Korea | 398.825 | 46 | 8.600 |
| Meksiko | 358.059 | 96 | 3.840 |

*(Sumber: BPS tahun 2000)*

Dari tabel 1.1 di atas, nampak jelas bahwa India yang memiliki PDB per tahun US $ 427.407.000.000,00 hanya mendapatkan pendapatan per kapita US $ 440,00. Lain halnya dengan Singapura yang mendapatkan PDB per tahun US $ 95.453.000.000,00 ternyata pendapatan per kapitanya US $ 30.170,00. Mengapa demikian?

Ternyata tingginya pendapatan nasional suatu negara, tidak menjamin pendapatan per kapitanya juga tinggi. Hal ini terjadi karena faktor jumlah penduduk juga sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan per kapita.

**Pendapatan Perkapita Indonesia 2010.**

Menurut sumber berita dari website "KOMPAS.com" tertanggal Senin, 7 Februari 2011, mnenyebutkan bahwa Pendapatan per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku pada 2010 tercatat mencapai Rp 27 juta atau setara dengan 3.004,9 dollar AS. Angka ini naik sekitar 13 persen bila dibandingkan pada 2009 lalu yang mencapai Rp 23,9 juta atau setara 2.349,6 dollar AS.

*"Itu, angka nominal PDB sebesar Rp 6.244,9 triliun dibagi dengan jumlah penduduk pada 2010 yang sebesar 237,6 juta hasilnya adalah Rp 27 juta per kapita pendapatan per tahun,"* kata Kepala BPS Rusman Heriawan, Senin (7/2/2011).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat, produk nasional Bruto (PNB/GNP) per kapita juga meningkat dari Rp 23,1 juta atau setara 2.267,3 dollar AS pada 2009 menjadi Rp 26,3 juta atau 2.920,1 dollar AS di 2010, atau terjadi peningkatan sebesar 13,9 persen. *"GNP ini sudah menghilangkan income orang asing yang dihasilkan di dalam negeri, dibawa keluar, tetapi harus kami tambahkan dengan income orang Indonesia yang bekerja di luar negeri,"* ucap Rusman.

Penyajian Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) dari berbagai sektor dirinci menurut nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi, yang mencakup sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, lembaga keuangan, dan jasa-jasa. Sedangkan PDB dan PNB menurut penggunaan dirinci menurut komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) sangat diperlukan untuk menentukan besarnya pendapatan per kapita (*per capita income*).

Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara selama kurun waktu setahun, atau ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk.

***Wawasan Ekonomi***

Perkembangan ekonomi dihitung berdasarkan Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB). Setelah kemerdekaan, PDB baru mulai diestimasi pada tahun 1950.

Pendapatan per kapita dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{PDB per kapita} = \frac{\text{PDB tahun t}}{\text{Jumlah penduduk tahun t}}$$

atau

$$\text{PNB per kapita} = \frac{\text{PNB tahun t}}{\text{Jumlah penduduk tahun t}}$$

Untuk dapat mengetahui perkembangan PDB per kapita, berikut ini disajikan data PDB per kapita dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005.

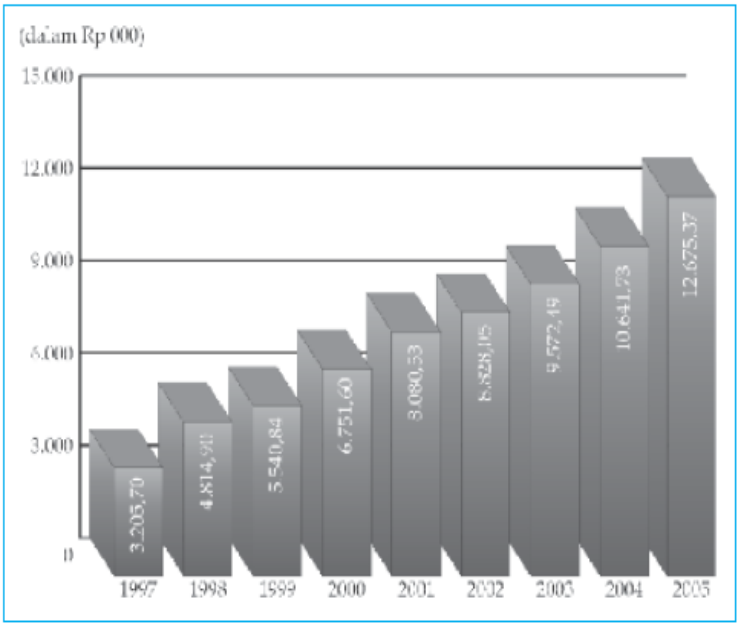


PDB per kapita Indonesia tahun 1997–2005. Sumber: BPS

Tinggi rendahnya PDB atau PNB dan pendapatan per kapita suatu negara oleh Bank Dunia dikelompokkan ke dalam empat kelompok berdasarkan pendapatan per kapita pada tahun 2003, yaitu sebagai berikut.

1. Kelompok negara berpendapatan rendah (low income economies), yaitu negara-negara yang memiliki PNB per kapita sekitar US$ 675 atau kurang.
2. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar US$ 675 sampai dengan US$ 2.695.
3. Kelompok negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar US$ 2.696 sampai dengan US$ 8.335.
4. Kelompok negara berpendapatan tinggi (hight income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar US$ 8.335 atau lebih.

Pendapatan per kapita suatu negara dinyatakan dengan nilai tukar uang luar negeri atau dalam dolar Amerika Serikat. Dengan cara demikian kita dapat membandingkan pendapatan per kapita suatu negara dengan negara lain, terutama negara-negara sekitar yang berdekatan, misalnya Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kedudukan negara yang bersangkutan di antara negara-negara lain.

Umumnya negara yang masih berkembang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah. Rendahnya pendapatan per kapita pada negara yang sedang berkembang dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

1. Tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit.
2. Keterampilan dan kecakapan yang rendah, sehingga kekurangan tenaga ahli.
3. Modal yang dimiliki relatif sedikit.

4. Kekurangan akan sumber alam.
5. Kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang.
6. Sikap yang tidak mendorong berproduksi.

Dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, negara kita tertinggal jauh. Pada tahun 2004 pendapatan per kapita negara kita US$ 900, sementara Malaysia US$ 3.900. Jika ekonomi kita tumbuh 5% setahun, 25 tahun lagi negara kita baru setara Malaysia saat ini.

**Produk Domestik Bruto Indonesia**

Antara tahun 1965 sampai 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya tujuh persen. Dengan pencapaian ini Indonesia tidak lagi berada di tingkatan "negara-negara berpendapatan rendah" melainkan masuk ke tingkatan "negara-negara berpendapatan menengah". Meskipun demikian, Krisis Keuangan Asia yang terjadi di akhir tahun 1990an telah memberikan efek negatif bagi perekenomian nasional, akibatnya produk domestik bruto (PDB) Indonesia turun 13.6 persen di tahun 1998 dan naik sedikit di tahun 1999 sebanyak 0.3 persen. Antara tahun 2000 sampai 2004 perekenomian mulai memulih dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebanyak 4.6 persen per tahun. Setelah itu PDB Indonesia meningkat dengan nilai rata- rata per tahun sekitar enam persen, kecuali tahun 2009 dan 2013, ketika gejolak krisis keuangan global dan ketidakpastian terjadi. Meski masih cukup mengagumkan, PDB Indonesia turun ke nilai 4.6 persen dan 5.8 persen pada kedua tahun tersebut.

| | **Rata-rata Pertumbuhan PDB** (%) |
|---|---|
| **1998 – 1999** | - 6.65 |
| **2000 – 2004** | 4.60 |
| **2005 – 2009** | 5.64 |

| | |
|---|---|
| **2010 – 2013** | 6.15 |

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PDB** (dalam milyar USD) | 285.9 | 364.6 | 432.1 | 510.2 | 539.4 | 706.6 | 846.8 | 878.0 |
| **PDB** (perubahan % tahunan) | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 4.6 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
| **PDB per Kapita** (dalam USD) | 1,643 | 1,923 | 2,244 | 2,345 | 2,984 | 3,467 | 3,546 | 3,468 |

**Sumber: Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Badan Pusat Statistik (BPS)**

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, penurunan perekonomian global akibat krisis ekenomi yang terjadi di akhir tahun 2000an berdampak kecil bagi perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan dampak yang dialami negara lain. Tahun 2009 PDB Indonesia turun ke 4.6 persen. Ini berarti Indonesia adalah salah satu negara dengan performa pertumbuhan PDB tertinggi di seluruh dunia pada tahun itu (dan berada di posisi tiga di antara kelompok negara-negara G-20). Meskipun harga-harga komoditas menurun drastis, bursa saham pun nilainya turun, imbal hasil obligasi domestik dan internasional cukup tinggi dan nilai tukar valuta yang melemah, Indonesia masih mampu tumbuh secara signifikan. Keberhasilan ini terutama dikarenakan oleh ekspor Indonesia yang kepentingannya relatif terbatas terhadap perekonomian nasional, kepercayaan pasar yang terus tinggi, dan konsumsi domestik berkelanjutan yang kuat. Konsumsi domestik di Indonesia (khususnya konsumsi swasta) berkontribusi sekitar dua pertiga bagian dari pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan sekitar tujuh juta penduduk masuk ke kelas menengah tiap tahunnya, Indonesia sebenarnya menyimpan kekuatan konsumen yang secara signifikan dapat mendorong perekonomian dan memicu peningkatan investasi dalam dan luar negeri dari tahun 2010 dan seterusnya.

Lambannya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 (5.78 persen) terjadi karena kombinasi ketidakpastian global yang parah disebabkan oleh perancangan ulang program pembelian aset per bulan Federal Reserve sebesar USD $85 milyar (pelonggaran kuantitatif) yang mengakibatkan arus keluar modal secara signifikan dari negara-negara berkembang, dan kelemahan isu finansial internal: defisit transaksi berjalan dengan rekor tertinggi, inflasi tinggi (setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013) dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tajam. Untuk menanggulangi masalah-masalah ini dan menjaga stabilitas keuangan negara, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara signifikan, walau ini berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dikorbankan.

Perkiraan perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan masih cukup positif tetapi telah direvisi oleh organisasi-organisasi internasional dan pemerintah Indonesia karena ketidakpastian global yang berkepanjangan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (disingkat MP3EI) yang baru-baru ini dikeluarkan, mencakup tahun 2011 sampai 2025, menunjuk enam sektor sebagai koridor utama perekonomian dengan tujuan menempatkan Indonesia dalam sepuluh besar perekonomian global pada tahun 2025. Rencana ini mengimplikasikan investasi besar pada sektor infrastruktur - sektor yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia - dan tujuan akhirnya adalah PDB akan naik per tahunnya sebanyak delapan sampai sembilan persen. Namun, target tersebut sepertinya terlalu ambisius jika ingin dicapai dalam waktu dekat (2014-2017). Institusi-Institusi otoritas internasional (Bank Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia) memproyeksikan pertumbuhan PDB tahunan Indonesia dalam kisaran 5.3 sampai 6.0 persen untuk periode 2014 sampai 2017.

Organisasi-organisasi ini menekankan bahwa reformasi politik dan ekonomi praktis dikombinasikan dengan investasi besar dalam sektor infrasktruktur akan menambahkan satu atau dua persen dari perkiraan pertumbuhan PDB saat ini.

Yang juga menarik untuk dianalisa adalah seberapa jauh faktor-faktor yang ada dalam kebudayaan Indonesia (salah satu contohnya budaya Jawa yang dominan) dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB (sebagai perbandingan, misalnya saja, pengaruh kebudayaan Cina terhadap pertumbuhan PDB Cina). Informasi lebih lanjut tentang topik ini, silakan lihat bagian Budaya Berbisnis di Indonesia.

**PDB Indonesia per Kapita dan Distribusi Pendapatan Tak Merata**

PDB per kapita baru-baru ini mencapai level tertinggi dalam sejarah perekonomian Indonesia dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi lagi. Namun, apakah PDB per kapita adalah tolak ukur yang cocok untuk Indonesia di mana masyarakat Indonesia dicirikan oleh tingkat perbedaan yang cukup tinggi terutama dalam distribusi pendapatan, masih menjadi tanda tanya. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara stastistik dan realitas sebagaimana kekayaan 43 ribu orang terkaya Indonesia (yang hanya berkisar 0.02 persen dari total penduduk Indonesia) adalah setara dengan 25 persen PDB Indonesia. Kekayaan empat puluh orang terkaya Indonesia mecakup 10.3 persen dari PDB (jumlah ini berbanding sama dengan jumlah kekayaan 60 juta orang Indonesia termiskin). Angka-angka ini mengindikasikan konsentrasi kekayaan yang besar dalam kalangan elit yang kecil. Apalagi kesenjangan distribusi pendapatan ini diprediksi akan semakin meluas ke depan.

**Komposisi PDB Indonesia: Pertanian, Industri dan Jasa**

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan luar biasa komposisi PDB Indonesia. Indonesia berubah dari negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada pertanian menjadi negara yang perekonomiannya lebih seimbang, di mana sektor manufaktur (sejenis industri) kini lebih dominan daripada sektor pertanian. Hal ini juga menyiratkan bahwa Indonesia mengurangi ketergantungan tradisionalnya pada sektor ekspor primer. Penting juga untuk dicatat, bahwa bagaimanapun juga ketiga sektor utama tersebut mengalami ekspansi selama periode yang disebut dibawah ini.

| | 1965 | 1980 | 1996 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| **Pertanian** | 51% | 24% | 16% | 15% |
| **Industri** | 13% | 42% | 43% | 47% |
| **Jasa** | 36% | 34% | 41% | 38% |

**Sumber: Bank Dunia dan CIA World Factbook**

Ada asumsi bahwa peran sektor industri akan menguat terhadap PDB Indonesia sementara sektor pertanian dan jasa akan melemah, karena saat ini sektor manufaktur adalah sektor yang paling popular di Indonesia untuk investasi asing langsung. Selain itu, untuk industri-industri inovatif tertentu pemerintah Indonesia memberikan tax holiday (membebaskan atau mengurangi pajak penghasilan sementara untuk investor asing) dan dalam waktu yang bersamaan akan menyiapkan insentif-insentif guna merangsang industri nasional dengan melarang ekspor bahan baku di tahun 2014 (untuk industri pertambangan). Langkah ini memaksa dunia perindustrian untuk membangun pabrik dan fasilitas pengolahan untuk menghasilkan produk nilai tambah.

Salah satu ciri khas Indonesia yang cukup menonjol adalah bahwa bagian barat negeri ini secara signifikan mendapatkan porsi lebih besar berkaitan dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB. Pulau Jawa (terutama Jakarta dan sekitarnya) dan Sumatra berkontribusi lebih dari delapan puluh persen total PDB Indonesia. Alasan utama situasi ini adalah karena bagian barat Indonesia posisinya lebih dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ketiga wilayah ini dilihat secara historis dulunya sama-sama berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Sementara itu, bagian timur Indonesia terletaknya di vakum ekonom dan populasi penduduknya cukup rendah.

**PDB Indonesia dalam Perspektif Global**

Tabel di bawah ini menunjukkan PDB Indonesia per kapita dan PDB riil dan membandingkannya dengan dua kekuatan ekonomi penting dunia: Amerika Serikat (AS) dan Cina.

| | **PDB per Kapita** (USD) | | | | **Pertumbuhan PDB Riil** (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **AS** | 48,358 | 49,854 | 51,749 | - | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 1.9 |
| **Cina** | 4,433 | 5,447 | 6,091 | - | 10.3 | 9.2 | 7.4 | 7.7 |
| **Indonesia** | 3,010 | 3,540 | 3,592 | - | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |

**Sumber: Bank Dunia**

Melihat PDB per kapita di atas, dapat disimpulkan langsung bahwa Indonesia masih harus berusaha lebih lama lagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju. Kenyataannya adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan PDB terendah di dunia. Melalui beberapa rencana pembangunan, pemerintah Indonesia mencoba untuk merubah angka tersebut menjadi sekitar USD $14,250 - $15,500 pada tahun 2025, tetapi apakah tujuan ambisius ini akan tercapai, cukup meragukan - dan seperti disebut di atas - angka ini tidak merefleksikan distribusi pendapatan atau kesejahteraan (yg tidak adil) dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah yang efektif sangat diperlukan demi menyokong pendidikan anak-anak Indonesia serta menstimulasi pasar kerja sehingga pertumbuhan tenaga kerja dapat disalurkan.

PDB per kapita Indonesia terus meningkat sejak tahun 2000an dan seterusnya. Awalnya Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan mencapai angka USD $3,000 sekitar tahun 2020 tetapi Indonesia berhasil mencapai angka tersebut satu dekade lebih awal. Pencapaian level USD $3,000 ini dianggap sebagai langkah penting karena imbasnya adalah percepatan pembangunan di berbagai sektor (seperti ritel, otomotif dan properti) oleh karena peningkatan permintaan konsumen

sehingga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai level USD $5,000 pada tahun 2015.

Pertumbuhan PDB riil menunjukkan perspektif yang menjanjikan. Sementara negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat - digalaukan oleh hutang publik - akan tumbuh secara lamban dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, negara-negara ekonomi berkembang di Amerika Selatan dan Asia akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Negara-negara ini memiliki karakteristik yang mirip, seperti persediaan sumber daya alam yang melimpah, populasi yang terus berkembang pesat, upah buruh dan biaya produksi rendah dan yang tidak kalah penting ranah politik yang cukup stabil. Salah satu negara ini adalah Indonesia. Tetapi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang memukau seperti apa yang telah dilakukan Cina dalam dua dekade terakhir, perlu adanya investasi besar dalam infrastruktur dan memfokuskan diri pada reformasi politik, ekonomi dan sosial.

## III. PERTUMBUHAN EKONOMI

**Pengertian:**

(1) Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan dari tingkat pendapatan nasional yang terjadi di suatu negara dari tahun ke tahun.

   **a. Pendapatan nasional merupakan besarnya produk nasional (barang dan jasa) yang dinyatakan dalam uang, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat dalam satu tahun dan dikalikan dengan harga barangnya.**

   **b. Untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu bangsa dilakukan dengan cara mencari pendapatran per kapita.**

   **c. Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.**

**Cara mengukur pertumbuhan ekonomi**

**PDB, PNB, PNN dan PN** secara umum disebut ***agregat ekonomi***; maksudnya angka besaran total yang menunjukkan prestasi ekonomi suatu negara atau negeri. Dari agregat ekonomi dapat dijadikan sebagai ukuran dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil, terlebih dahulu dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku (*current price)*, sehingga terbentuk angka angka agregat ekonomi menurut harga konstan *(constant price)* tahun tertentu.

**Ada 3 (tiga) metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga konstan yaitu:**

a. Metode revaluasi

   Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar

b. Metode ekstrapolasi

   Metode ini dilakukan dengan cara memperbaharui (*updating)* nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya.

c. Metode deflasi

   Metode ini dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relatif yang sesuai (*indeks harga x 1/100)*

   Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, ESCAP mengemukakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

   (1) Stock of Resources or Productive Assets Approach

   (Apakah diketemukan sumber-sumber produktif baru dan apakah sumber-sumber yang ada dipertahankan serta dipergunakan lebih baik?)

   (2) Flow of Output Approach

(suatu perbandingan antara pendapatan nasional saat ini dengan pendapatan nasional yang lalu, hal ini untuk mengetahui ada tidaknya pertambahan)

(3) Level of Living Approch

(Suatu perbandingan tingkat konsumsi potensial sekarang dengan tingkat konsumsi potensial yang lalu) kenaikan tingkat konsumsi potensial ini dapat terlihat pada kenaikan investasi.

**Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :**

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%

g = tingkat pertumbuhan ekonomi ↵PDBs = PDB riil tahun sekarang↵PDBk = PDB riil tahun kemarin

Contoh soal :

PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah = Rp. 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007 ?

jawab :

g = {(467-420)/420}x100% = 11,19%

**Manfaat**

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa

Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.

Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

**Faktor yang memengaruhi**

1. **Permintaan dan penawaran agregat**

   Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional

Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.

2. **Konsumsi dan tabungan**

   Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (*saving*) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat **Keynes** yang dikenal dengan *psychological consumption* yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.

3. **Investasi**

   Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

Prestasi ekonomi suatu bangsa atau negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Meskipun bukan merupakan satu-satunya

ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu bangsa, ia cukup representatif dan sangat lazim digunakan. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tapi juga membandingkannya dengan negara lain. Rinciannya secara sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian negara yang bersangkutan. Di samping itu, dari angka pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh ukuran turunan (***devived measure)*** nya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Kegiatan perekonomian suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa melibatkan masyarakat secara menyeluruh yang terbagi dalam rumah tangga ekonomi, yaitu: rumah tangga individual, perusahaan (swasta, pemerintah, dan asing), pemerintah dan luar negeri. Secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam dua macam rumah tangga ekonomi, yaitu:

a. Rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga yang menyediakan factor-faktor produksi dan memperoleh imbalan sebagai balas jasa penyerahan factor produksi dalam bentuk upah/gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.
b. Rumah tangga produsen (perusahaan-perusahaan), yaitu rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan menggunakan factor-faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen.

**Teori pertumbuhan ekonomi**

**1. Teori dari Austria**

**a. Teori pertumbuhan Werner Sombart (1863 – 1941)**

Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi empat tingkat, yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan vorkapitalismus (prakapitalisme) juga dikatakan sebagai zaman kapitalis purba. Dalam zaman ini masalah perekonomian belum mengenal adanya kaum kapitalis. Kehidupan masyarakat masih

statis, mereka berusaha hanya untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan cirri-ciri pada zaman tersebut antara lain:

- Adanya sifat kekeluargaan/komunitas
- Kehidupan masyarakat di sector pertanian
- Kehidupan ekonominya statis.

2. Tingkat pertumbuhan fruhkapitalismus, juga disebut sebagai zaman kapitalis madya. Kehidupan masyarakat pada zaman ini sudah meningkat dengan memikirkan usaha untuk mencapai keuntungan dan memupuk kekayaan. Dengan cirri-ciri pada zaman tersebut antara lain:
   - Adanya individualisme
   - Kehidupan ekonominya dinamis
   - Tumbuhnya jenis pekerjaan baru (sebagai tukang, pedagang) produksi yang dihasilkan berdasarkan pesanan.
   - Sudah mulai dipergunakan uang
3. Tingkat pertumbuhan hochkapitalismus atau zaman kapitalis raya. Pada zaman ini kehidupan perekonomian benar-benar mengarah pada profit motif atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Setiap usaha yang dilaksanakan didasari untuk mencari keuntungan semata-mata. Dengan cirri-ciri pada zaman tersebut antara lain:
   - Tumbuhnya kaum kapitalis yang memiliki alat-alat produksi
   - Tumbuhnya kaum buruh yang memiliki tenaga kerja
   - Produksi dilakukan secara masal dengan alat-alat yang modern
   - Perdagangan semakin luas dan menimbulkan persaingan dan monopoli
4. Tingkat pertumbuhan spatkapitalismus atau zaman kapitalis akhir. Pada zaman ini muncul sosialisme yang berusaha untuk mencapai

kesejahteraan bersama. Dengan cirri-ciri pada zaman tersebut antara lain:

- Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian
- Lebih mementingkan kepentingan bersama
- Hilangnya para majikan besar.

b. **Teori Pertumbuhan Friedrich List (1789 – 1846 )**

Dalam teorinya membedakan tingkat pertumbuhan menjadi 5 (lima) antara lain:

**1. Masa pengembaraan**

Pada masa pengembaraan masyarakat masih belum mengenal pengetahuan sehingga belum mampu menciptakan alat-alat modern dan kehidupan mereka berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain menyesuaikan dengan kondisi alam yang memberikan kehidupan mereka.

2. **Masa beternak**

Masyarakat pada masa ini sudah mengenal nilai kegunaan dari binatang ternak, yang semula dijadikan sebagai teman untuk berburu, kemudian binatang tersebut dijadikan sebagai binatang peliharaan untuk alat pengangkut dan untuk mencukupi kebutuhannya terhadap daging.

3. **Masa bertani**

Sudah mulai timbul pemikiran untuk menetap pada satu tempat dan bertani dengan menggunakan alat yang masih sangat sederhana. Dari bertani hasilnya bertambah dan lebih sehingga dapat disimpan sehingga kehidupannya menjadi teratur dan tetap, tidak lagi mengembara dan dengan sendirinya terciptalah suatu masyarakat.

4. **Masa bertani dan masa kerajinan tangan**

   Dalam masa bertani masyarakat membutuhkan alat-alat untuk pertanian seperti cangkul, sabit atau barang anyam-anyaman sebagai hasil kerajinan tangan.

5. **Masa industri dan perniagaan**

   Masyarakat berpikir untuk memperbanyak alat-alat yang dibutuhkan untuk memperlancar pekerjaan dengan demikian terciptalah lapangan pekerjaan dan timbullah perdagangan yang mengakibatkan industri semakin maju.

**c. Teori pertumbuhan Karl Bucher (1847 – 1930)**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dibedakan menjadi 4 (empat) tingkat antara lain:

1. **Rumah Tangga Tertutup**

   Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat secara individu, produksi yang dihasilkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri

2. **Rumah Tangga Kota**

   Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi pada zaman pertengahan, ketika masyarakat sudah mengenal adanya pertukaran, pertukangan, dan kerajinan.

3. **Rumah Tangga Bangsa**

   Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi ketika produksi yang dihasilkan sudah dipergunakan oleh orang lain dalam pasaran nasional, sudah terdapat hubungan produsen dengan konsumen secara langsung dan lalu lintas perdagangan semakin luas dan besar.

4. **Rumah Tangga Dunia**

Merupakan suatu kegiatan ekonomi dimana suatu negara belum mampu memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu timbul hubungan antarnegara untuk mengadakan tukar-menukar barang produksinya.

**2. Teori Klasik dan neoklasik**

**a. Teori Klasik**

1. Adam Smith

Dalam buku yang berjudul *An Inquiry Into the Principle and Causes of the Wealth of Nation*. Adam Smith mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi tercermin dalam pertumbuhan output. Pertumbuhan output ditentukan oleh pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pertumbuhan output ditentukan 3 (tiga) factor:

a. persediaan sumber alam
b. jumlah penduduk
c. capital stock

**2. David Ricardo**

Mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation*, bahwa factor alam sebagai factor pembatas dalam pertumbuhan ekonomi. Pada intinya apa yang dikemukakan oleh David Ricardo sama dengan apa yang dikemukakan oleh Adam Smith.

Artinya, alam mempunyai keterbatasan sedangkan penduduk berkembang secara secara pesat. Sehingga pada akhirnya jumlah penduduk semakin banyak

**b. Teori Neoklasik**

1. Robert Sollow

Memusatkan perhatiannya karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Penduduk dapat menjadi sumber daya manusia yang dimanfaatkan akan membentuk adanya akumulasi modal yang jika

digabungkan dengan pemakaian teknologi modern maka akan menimbulkan output.

Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, teknologi modern, dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

2. Tori Harrod – Domar

   Teori ini bertujuan untuk menerangkan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk tercapainya pemakaian barang-barang modal secara efektif. Teori ini berlandaskan teori Keynes yang merupakan teori makro yang membahas analisa tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Teori ini merupakan pemikiran Harrod (1939) dan Domar (1947) yang tetap mempertahankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi peranan pembentukan modal.

**3. Aliran Baru**

W.W Rostow berpendapat bahwa semua dalam dimensi ekonomi terletak pada salah satu diantara lima kategori yaitu:

a. Masyarakat tradisional

   Masyarakat tradisional merupakan suatu masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada kemampuan sendiri.

   Fakta mengenai masyarakat tradisional yaitu terdapat adanya suatu batas tingkat output yang dapat dicapai perkapita. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan teknologi

b. Prakondisi untuk Periode Take Off

   Tingkat ini mencakup masyarakat yang menghadapi proses transisi. Prakondisi untuk periode take off ini dilaksanakan dengan jalan

memasukkan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baruuntuk bidang pertanian maupun industri

Kalau kita perhatikan perekonomian Indonesia, prakondisi untuk periode take off ini sudah dimulai pada PELITA I

c. Periode Take Off

Pada periode ini disebut juga sebagai "tinggal landas" merupakan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menghadapi penghalang-penghalang pertumbuhan menjadi lenyap. Potensi perekonomian diperluas sehingga masyarakat dapat mendominasi perkembangan perekonomian selanjutnya.

Indonesia sendiri diharapkan akan mengalami periode take off atau era tinggal landas pada akhir PELITA V nanti. Pengertian tinggal landas bagi bangsa Indonesia tidaklah sama dengan apa yang dikatakan dalam teori Rostow.

Presiden Soeharto pada tanggal 11 Januari 1988 ketika menerima Pengurus DPP KNPI menjelaskan sebagai berikut:…..

Bagi bangsa Indonesia definisi tinggal landas yang dimaksudkan aialah sesuai aspirasi rakyat Indonesia sendiri ….. perjuangan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila jelas tidak bisa dicapai sekaligus, maka dibuatkan landasan-landasan yakni suatu kondisi, baik di bidang ekonomi maupun politik, social budaya, dan pertahanan keamanan.

Dan sebelum kondisi itu tercapai terlebih dahulu disusun kerangka landasan yang dilaksanakan dalam PELITA IV yang kemudian diperkuat lagi pada PELITA V

Menurut Rostow syarat untuk tinggal landas yaitu meningkatnya jumlah investasi perekonomian dari 5 % atau kurang sampai 10 % atau lebih dari output total dari negara yang bersangkutan

d. Usaha ke arah kedewasaan (maturity)

Setelah periode take off maka akan timbul perkembangan yang sifatnya terus-menerus diiringi dengan teknologi yang semakin modern dan canggih sehingga masalah-masalah industri bergerak lebih berdaya guna dan tepat guna serta berhasil guna.

e. Periode konsumsi tinggi (*high mass consumption*)

Pada periode ini produksi di bidang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa akan lebih dominan, bahkan sector industri inilah yang tampak.

Hal ini dapat terjadi karena:

1. income riil per kapita meningkat
2. struktur angkatan kerja berubah
3. proporsi penduduk membesar.

**EVALUASI**

**Naskah Soal**

1. PDB Indonesia tahun 2013 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2012 adalah = Rp. 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2012 ?
2. Jelaskan tentang sejarah dari pendapatan nasional!
3. Jelaskan pengertian pendapatan nasional!
4. Sebutkan konsep-konsep apa saja yang terdapat dalam pendapatan nasional!
5. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional!
6. Jelaskan bagaimana cara Perhitungan pendapatan nasional!
7. Jelaskan pendekatan-pendekatan apa saja yang termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional (y)!

8. Jelaskan manfaat menghitung pertumbuhan ekonomi!

9. **Soal Sembilan** : ***(Soal Olimpiade Sains Propinsi (OSP) Ekonomi 2006)***

   National Income data (in billion rupiah) from a country are as follow :

   | | |
   |---|---|
   | Household consumption | Rp. 1.500 |
   | Investment | Rp. 2.500 |
   | Goverment Expenditure | Rp. 4.000 |
   | Revenue | Rp. 1.050 |
   | Wages | Rp. 700 |
   | Rent | Rp. 100 |
   | Saving | Rp. 2.500 |
   | Company Profit | Rp. 4.450 |
   | Export Netto | Rp. 1.200 |

   The amount of national income interm of expenditure approach are....

   Jawaban :

   yang ditanya dari soal diatas adalah jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluran:

   adapun rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah :

   $Y = C + I + G + (X – M)$

   $Y = 1.500 + 2.500 + 4.000 + 1.200$

   $Y = 9.200$

   ========

   jadi besarnya pendaptan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran adalah Rp. 9.200

10. **Soal kesepuluh** : ***(Soal olimpiade sains kabupaten (OSK) ekonomi 2006)***
    Suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut :

    | | |
    |---|---|
    | Konsumsi masyarakat | Rp. 90.000.000 |
    | Pendapatan laba usaha | Rp. 20.000.000 |
    | Pengeluaran Negara | Rp.130.000.000 |
    | Pendapatan sewa | Rp. 40.000.000 |
    | Pengeluaran investasi | Rp. 50.000.000 |

Ekspor Rp. 15.000.000
Impor Rp. 20.000.000
dari diatas hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran...

Jawab :
Rumur Pendapatan nasional dengan pendekatan nasional :
Y = C + I + G + (X – M)
Y = 90.000.000 + 50.000.000 + 130.000.000 + (15.000.000 - 20.000.000)
Y = 270.000.000 - 5.000.000.
Y = 265.000.000
==========
Jadi jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah Rp. 265 Juta.

11. **Soal kesebelas** : ***(Soal Olimpiade Sains Kabupaten (OSK) Ekonomi 2008)***

Data for the calculation of national income shall be as follows :
- Goverment Expenditure $ 110.500
- Wages $ 85.000
- Society expenditure $ 240.400
- Interest $ 75.200
- Export $ 45.200
- Rent $ 90.000
- Investment $ 120.000
- Import $ 40.000
- Profit $ 90.800

From data above mount of national income with income approach is....

Jawab :
pada soal diatas yang ditanyakan adalah jumlah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan.
adapun rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut :
Y = r + w + i + p
Y = 90.000 + 85.000 + 75.200 + 90.800
Y = 341.000
=========
Jadi dengan menggunakan metode pendapatan, diperoleh nilai pendapatan nasioan sebesar $ 341.000

1. **Soal keduabelas** : ***(Soal olimpiade sains kabupaten (OSK) Ekonomi 2009)***

Dibawah ini data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional :
- Upah Rp. 12.000.000
- Laba Rp. 9.000.000
- Pengeluaran pemerintah Rp. 10.000.000
- Pendapatan bunga Rp. 6.000.000
- Pendaptan sewa Rp. 8.000.000
- Pengeluaran rumah tangga swasta Rp. 36.000.000
- Impor Rp. 5.000.000
- Konsumsi Rp. 25.000.000
- Ekspor Rp. 7.000.000

berdasarkan data diatas, besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran adalah:

Jawab :
Rumus Metode pengeluaran :
Y = C + I + G + (X - M)
Y = 25.000.000 + 36.000.000 + 10.000.000 (7.000.000 - 5.000.000)
Y = 71.000.000 + 2.000.000
Y = 73.000.000
==========
jadi dengan menggunakan metode pengeluaran, besarnya pendapatan nasional adalah Rp. 73.000.000

**DAFTAR PUSTAKA:**

Eko, Yuli. 2009. *Ekonomi 1 : Untuk SMA dan MA Kelas X*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta.

Mulyati, sri Nur dan Mahfudz, Agus dan Permana, Leni. 2009. *Ekonomi 1 : Untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kelas X*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2011/04/pendapatan-nasional.html

Pratama Raharja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi makro, FE Universitas

Peter s (1997), money and Capital Markets: Financial Institutions and Instrument in a Global Marketplace, Richard D. Irwin Indonesia

*rosihan.lecture.ub.ac.id/files/.../makro_04_pendapatannasional.ppt3232*

Sukirno, Sadono (1996), Pengantar Teori Mikroekonomi, edisi ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

http://www.google.com

# BAB III

## PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari **pertumbuhan ekonomi** (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

1. Pembangunan sebagai suatu proses

   Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula,

setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

   Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

   Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

**Faktor**

Sumber daya alam yang dimiliki mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

I. **PERBEDAAN PERTUNBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI**

Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang.

1. Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan.
2. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk
3. Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi
5. Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak

**Pembangunan ekonomi**

1. Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita.
2. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
3. Memperhatikan pertambahan penduduk.
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi.

6. Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan – perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik.

## II. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi yang berlangsung di suatu negara membawa dampak, baik positif maupun negatif.

**Dampak Positif Pembangunan Ekonomi**

1. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
2. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran.
3. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
4. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.
5. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi**

1. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.
2. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.
3. hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani

**3.1. Perbedaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.**

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut diatas terdapat 3 (tiga) pokok pikiran yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Pembangunan ekonomi merupakan proses mengubah keadaan perekonomian dari suatu keadaan tertentu menuju ke keadaan yang diinginkan.
b. Bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita yang merupakan ukuran untuk menilai berkembang dan tidaknya perekonomian suatu negara. Dengan demikian maka tujuan pembangunan ekonomi tercapai/terwujud, bila pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dari waktu ke waktu.
c. Pelaksanaannya dalam waktu panjang (waktu untuk pencapaian tujuan) Dalam hal ini, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pada waktu-waktu yang ditentuka, hasil ekonomi sesuai dengan yang direncanakan.
d. Pembangunan ekonomi dilakukan dalam jangka panjang yang berarti jangka panjang lebih dari 25 tahun..

Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan ekonomi dibuat secara bertahap. Setiap tahap prioritas pembangunan, direncakan selesai dalam jangka 5 tahun sebagaimana yang kita kenal dengan sebutan PELITA (Pembangunan Lima Tahun)

b. Persamaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

i. merupakan suatu kecenderungan (trend) di bidang perekonomian suatu negara.

ii. Tujuan akhir (sebagai tolak ukur) adalah besarnya pendapatan per kapita.

**c. Perbedaan pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi**

| *Pertumbuhan* | *Pembangunan* |
|---|---|
| **a. kenaikan GNP**<br>**b. tidak memandang perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi**<br>**c. tidak memandangmana yang lebih besar/kecil antara GNP dengan pertambahan penduduk** | **a. prose kenaikan GNP**<br>**b. kenaikannya diserati dengan perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi**<br>**c. adanya aspek pemerataan pendapatan** |

**d. Hubungan antara Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan perekonomian suatu negara yang terlihat pada adanya kenaikan pendapatan per kapita penduduknya dari waktu ke waktu.

Pembangunan ekonomi merupakan alat atau sarana mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut.

**e. Faktor-faktor dan Kreteria**

**1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Suatu negara**

**1. Pengertian**

Cepat lambatnya perkembangan ekonomi, tergantung dari faktor-faktor yang mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Pengertian tentang perkembangan ekonomi bisa juga diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pertambahan pendapatan nasional. Lebih jauh lagi, bukan semata-mata pendapatan nasional yang dipakai sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi, sebab hal tersebut dibarengi dengan pertambahan penduduk.

Maka untuk menentukan apakah perekonomian suatu negara itu berkembang, bukan hanya pendapatan nasional saja yang dipakai untuk mengukurnya, tetapi tingkat pertambahan pendapatan per kapita.

**2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Ekonomi.**

**a. Faktor Alam**

4. Faktor alam meliputi kesuburan tanah, iklim, hasil hutan, barang tambang, hasil laut, dan semua yang disediakan alam dan berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia.
5. Kekayaan alam merupakan factor yang sangat berpengaruh untuk membangun perekonomian suatu negara. Terutama bagi negara yang sedang atau mulai berkembang, prioritas utama yang dipakai untuk modal pembangunan adalah pertanian dan pertambangan (kebutuhan primer) Akan tetapi kekayaan alam tersebut tidak banyak berarti apabila tidak diimbangi dengan kemampuan di dalam pengolahannya.
6. Contoh negara yang menekankan factor alam sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi adalah negara-negara Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah

menyandarkan pada tambang minyak bumi sebagai modal dasar perkembangan ekonomi..

**b. Faktor Teknologi dan Barang-barang Modal**

Perkembangan ekonomi menjadi lebih cepat apabila didukung oleh factor kemajuan teknologi.

Teknologi merupakan langkah lanjut dari peranan barang-barang modal untuk perkembangan ekonomi.

Makin canggih teknologi berarti makin tinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan teknologi berarti yang mendorong perkembangan ekonomi banyak terjadi di beberapa negara, hal ini disebabkan karena:

1. mempertinggi efisiensi produksi
2. menimbulkan penemuan-penemuan produk baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya.
3. mempertinggi kualitas barang yang diproduksi

   Contoh negara yang perkembangan ekonominya cepat karena didorong kemajuan teknologi adalah Jepang.

**c. Faktor Budaya.**

Para ahli ekonomi di dalam membicarakan permaslahan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang selalu menekankan pada system budaya masyarakat negara tersebut.

Adat istiadat dan tata cara tradisional biasanya menjadi penghambat didalam pembangunan, sehingga perkembangan ekonomi tidak bisa dipercepat dan lahan yang tersisa sangat kecil.

Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai seberapa jauh pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Sikap masyarakat yang mendorong pembangunan ekonomi, misalnya, sikap hemat dengan tujuan menabung untuk investasi:

1. sikap kerja keras untuk mengembangkan usaha.
2. Sikap di dalam berusaha untuk menambah keuntungan

Contoh negara yang mengalami perkembangan ekonomi yang didukung oleh factor budaya adalah jepang.

**3. Faktor lain yang Mempengaruhi terhadap peekembangan ekonomi antara lain:**

**a.** Kualitas tenaga kerja

Pertambahan penduduk berarti besar kemungkinannya untuk menambah produksi. Untuk hal tersebut perlu adanya pendidikan, latihan-latihan, dan penglaman dari tenaga kerja itu sendiri.

Akan tetapi bagi negara yang sedang berkembang pertumbuhan penduduk justru merupakan penghambat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan dengan tingkat pendapatan negara tersebut.

**4. Faktor pasar sebagai sumber pertumbuhan.**

Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh permintaan efektif. Luas pasar memegang peranan di dalam kegiatan perekonomian. Makin luas pasar, makin luas sumber pertumbuhan perekonomian. Maka, wajarlah para pengusaha berproduksi dengan teknologi tinggi. Jika para pengusaha berproduksi dengan teknologi rendah maka produktivitasnya

rendah, dan pendapatan tenaga kerja juga rendah. Kejadian ini membatasi luasnya pasar dan menghambat proses perkembangan ekonomi.

## III. KRETERIA

Kreteria yang biasa dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara antara lain:

***1. Pendapatan Nasional***

a. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut berjumlah besar.

b. Dalam keadaan cateris paribus, dengan terpenuhinya pemuas kebutuhan, berarti tingkat kemakmuran yang dicapai oleh negara yang bersangkutan tinggi

***c.*** Tingkat pendapatan nasional yang tinggi berarti kapasitas produksi nasional tinggi dan tingkat kesempatan kerja juga tinggi.

***2. Produksi Nasional***

Usaha perkembangan ekonomi bagi negara-negara terbelakang adalah bagaimana cara meningkatkan kapasitas produksi nasionalnya. Dalam hal ini mempunyai tujuan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan (groth rate) kapasitas produksi nasional..

***3. Kesempatan Kerja***

Suatu pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan sarana teknologi tinggi terkadang menimbulkan dampak negatif yang berupa pengangguran, dimana hal tersebut menimbulkan gejala ekonomi yang tidak diinginkan oleh negara mana pun.

Dengan demikian apabila suatu negara mampu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, berarti negara tersebut mampu mempercepat laju perkembangan ekonominya.

***4. Perekonomian Stabil***

Stabilitas ekonomi meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, dan stabilitas tingkat harga yang mempengaruhi pasar produk dalam negara. Suatu negara dikatakan berhasil di dalam perkembangan ekonominya, apabila mampu menjaga stabilitas ekonominya.

***5. Neraca Pembayaran Luar Negeri***

Suatu negara yang mengalami defisit maupun surplus neraca pembayaran luar negeri pada dasrnya merupakan keadaan yang tidak diinginkan. Negara manapun menghendaki neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Akan tetapi kalau ditinjau dari segi politik, neraca pembayaran yang surplus lebih baik daripada neraca pembayaran yang seimbang., tetapi negara manapun tidak menghendaki terjadi neraca pembayaran yang defisit.

***6. Distribusi Pendapatan***

Negara yang mempunyai pendapatan nasionalnya tinggi, kesempatan kerja tinggi dan tingkat harga stabil, belum tentu aman dalam melanjutkan perkembangan ekonomi ke tingkat kemakmuran.. Sebagai kelengkapannya adalah distribusi pendapatan yang merata.

Apabila pendapatan tidak merata akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dan ketegangan sosial. Akibatnya kehidupan masyarakat tidak tenteram. Untuk distribusi pendapatan yang merata, Indonesia menerapkannya melalui PELITA dengan tujuan yaitu 8 (delapan) jalur pemerataan yang terdiri dari:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan

4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpatisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

**Pola Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi**

**1. Pembangunan Ekonomi di Negara-negara Berkembang**

Setiap negara mempunyai tingkat perekonomian yang berbeda-beda, perbedaan tersebut disebabkan karena situasi politik, sosial, dan ekonomi yang masing-masing mempunyai hubungan timbal balik dan masih ditambah suatu falsafah yang dianut suatu negara, dan faktor sejarah terjadinya negara tersebut.

Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang tidak sama. Tiap negara mempunyai pola tersendiri tergantung pada situasi politik, kekayaan alam, dan falsafah negara.

**2. Pola Pembangunan Ekonomi Ketat dan Pola Longgar.**

**a. Pola Pembangunan Ekonomi Ketat**

Pelaksanaan Pembangunan ekonomi yang menggunakan pola ketat terdapat pada suatu negara yang menganut sistem perekonomian terpusat. Semua perencanaan perekonomian, direncanakan oleh pemerintah pusat. Demikian pula untuk masalah produksi dan distribusinya dan konsumsi diatur oleh pemerintah.

Adapun tujuan pelaksanaan pola ketat agar rencana yang telah ditetapkan dan anggaran yang telah disediakan dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Dengan demikian dapat dihindarkan hal-hal yang terlebih lagi menghambat pembangunan yang dilaksnakan dengan biaya sangat terbatas.

**b. Pola Pembangunan Ekonomi Longgar**

Alasan pemerintah suatu negara melaksanakan pola longgar antara lain: dengan keterbatasan dana maka dilibatkan pihak lain (swasta) daripada harus utang ke luar negeri, mengajak partisipasi aktif masyarakat agar timbul rasa memiliki. Karena dengan rasa memiliki maka akan timbul rasa nasionalisme., urusan negara bukan semata-mata hanya urusan pemerintah tetapi seluruh warga negara mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi pola ketat dan pola longgar mempunyai perbedaan dan persamaannya.

**Perbedaannya yaitu**:

a. Dalam pola ketat semua diatur oleh pemerintah.

b. Dalam pola longgar, pemerintah bersama-sama dengan pihak lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

**Persamaannya:**

**Sama-sama mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat**

**c. Pola Pembangunan Ekonomi di Indonesia**

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan secara berencana dan bertahap yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN) Di dalam GBHN Pola Pembangunan Nasional terdiri dari:

**1. Pola Dasar Pembangunan Nasional**

Di dalam pola dasar pembangunan nasional diletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spirutual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang

merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

**2. Landasan Pembangunan Nasional**

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah:

a. Pancasila
b. Undang-Undang dasar 1945

**3. Asas-asas Pembangunan Nasional**

a. asas manfaat
b. asas usaha bersama dan kekeluargaan
c. asas demokrasi
d. asas adil dan merata
e. asas perikehidupan dalam keseimbangan
f. asas kesadaran hokum
g. asas kepercayaan pada diri sendiri

**4. Modal Dasar dan Faktor-faktor Dominan**

Modal dasar pembangunan nasional yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia ialah:

a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia
b. Kedudukan geografis Indonesia
c. Sumber-sumber kekayaan alam
d. Jumlah penduduk yang besar
e. Modal rohaniah dan mental
f. Modal budaya

g. Potensi efektif bangsa merupakan segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai termasuk kekuatan sosial politik antara lain Partai Politik

h. Angkatan Bersenjata

Faktor-faktor dominan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia antara lain:

1. Faktor demografi dan sosial budaya
2. Faktor geografi, hidrografi, geologi, dan topografi
3. Faktor klimatologi
4. Faktor flora dan fauna
5. Faktor kemungkinan pengembangan

**5. Wawasan Nusantara**

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang mencakup:

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik
b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan social budaya
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

**6. Ketahanan Nasional**

a. kemampuan dan katangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya
**b.** sarana untuk mengatasi terjadinya tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam
**c.** pendorong bagi kelanjutan pembangunan nasional

# BAB IV

# KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN

## I. MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Indonesia, sebagai negara berkembang yang tengah melaksnakan pembangunan disegala bidang, sudah tentu menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kependudukan. Masalah kependudukan ini sangat berkaiatan dengan pembangunan ekonomi yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah terus berupaya memecahkan persoalan-persoalan yang timbul berkenaan dengan kependudukan tersebut. Secara umum, penanganan masalah kependudukan diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa. Adapun pelaksanaan dan program-program kependudukan yang dilaksanakan pemerintah meliputi:

a. pengendalian kelahiran
b. penurunan tingkat kematian, khususnya anak-anak
c. penyebaran penduduk (transmigrasi)

Usaha-usaha tersebut beralasan dan tepat sebab di Indonesia masalah kependudukan mempunyai 5 (lima) cirri pokok

1. Jumlah Penduduk Yang Besar
2. Laju Pertambahan Penduduk
3. Komposisi Penduduk Menurut Umur yang Tidak Menguntungkan

   Untuk menghitung ketergantungan masyarakat dipergunakan rumus:

$$\frac{\textbf{Kelompok usia muda + Kelompok usia tua}}{\textbf{Kelompok usia produktif}} \times 100$$

Komposisi umur, tingkat kesuburan di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Usia 0 – 14 tahun = Usia muda
2. Usia 15 – 64 tahun = Usia produktif
3. Usia 65 tahun = Usia tua
4. Penyebaran Penduduk yang Tidak Merata
5. Arus Urbanisasi yang relatif Tinggi

## II. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup dapat berupa sumber alam baik di darat, air, dan udara yang berupa tanah, air, energi, flora, dan fauna. Semua itu sangat diperlukan bagi pembangunan.

Pemanfaatan sumber-sumber alam serta pembinaan lingkungan hidup harus selalu disesuaikan dengan situasi pembangunan.

Untuk pengelolaanya diperlukan teknologi yang sesuai, agar kelstarian sumber alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan selanjutnya. Rehabilitasi sumber-sumber alam yang rusakperlu ditingkatkan serta pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut, dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

## III. KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar bagi pembangunan. Tetapi hal tersebut harus dilihat terlebih dahulu apakah penduduk itu produktif ataukah konsumtif. Karena modal dasar itulah maka pemerintah telah berusaha membuat penduduknya produktif. Dengan produktifitas yang tinggi tanpa merusak habitat lain yang ada di sekitarnya, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Dalam pembangunan harus selalu diusahakan memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah

pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, dan pemborosan penggunaan sumber alam.

Pembangunan yang lancar akan mempercepat usaha masyarakat mencapai hidup sejahtera menuju masyarakat adil dan makmur di dalam Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## IV. KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN NASIONAL

Kesempatan kerja timbul karena adanya pengertian mengenai kelompok-kelompok penduduk sebegai berikut:

a. *Economically active population* yang terdiri dari:
   1. para pekerja yang memproduksi barang dan jasa (secara ekonomi)
   2. mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan
b. *Economically inactive population* terdiri dari:
   1. bukan pekerja
   2. mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan

Persoalan kesempatan kerja berawal dari tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan angkatan kerja.

Kesempatan kerja akan timbul jika:

- ada permintaan tenaga kerja di satu pihak.
- ada penawaran tenaga kerja di pihak lain

Tingkat kesempatan kerja adalah titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan kesempatan kerja adalah jumlah penduduk angkatan kerja yang dapat diserap oleh suatu permintaan tenaga kerja (lapangan kerja)

Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas

tersebut. Menurut Sensus Penduduk Indonesia, tenaga kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun ke atas.

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif (memproduksi barang dan jasa)

Pokok-pokok Teori Keynes tentang kesempatan kerja (dalam bukunya ‘ *General Theori of Employment, Interest and Money*”) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan total tergantung pada kesempatan kerja total
2. Pengeluaran untuk konsumsi tergantung pada tingkat pendapatan, hal ini mengandung arti bahwa tingkat konsumsi juga tergantung pada kesempatan kerja (dihubungkan dengan pernyataan)
3. Kesempatan kerja total tergantung pada permintaan total (permintaan efektif)

   Dari penyataan (1), (2), dan (3) didapatkan bahwa kesempatan kerja (N), permintaan efektif (D) dan pendapatan (Y) tergantung pada dua hal:

   a. pengeluaran untuk konsumsi.

   b. pengeluaran untuk konsumsi

   Jika kecenderungan konsumsi *tidak berubah*, maka kesempatan kerja tergantung kepada volume investasi. Artinya, kesempatan kerja akan meluas jika volume investasi menurun.
4. Pada sat terjadi keseimbangan (permintaan agregat = penawaran agregat) kesempatan kerga tergantung pada:

   **a.** fungsi konsumsi

   b. volume investasi

   c. fungsi penawaran agregat

   → fungsi permintaan agregat

5. Konsumsi ( C ) ditentukan oleh:
   a. kecenderungan konsumsi (propensity to consume)
   b. besarnya pendapatan (size of income)

   Ada dua istilah didapat dari hubungan keduanya:
   a. kecenderungan konsumen rata-rata = $\frac{C}{Y}$
   b. kecenderungan konsumsi marjinal = $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$
6. Volume investasi (I) tergantung pada:
   a. tingkat bunga
   b. tingkat efisiensi marginal dari modal
7. Efisiensi marjinal dari modal tergantung pada:
   a. harapan akan laba yang tidak stabil
   b. biaya penggantian
8. Tingkat bunga ditentukan oleh:
   a. preferensi likuiditas (permintaan akan uang)
   b. kualitas uang.

**Ringkasan Teori Keynes**

- Kesemparatan kerja, pendapatan, permintaan efektif
  - Pengeluaran konsumsi
    - Hasrat Konsumsi
      - Hasrat Konsumsi Rata-rata $\left(\frac{C}{Y}\right)$
      - Hasrat Konsumsi Marjinal MPC $\longrightarrow = \left(\frac{\Delta C}{\Delta Y}\right)$
      - prinsip multiplier $(k) = \frac{1}{1\text{-}MPC}$
    - Jumlah pendapatan
  - Pengeluaran investasi
    - Tingkat bunga
      - Permintaan akan uang
        - Motif transaksi
        - Motif spekulasi
        - Motif berjaga-jaga
      - jumlah uang
    - Efisiensi Modal Marjinal
      - Harapan laba atau pendapatan yang akan datang yang diskontokan.
      - Biaya penggantian atau harga penawaran dari modal

# BAB V

# DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

## I. DISTRIBUSI PENDAPATAN

Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan nonekonomi. Penilaian dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan dengan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek nonpendapatan. Perekonomian Indonesia ditinjau dari aspek pendapatan dengan tolak ukur pendapatan perkapita.

Tolak ukur pendapatan perkapita, sebagaimana disadari, belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan. Karena merupakan konsep rata-rata, pendapatan perkapita tidak mencerminkan bagaimana pendapatan nasional sebuah negara terbagi dikalangan penduduknya, sehingga unsur kemerataan atau keadilan tidak terpantau, oleh karena itu perekonomian Indonesia harus berdasarkan tinjauan kemerataan distribusi pembangunan dan hasil-hasilnya, juga diarahkan bukan semata-mata terhadap distribusi pendapatan nasional, akan tetapi juga distribusi proses atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

## II. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja dalam pengertiannya adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki *(employment)* dan masih lowong (*vacancy)* Dari lapangan pekerjaan yan masih lowong tersebut timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja yang dating misalnya dari perusahaan swasta atau BUMN dan departemen-departemen pemerintah. Adanya kebutuhan tersebut bererarti ada kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Besarnya lapangan kerja yang masih lowong atau kebutuhan tenaga kerja yang secara

riil dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung pada banyak factor, diantaranya yang paling utama adalah prospek usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan tersebut, ongkos tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan faktor-faktor produksi lainnya yang bias menggantikan fungsi tenaga kerja, misalnya barang modal.

Selain itu juga kesempatan kerja merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi yang di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi salah satu masalah serius. Pada dasarnya, bagaimana menciptakan kesempatan kerja atau mengurangi jumlah pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara-negara industri maju

Dapat dikatakan bahwa intensitas dari masalah tersebut mungkin sekali berbeda antarnegara. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja, langsung maupun tidak langsung, misalnya laju pertumbuhan ekonomi, diversifikasi kegiatan ekonomi,perkembangan atau penetapan teknologi, tingkat pendidikan/keterampilan, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta faktor-faktor kultur dan budaya.

Masalah kesempatan kerja di Indonesia bertambah serius sejak munculnya krisis ekonomi dan mulai terasa sekali pada tahun 1998 dan 1999. Banyak perusahaan di dalam negeri yang terkena efek negatif dari krisis tersebut dalam berbagai bentuk, misalnya mengalami krisis utang pada bank di dalam atau di luar negeri, kesulitan dalam membiayai impor dalam dolar AS karena nilai tukar rupiah merosot, atau hasil penjualan menurun drastis karena purchasing power pasar menurun tajam akibat inflasi. Perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa mengurangi kegiatan atau sama sekali menghentikan kegiatan bisnis mereka. Hal seperti ini mengakibatkan banyak pekerja

terpaksa diberhentikan (PHK) Pada waktu yang bersamaan, jumlah angkatan kerja baru (misalnya lulusan perguruan tinggi) yang mencari pekerjaan meningkat terus setiap tahun, mengikuti pertumbuhan populasi dan perubahan struktur umur penduduk. Hal ini akan mengakibatkan jumlah orang yang menganggur, terbuka maupun terselubung pada saat masa kritis meningkat.

## III. KETIDAK MERATAAN DITRIBUSI PENDAPATAN

Upaya untuk memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya baru tampak nyata sejak Pelita III, manakala strategi pembangunan secara eksplisit diubah dengan menempatkan pemerataan sebagai aspek pertama dalam trilogi pembangunan, yang dikenal dengan kebijaksanaan delapan jalur pemerataan yang meliputi:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpatisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Dalam kaitan khusus dengan pemerataan pembagian pendapatan (jalur ketiga), kita dapat memilih tinjauan permasalahannya dari tiga segi yaitu:

a. pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat.
b. pembagian pendapatan antardaerah, dalam hal ini antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan.

c. pembagian pendapatan antarwilayah, dalam hal ini antarpropinsi dan antarkawasan

**5.3.1. Ketidakmerataan Pendapatan Nasional.**

Distribusi atau pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka Rasio Gini. Dimana Rasio Gini atau Indeks merupakan suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1 yang menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang

Koefisien Gini itu sendiri, perlu dicatat, bukanlah merupakan indikator paling ideal tentang ketidakmerataan (ketimpangan, kesenjangan) distribusi pendapatan antarlapisan, Namun setidak-tidaknya cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan.

**5.3.2. Ketidakmerataan Pendapatan Spasial**

Ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapisan masyarakat bukan saja berlangsung secara nasional. Akan tetapi hal itu juga terjadi secara spasial atau antardaerah, yakni antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Dilihat dengan perspektif distribusi relatif, pembagian pendapatan di kalangan penduduk perdesaan bahkan jauh lebih baik dibandingkan saudara-saudara mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Porsi pendapatan yang dinikmati oleh lapisan 40 %

masyarakat berpendapatan terendah di desa senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Tidak demikian halnya di kalangan orang-orang kota.

Ketidakmerataan pendapatan yang berlangsung antardaerah tidak hanya dalam hal distribusinya, tapi juga dalam hal tingkat atau besarnya pendapatan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan cara membandingkan persentase penduduk perdesaan terhadap penduduk perkotaan untuk tiap-tiap golongan pendapatan. Porsi penduduk perdesaan yang berada pada rentang pendapatan lapis bawah lebih besar daripada porsi penduduk perkotaan. Sebaliknya, pada rentang pendapatan lapis atas, porsi perdesaan lebih kecil.

### 5.3.3. Ketidakmerataan Pendapatan Regional

Secara regional atau wilayah, berlangsung pula ketidameratan distribusi pendapatan antarlapisan masyarakat.

Bukan hanya itu, diantara wilayah-wilayah di Indonesia bahkan terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri. Jadi, dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan di kalangan penduduk masing-masing wilayah.(region)

## IV. KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya misalnya dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antardaerah, yakni antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi juga berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional.

Tersedia cukup bukti yang bisa diajukan untuk menunjukkan betapa ketimpangan masih memprihatinkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-haripun bukti tersebut bisa terlihat dengan kasat mata dan dirasakan. Bermunculannya kawasan-kawasan kumuh (slumps) di tengan beberapa kota besar, serta sebaliknya, di lain pihak hadirnya kantong-kantong permukiman mewahdi tepian kota atau bahkan di daerah perdesaan, adalah suatu satu bukti nyata ketimpangan yang langsung dapat kita saksikan dan rasakan. Perbedaan mencolok dalam gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain lagi.

Upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, menurut penilaian beberapa kalangan, sebetulnya sudah mulai dirintis sejak awal Pelita III. Ketika itu urutan trilogi pembangunan dirasionalisasikan dengan menempatkan pemerataan sebagai prioritas pertama. Hal ini bahkan dipertahankan terus hingga Repelita VI, namun hasilnya belum bisa menggembirakan sebagaiman harapan masyarakat.

Sebagaimana hal tersebut diatas yang telah dibahas pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Sebagaimana dari literatur mendukung suatu pernyataan bahwa pada periode jangka panjang kalau pertumbuhan tetap ada dan tinggi, kesenjangan akan berkurang. Sekarang pertanyaannya adalah: apakah kesenjangan itu sendiri berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi ?

Dari hasil pengujian empiris dari studi yang ada menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan mengurangi laju pertumbuhan. Dengan landasan teorinya adalah sebagai berikut: distribusi kekayaan atau pendapatan yang timpang berpengaruh terhadap jumlah investasi dalam fisik atau manusia *(human capital)* yang selanjutnya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mempunyai arti bahwa apabila distribusi pendapatan yang merata merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan: semakin

rata pembagian pendapatan semakin tinggi laju pertumbuhan dan sebaliknya. Kerangka pemikiran teoritis ini juga didukung oleh hasil studi dari Birdsall dkk (1995) yang menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia Timur selama 30 tahun salah satunya karena kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, misalnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan perluasan kesempatan kerja. Semua ini tidak saja membuat distribusi pendapatan menjadi baik, tetapi secara tidak langsung juga berdampak positif terhadap pertumbuhan.

Menurut Aghion dkk (1999) di dalam suatu ekonomi dimana pasar modal tidak sempurna dan tingkat kekayaan serta kondisi sumber daya manusia (SDM) berbeda menurut individu, maka ada tiga alasan utama kenapa kesenjangan pendapatan mempunyai suatu efek negatif yang langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni: (a) mengurangi keesempatan investasi (b) mengurangi insentif bagi peminjam dana dan (c) menciptakan ekonomi makro yang tidak stabil

## V. KESENJANGAN SOSIAL

Ditilik berdasarkan berbagai indikator, terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dan orang-orang kota.

Bahkan untuk beberapa variabel atau indikator, sekalipun skor kesejahteraan mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf lebih besar di kota daripada di desa. Keadaan bayi dan anak-anak balita di kota lebih baik daripada teman-teman mereka yang tinggal di desa. Kelayakanrumah orang-orang kota jauh lebih baik daripada rumah orang-orang desa. Indeks mutu hidup orang-orang kota jauh lebih baik daripada orang-orang desa. Semua ini cukup untuk memberikan bukti bahwa betapa masih memprihatinkan kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan masyarakat kota.

Ketidakmerataan atau ketimpangan atau kesenjangan dapat diukur dengan berbagai variabel serta dalam berbagai dimensi tetapi agaknya merupakan fenomena atau produk sampingan yang tak terelakkan dalam pembangunan jangka panjang. Ketimpangan-ketimpangan yang ada bersifat majemuk dan berskala nasional. Kendati sejak Pelita III aspek pemerataan menempati urutan sekaligus prioritas pertama, namun dalam pelaksanaannya hal itu tampaknya tidak sepenuhnya ditepati. Tekanan pembangunan sejak Pelita III (sebagaimana tercermin dari berbagai program atau proyek semisal pembangunan besar-besaran SD Inpres, Pasar Inpres, Puskesmas dan berbagai sarana publik lainnya) sesungguhnya lebih tertuju pada upaya-upaya pengurangan kemiskinan, bukan upaya pemerataan**.** Pengurangan kemiskinan memang perlu. Kemiskinan, sampai kadar tertentu, memang bertalian dengan ketimpangan. Akan tetapi pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan.

Sebagai suatu bangsa kita bukan hanya ingin hidup lebih makmur (tidak miskin) tetapi juga mendambakan kebersamaan dalam kemakmuran; kesejahteraan bersama yang relatif setara, tanpa perbedaan mencolok satu sama lain.

Kesejahteraan atau keadaan tidak miskin merupakan keinginan lahiriah setiap orang . Keadaan semacam itu, akan tetapi, barulah sekedar memenuhi kepuasan hidup manusia sebagai makhluk individu. Padahal disamping itu sebagai makhluk sosial.

Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang dalam kapasitas sebagai makhuk sosial manusia membutuhkan ”kebersamaan” dengan manusia-manusia lain di dalam masyarakatnya. Kesetaraan kemakmuran, dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok, merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan

tenang, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran. Pengurangan ketimpangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan

# BAB VI

# PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT

## I. PENGERTIAN KONSUMSI

Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Sedangkan apabila bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan, lazim dilambangkan dengan huruf *S (Saving)Di lain pihak jika tabungan semua orang di sebuah negara dijumlahkan, hasilnya adalah tabungan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional yang merupakan sumber dana investasi.*

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan variabel makroekonomi. Dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini lazim dilambangkan dengan huruf C, inisial dari kata *Consumption.*

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makroagregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Artinya, semakin besar pendapatan, maka semakin pula pengeluaran konsumsi. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut hasrat marjinal untuk berkonsumsi atau *MPC* (*marginal propensity to consume)* Sedangkan nisbah besarnya tambahan tabungan terhadap tambahan pendapatan dinamakan hasrat marjinal untuk menabung atau *MPS.* (*marginal propensity to save).* Pada masyarakat yang kehidupan ekonominya relatif belum mapan,

biasanya angka *MPC* mereka relatif besar, sementara angka *MPS* mereka relatif kecil. Hal ini mempunyai arti bahwa jika mereka memperoleh tambahan pendapatan, maka sebagian besar tambahan pendapatan itu akan teralokasikan untuk konsumsi.

Perbedaan antara masyarakat yang sudah mapan dan yang belum mapan – antara negara maju dan negara berkembang – bukan hanya terletak dalam atau dicerminkan oleh perbandingan relatif besar kecilnya angka *MPC dan MPS*, akan tetapi juga dalam pola konsumsi itu sendiri. Pola konsumsi masyarakat yang belum mapan biasanya lebih didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang sudah mapan cenderung lebih banyak teralokasikan ke kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier.

## II. PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT

Dalam perbandingan relatif terhadap pendapatan nasional, proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat makin lama makin menurun. Pada tahun 1970, hampir 80 % penggunaan produk domistik bruto teralokasikan untuk pengeluaran konsumsi masyarakat. Sepuluh tahun kemudian proporsi itu berkurang menjadi hanya sekitar 60 %. Sekarang proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam penggunaan produk domestik bruto tinggal berkisar pada angka 50 persen. Penurunan porsi relatif pengeluaran konsumsi masyarakat mengisyaratkan bahwa alokasi produk domestik kini semakin terarah kepada penggunaan yang lebih produktif. Alokasi PDB dewasa ini semakin besar tergunakan untuk keperluan pembentukan modal atau investasi serta ekspor serta impor. Kenyataan ini tentu menggembirakan karena menandakan pula secara umum pendapatan masyarakat sudah mencukupi kebutuhan konsumsinya, sehingga terdapat kelebihan yang bisa ditabung untuk menjadi sumber dana investasi. Adalah beralasan untuk menyatakan

bahwa harapan untuk menumbuhkan perekonomian cukup prospektif. Persoalannya kemudian ialah seberapa besar tabungan masyarakat kita telah mencukupi sasaran pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia rata-rata 6,5 persen pertahun selama dasawarsa 1970-an. Angka ini satu persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat Malaysia untuk kurun waktu yang sama. Akan tetapi, lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata tahunan pengeluaran konsumsi masyarakat India dan Republik Rakyat Cina, masing-masing 2,9 dan 4,9 persen; bahkan juga dibandingkan pertumbuhan konsumsi masyarakat Amerika Serikat (3,1%) dan Jepang (4,7 %). Dalam periode 1980-1993, pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia tumbuh setingkat rata-rata 4,4 persen per tahun, lebih rendah daripada India (4,7 %) dan Cina (7,9 %) serta Malaysia (5,5 %); namun masih lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang. Angka-angka perbandingan ini beralasan untuk menjelaskan bahwa, sebagai negara berkembang Indonesia memiliki bekal kemandirian yang cukup mantap dalam menumbuhkan perekonomiannya. Hasil-hasil pembangunannya selama ini teralokasikan ke penggunaan yang lebih produktif.

Penurunan proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam membentuk permintaan agregat menyiratkan dua hal antara lain: Pertama, peran tabungan masyarakat terhadap pendapatan nasional semakin besar. Kedua, peran sektor-sektor penggunaan lain dalam membentuk permintaan agregat semakin besar, khususnya sektor pembentukan modal atau investasi dan sektor impor.

## III. POLA KONSUMSI MASYARAKAT

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaanya. Untuk keperluan analisis, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi

masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok pengggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan.

Perbandingan besar pengeluaran per kapita penduduk perkotaan terhadap penduduk perdesaan cenderung konstan tahun demi tahun. Pengeluaran rata-rata orang kota hampir selalu dua kali lipat pengeluaran orang desa. Perbandingan pola pengeluarannya juga demikian. Alokasi pengeluaran untuk makanan dikalangan orang desa lebih besar dibandingkan di kalangan orang kota. Sedangkan alokasi pengeluaran untuk makanan di kedua kelompok penduduk ini sama-sama berkurang. Disamping itu semua, kenaikan pengeluaran orang kota sedikit lebih cepat/ tinggi dibandingkan kenaikan pengeluaran orang desa.

## IV. DIMENSI KETIMPANGAN PENGELUARAN KONSUMSI

Sebagaimana perilaku dan pola pengeluaran konsumsi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melihat ketimpangan kemakmuran . Melalui perbandingan perilaku dan pola konsumsi, telah ditemukan adanya kesenjangan antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat pula difungsikan untuk mendeteksi ketimpangan kemakmuran antarlapisan masyarakat, karena untuk mengetahui kesenjangan kemakmuran dapat diukur dengan pendekatan pendapatan maupun dengan pendekatanpengeluaran.

Ditelaah berdasarkan perbandingan kontribusi pengeluaran antarlapisan masyarakat, distribusi kemakmuran penduduk perdesaan relatif lebih baik dibandingkan distribusi kemamuran penduduk perkotaan. Kontribusi pengeluaran dari 10% penduduk berpengeluaran terendah di daerah perdesaan masih lebih tinggi daripada lapisan penduduk yang sama di daerah perkotaan.

Disamping berdimensi spasial atau antardaerah yakni antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan, perbedaan atau ketimpangan pengeluaran

konsumsi masyarakat juga terjadi dalam dimensi antarlapisan pengeluaran itu sendiri. Juga terdapat diskrepansi pengeluaran konsumsi yang berdimensi regional atau antarwilayah, yakni antara propinsi yang satu dan propinsi lain di tanah air.

## V. TABUNGAN MASYARAKAT

Tabungan adalah bagian dari"pendapatan dapat dibelanjakan" (*disposable income)* yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi yang disebut juga sebagai tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua tabungan ini membentuk tabungan nasional, merupakan sumber dana investasi.

Kendati pada dasarnya semua sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi adalah "tabungan", namun tidak seluruhnya merupakan tabungan sebagaimana yang dikonsepkan dalam makroekonomi. Hanya bagian yang dititipkan pada lembaga perbankan sajalah yang dapat dinyatakan sebagai tabungan, karena secara makro dapat disalurkan sebagai dana investasi.

Sisa pendapatan tidak dikonsumsi yang disimpan sendiri (istilah celengan) tidak tergolong sebagai tabungan. Oleh karenanya sangat sukar untuk mendapatkan data sesungguhnya perihal tabungan masyarakat di sebuah negara. Kita mungkin bisa menaksirnya dengan cara mengurangi pendapatan per kapita dengan pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita (*over-estimate)* karena, khususnya bagi negara-negara yang masyarakatnya kurang terbudaya berhubungan dengan lembaga perbankan, tidak semua sisa pendapatan tadi benar-benar ditabung. Sebagian, boleh jadi sebagian besar, justru disimpan sendiri dalam bentuk "tabungan tradisional" sehingga kurang produktif.

# BAB VII

# UANG

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.

Pada awalnya di Indonesia, uang - dalam hal ini uang kartal - diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi.

Sejarah

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannnya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari

buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya mengahadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhui seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya.

Akibatnya muncullah sistem'barter'yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar.

Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (generally accepted) benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang: orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam.

Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti kerang ini, pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan (*transportation*) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam.

Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah *uang kertas* Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

## I. FUNGSI

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

### Fungsi asli

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

- Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
- Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukan nilai berbagai macam barang/jasa yang

diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

- Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

**Fungsi Turunan**

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain:

- Uang sebagai alat pembayaran yang sah

  Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.
- Uang sebagai alat pembayaran utang

  Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
- Uang sebagai alat penimbun kekayaan

  Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang.
- Uang sebagai alat pemindah kekayaan

Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.

- Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

  Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

**II. SYARAT-SYARAT**

Suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau —setidaknya— dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Uang juga harus mudah dibawa, *portable*, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

**III. JENIS**

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Jenis-jenis uang

**Uang rupiah**

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

Menurut bahan pembuatannya

Dinar dan Dirham, dua contoh mata uang logam.

Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas.

- Uang logam

  Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai:

  1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.
  2. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
  3. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).

Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya; semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi

nilainya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut.

- Uang kertas

  Sementara itu, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

  Menurut nilainya

  Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh (*full bodied money*) dan uang tanda (*token money*)

- Uang Penuh (*full bodied money*)

  Nilai uang dikatakan sebagai *uang penuh* apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.

- Uang Tanda (*token money*)

  Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera diatas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00.

## IV. TEORI NILAI UANG

Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonom, karena tinggi atau

rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis.

## V. TEORI UANG STATIS

Teori Uang Statis atau disebut juga "teori kualitatif statis" bertujuan untuk menjawab pertanyaan: apakah sebenarnya uang? Dan mengapa uang itu ada harganya? Mengapa uang itu sampai beredar? Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah:

- Teori Metalisme (Intrinsik) oleh KMAPP

  Uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Contoh: uang emas dan uang perak.
- Teori Konvensi (Perjanjian) oleh Devanzati dan Montanari

  Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran.
- Teori Nominalisme

  Uang diterima berdasarkan nilai daya belinya.
- Teori Negara

  Asal mula uang karena negara, apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan.

  Teori uang dinamis

  Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis antara lain:
- Teori Kuantitas dari David Ricardo

Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya.

- Teori Kuantitas dari Irving Fisher

  Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang memengaruhi nilai uang.

- Teori Persediaan Kas

  Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang.

- Teori Ongkos Produksi

  Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang.

## VI. UANG DALAM EKONOMI

Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Monetarisme adalah sebuah teori ekonomi yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Sebelum tahun 80-an, masalah stabilitas permintaan uang menjadi bahasan utama karya-karya Milton Friedman, Anna Schwartz, David Laidler, dan lainnya.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang, inflasi, dan bunga yang kemudian akan memengaruhi output dan ketenagakerjaan. Inflasi adalah turunnya nilai sebuah mata uang dalam jangka waktu tertentu dan dapat menyebabkan bertambahnya persediaan uang secara berlebihan. *Interest rate*, biaya yang timbul ketika meminjam uang, adalah salah satu alat penting untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral seringkali diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol persediaan uang, *interest rate*, dan perbankan.

Krisis moneter dapat menyebabkan efek yang besar terhadap perekonomian, terutama jika krisis tersebut menyebabkan kegagalan moneter dan turunnya nilai mata uang secara berlebihan yang menyebabkan orang lebih memilih barter sebagai cara bertransaksi. Ini pernah terjadi di Rusia, sebagai contoh, pada masa keruntuhan Uni Soviet.

# BAB VIII

# INVESTASI

## I. PENGERTIAN INVESTASI

Pada hakekatnya penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Demikian pula halnya Indonesia.

Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang No.1/Tahun 1967 jo Undang-Undang No.11 /Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.6/Tahun 1968 jo Undang-Undang No.12/Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menysyl tampilnya rejim orde baru memegang tampuk pemerintahan. Sebelumnya, dalam pemerintahan orde lama, Indonesia sempat menentang kehadiran investasi dari luar negeri. Ketika itu tertanam keyakinan bahwa modal asing hanya akan menggerogoti kedaulatan negara.

Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-hentinya dilakukan pemerintah, terutama sejak awal Pelita IV atau tepatnya tahun 1984. Melalui berbagai paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan penyederhanaan mekanisme perijinan, penyederhanaan tata cara impor barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi, serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu. Dewasa ini kesempatan berinvestasi di Indonesia semakin terbuka, terutama bagi penanam modal asing. Di samping dalam

rangka menarik investasi langsung, keterbukaan ini sejalan pula dengan era perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020 kelak.

## II. PERKEMBANGAN DAN SASARAN UMUMINVESTASI

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang PMA dan Undang - Undang PMDN, investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan.

Kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan masyarakat atau sektor swasta, baik PMDN maupun PMA, namun juga penanaman modal oleh pemerintah, hal ini berarti terjadi pembentukan modal domistik bruto meningkat dari tahun ke tahun.

Penanaman modal oleh dunia usaha meningkat pesat terutama dalam dasawarsa 1980-an sesudah pemerintah meluncurkan sejumlah paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Dalam dasawarsa 1970-an bagian terbesar dari penanaman modal dalam negeri berasal dari dari sektor pemerintah. Keadaan tersebut sekarang telah berbalik. Selama paruh pertama dasawarsa 1990-an sebagian besar investasi domestik berasal dari dunia usaha dan masyarakat. Investasi oleh pemerintah sendiri juga tetap bertambah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana serta pelayanan dasar lainnya.

Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tertanam di sektor sekunder atau sektor industri pengolahan (*manufacturing)*, baik PMDN maupun PMA yang berdasarkan jumlah proyek maupun nilai investasinya. Dalam hal ini diukur menurut nilai persetujuan investasi, subsektor industri kimia menempati urutan teratas, baik untuk PMDN maupun untuk PMA. Subsektor tekstil lebih diminati oleh investor dalam negeri. Sedangkan

investor luar negeri lebih meminati subsektor perhotelan dan restoran. Urutan terbawah diduduki oleh sektor perdagangan (PMDN) dan subsektor tanaman pangan (PMA) Subsektor yang tidak menarik bagi investor baik PMA maupun PMDN adalah industri farmasi.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mencerahkan iklim investasinya dimasa datang, baik secara internal di dalam negeri sendiri maupun secara eksternal dari negara lain.

**Di dalam negeri (internal), tantangan itu antara lain**:

1. masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian yang berupa barang-barang publik. Sementara keuangan pemerintah justru harus dikelola lebih efisien, kalangan swasta biasanya enggan atau tidak tertarik untuk menanam modal bagi penyediaan barang publik.
2. rendahnya produktivitas pekerja dan efisiensi produksi, kelangkaan tenaga kerja terampil.
3. kurang terjaminnya kepastian hukum bagi investor.

**Sedangkan tantangan ekternal antara lain:**

1. persaingan iklim investasi dengan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, terutama Cina, Vietnam, Tailand, dan India.
2. Berdampingan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, tentu saja terdapat berbagai **peluang yang kita miliki antara lain:**
   a. kemantapan situasi politik di tanah air
   b. perkembangan mengesankan dalam kualitas sumberdaya manusia.
   c. keterbukaan perekonomian kita
   d. keberhasilan pembangunan selama ini yang tentu saja merupakan kredibilitas tersendiri.

## III. KETIMPANGAN INVESTASI

Situasi penanaman modal di tanah air, sebagaimana halnya keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, tak luput dari gejala ketidakmerataan. Ketimpangan investasi terjadi secara sektoral dan secara regional. Dilihat secara sektoral, sebagian besar modal yang ditanam baik modal dalam negeri maupun modal asing tertumpuk disektor industri pengolahan. Apabila dirinci lebih spesifik, serta diperingkat menurut proporsi nilai investasi, maka subsektor industri kimia merupakan pilihan utama baik bagi pemodal dalam negeri maupun investor asing.

Ketimpangan sektoral investasi tak pelak merupakan salah satu sumber ketimpangan pertumbuhan antarsektor. Oleh karenannya mudah dipahami mengapa sektor industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Dominasi investasi yang sangat mencolok di sektor industri pengolahan telah memacu pertumbuhan sektor dengan sangat cepat. Kontribusinya dalam pembentukan produk domestik bruto meningkat luar biasa, dari hanya 8,3% pada tahun 1969 menjadi 21,1% pada tahun 1993 menurut perhitungan harga konstan

Ketimbangan-ketimpangan penanaman modal, apakah sektoral ataupun regional, tentu saja tak layak dibiarkan berlarut-larut. Harus ada upaya penyebaran distribusinya ke sektor-sektor di luar industripengolahan dan ke daerah-daerah luar Jawa. Sektor-sektor lain perlu ditanami modal secara signifikan agar bisa mengimbangi pertumbuhan sektor industri pengolahan. Daerah-daerah di luar Jawa perlu disiapkan untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Berbagai kebijaksanaan formal yang selama ini telah digulirkan untuk maksud tersebut, agaknya masih belum memadai. Pemerintah perlu memancingnya dengan tindakan nyata agar para calon investor tertarik untuk lebih menyebarkan penanaman modalnya, tidak hanya tertumpu pada

sektor industri pengolahan, tidak selalu terpusat dipulau Jawa. Dalam hal ini, penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor kunci strategis.

## IV. KESENJANGAN REALISASI INVESTASI

Masalah yang timbul dalam percaturan invesatsi swasta di tanah air bukan semata-mata persoalan ketimpangan sektoral dan regional. Akan tetapi juga masalah kesenjangan antara rencana dengan relaisasi investasinya. Data-data mengenai perkembangan investasi yang mengesankan sebagaimana dipaparkan di depan, harus dicerna secara hati-hati dan arif. Data-data itu barulah sekedar informasi tentang rencana investasi yang permohonannya disetujui, belum menggambarkan realisasi investasinya sendiri. Dalam kenyataan, tidak semua rencana investasi yang sudah disetujui itu akhirnya benar-benar direalisasi oleh sang investor pemohon.

Banyak faktor yang bisa dikemukakan untuk menjelaskan sebab-sebab rendahnya tingkat realisasi investasi swasta antara lain:

**Faktor subjektif - internal** artinya berkaitan dengan situasi perekonomian di dalam negeri Indonesia sendiri, termasuk keadaan calon investor. Misalnya adalah gejala ekonomi biaya tinggi di tanah air, sehingga mengurungkan niat investor untuk merealisasi rencana investasinya. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, sebelum diluncurkannya berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, prosedur perijinan penanaman modal di Indonesia sangat tidak efisien. Disamping menelan waktu lama, juga memakan biaya besar.

Acapkali calon investor harus mengeluarkan ongkos ekstra yang tidak sedikit akibat semua itu. Penyebab lain ialah rendahnya kapasitas si calon investor. Kemampuan modal sendirinya kurang memadai bagi investor yang direncanakan, sehingga struktur modal investasinya terlalu didominasi oleh dana pinjaman. Dalam situasi demikian, apabila hasil (*return)* yang diharapkan

tidak lebih besar daripada biaya modal, ia akan cenderung membatalkan niat investasinya.

**Faktor objektif-ekternal** dapat berupa lebih menariknya investasi di luar negeri daripada di dalam negeri. Baik karena hasil-balik yang lebih besar di luar negeri, ataupun karena fasilitas atau kemudahan berinvestasi di sana, atau karena kemudahan dan kemurahan sumberdaya di negara lain (misalnya bahan baku dan tenaga kerja). Diharapkan pada situasi semacam itu, seorang calon investor akan cenderung mengalihkan rencana investasinya dari Indonesia ke negeri lain, bahkan investor domestik sekalipun. Sekalipun demikian memang nyata kita hadapi selama beberapa tahun terakhir. Persaingan dalam menarik investasi asing kian tajam, terutama dari negara-negara seperti Cina, Vietnam dan India, serta negara-negara ”baru” pecahan Uni Soviet di Eropa.

## V. KEBIJAKSANAAN INVESTASI

Pada saat orde lama Indonesia pernah menentang masuknya modal asing, khususnya modal dari negara-negara barat. Bahkan bukan hanya modal, tetapi juga menyangkut tentang produk luar negeri, bahkan juga antimusik barat.

Setelah ada pergantian pemerintahan orde baru maka diterbitkan undang-undang berkenaan dengan investasi, yaitu undang-undang No.1 / Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang No. 6 / Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pemerintah sengaja lebih dahulu membuat undang-undang tentang modal asing dengan persyaratan yang amat ringan, mengingat pada saat itu investasi diperlukan sekali untuk membantu memulihkan perekonomian dalam negeri yang porak peranda. Dalam UU No. 1 / Tahun 1967 antara lain ditetapkan:

- Penanaman modal dibebaskan dari pajak deviden serta pajak perusahaan selama lima tahun; keringanan pajak perusahaan pajak perusahaan PMA

sebesar lebih dari 50% selama lima tahun; ijin untuk menutup kerugian-kerugian perusahaan sampai periode sesudah *tax holidy* itu; dan pembebasan penanaman modal asing dari bea impor atas mesin serta perlengkapan dan bahan baku.

- Jaminan tidak akan dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan asing dan walaupun dinasionalisasi akan diganti rugi.
- Masa operasional PMA adalah 30 tahun dengan perpanjangannya tergantung pada hasil perundingan ulang.
- Keleluasaan bagi penanam modal asing untuk membawa serta atau memilih personil manajemennya dan untuk menggunakan tenaga ahli asing bagi pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa ditangani oleh tenaga-tenaga Indonesia.
- Kebebasan untuk mentransfer dalam bentuk uang semula (valuta asing) keuntungan dan dana penyusutan yang diperoleh dari penjualan saham yang disediakan bagi orang-orang Indonesia.
- Sektor-sektor atau bidang usaha dinyatakan tertutup bagi modal asing, yaitu meliputi pekerjaan umum (seperti pelabuhan dan pembangkit tenaga listik); media masa; pengangkutan (pelayaran dan penerbangan); prasarana; serta segala industri yang berhubungan dengan kegiatan produksi untuk keperluan pertahanan negara.

## VI. BKPM DANPERATURAN INVESTASI

Pemerintah dalam mengatur serta menangani perihal investasi memberlakukan UU No.1/Tahun 1967, dalam sebuah Keputusan Presidium Kabinet No.17/EK/I/1967 tanggal 19 Januari 1967, yaitu membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Petimbangan Penanaman Modal, lima tahun kemudian, dengan keputusan Presiden No.10/1973 tertanggal 26 Mei 1973,

organisasi tersebut diganti dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada tahun-tahun awal perjalanan tugasnya, BKPM banyak dikeluhkan oleh para penanam modal baik asing maupun domestik. Keluhan pada umumnya berkisar masalah terlalu berbelit-belitnya prosedur investasi yang harus ditempuh sehingga membuat mereka menjadi tidak tertarik. Prosedur demikian itu juga telah menyebabkan suburnya penyalahgunaan wewenang di berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan urusan penanaman modal.

Kemudian setelah menghadapi permasalahan tersebut maka pemerintah pada tangga l3 Oktober 1977 mengeluarkan keputusan yang memberikan wewenang penuh dan tunggal kepada BKPM untuk mengurusi penanaman modal. Dengan demikian BKPM bertanggung jawab penuh menangani investasi. Kedudukannya langsung dibawah presiden, tidak lagi sebagai sebuah lembaga yang sekedar melayani departemen dan instansi pemerintah lain.

Pemantapan institusional dalam rangka merangsang penanaman modal diiringi dengan berbagai ketentuan di bidang peraturan dan perundang-undangan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan investasi pada umumnya berkisar dimasalah pengaturan penguasaan saham; prosedur perijinan; penggunaan tenaga kerja; kaitan dengan upaya peningkatan ekspor; keringanan pajak; serta ketentuan mengenai sektor atau bidang usaha yang boleh (masih terbuka) dan tidak boleh (sudah tertutup) untuk dimasuki oleh investasi baru yang pengumumannya diberi nama Daftar Skala Prioritas (DSP) atau Daftar Negatif Investasi (DNI)

# BAB IX

# PENGELUARAN PEMERINTAH

## 1. PENGERTIAN PENGALUARAN PEMERINTAH

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasioanal dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y=C+I+G+X-M. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasioanal. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government expenditures)* Dengan membandingkan nilai G terhadap Y – serta mengamatinya dari waktu ke waktu – dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Pemerintah – tentu saja – tidak hanya melakukan pengeluaran, akan tetapi juga beroleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah diliput dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara) disebut kebijaksanaan fiskal.

### 8.1. Intervensi dan Fungsi Ekonomi Pemerintah.

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis (meskipun hal ini sangat sering dilakukan, terutama oleh pemerintah di negara-negara sedang berkembang), melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis dan

menjalankan kegiatan ekonomi dimana masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya.

Dalam kasus lain, pemerintah memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu, menurut penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai pengeluaran, bahkan dalam jumlah besar.

Di negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan dalam percaturan ekonomi negerinya berperan semata-mata hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicegah. Tidak ada satu perekonomian pun, termasuk di negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya, namun perbedaan kadarnya. Di beberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, sementara di negara-negara lain campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.

Dalam perekonomian moderen, peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu:

1. Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran distrubutif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilisatif yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.
4. Peran dinamisatif yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.

**8.1. Peran Alokatif Pemerintah**

Setiap orang atau masyarakat dalam kehidupan ekonomi selalu mempunyai preferensi tertentu terhadap barang-barang dan jasa yang ingin dikonsumsi atau hendak diproduksinya. Barang ekonomi, berdasarkan peruntukannya, dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang sosial. Barang pribadi ialah barang yang dapat dimiliki atau untuk dinikmati secara pribadi, oleh perorangan atau kelompok orang, mempunyai harga yang jelas dan diperoleh melalui proses transaksi jual beli.

Sedangkan barang sosial ialah barang yang tidak dapat dimiliki oleh pribadi dan tidak dapat dinikmati secara pribadi. Contoh barang atau jasa sosial misalnya jalan umum, jembatan, pertahanan, dan keamanan negeri.Barang semacam ini tidak menarik bagi masyarakat atau kalangan swasta untuk memproduksi atau menyediakannya karena tidak bisa dijual. Mengapa tidak bisa dijual, karena tidak bisa dimiliki atau dinikmati secara pribadi.

Adanya barang sosial mencerminkan bahwa mekanisme pasar telah gagal menyediakan barang-barang tersebut. Pihak swasta enggan memproduksinya disebabkan karena tidak bisa dijual ataupun karena investasi awalnya sangat besar. Pemerintah dalam hal ini harus turun tangan untuk menyediakan atau memulainya. Cara yang ditempuh untuk pengadaannya bisa bermacam-macam. Bisa ditangani sendiri oleh pemerintah melalui instansi teknis pemerintahan seperti departemen atau lembaga non departemen atau melalui perusahaan negara. Ataupun pengadaannya dipercayakan kepada perusahaan swasta, namun biasanya pemerintah harus memberi subsidi. Barang-barang sosial begitu tersedia, pada umumnya dapat dinikmati oleh setiap orang secara cuma-cuma tanpa harus membayar. Pemerintah sendiri selaku pemasok juga tidak dapat

menjualnya, akan tetapi dalam hal ini pemerintah hanya bisa memungut retribusi atau iuran kepada yang menggunakan atau menikmati

Dalam kegiatan ekonomi seringkali timbul akibat-akibat sampingan yang dirasakan oleh masyarakat. Akibat sampingan (*side effects)* bisa positif , sehingga turut dinikmati oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam pengadaannya; atau bersifat negatif sehingga secara tak sengaja terpaksa harus ditanggung oleh masyarakat. Akibat-akibat sampingan (dampak positif dan dampak negatif) dikenal dengan istilah eksternalitas. Untuk dampak yang positif, biasanya tidak masalah. Akan tetapi tidak begitu halnya dengan dampak yang negatif. Masyarakat, walaupun tidak mau berkorban secara pribadi untuk melanggulangi, cenderung akan mengeluhkannya. Dalam kasus seperti ini pemerintah harus turun tangan mengatasi.

Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur tangan dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peruntukan dan mengatur penggunaan sumber daya-sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tetapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, karena pemerintah bertindak pula selaku pelopor dan pengendali pembangunan.

## II. PERAN DISTRIBUTIF PEMERINTAH

Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi setiap negeri acapkali tidak setara; baik diantara lapisan-lapisan masyarakat, diantara wilayah-wilayah negara yang bersangkutan, maupun diantara sektor-sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil-

hasilnya. Tanpa kesenjangan ”anugerah awal” pun (*initial endowment,* maksudnya kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan*)* ketimpangan penikmatan atau pembagian hasil dapat terjadi. Konon lagi apabila kesenjangan sudah bermula sejak awal. Oleh karenanya ketidakmerataan, dalam bentuk apapun, haruslah dikurangi. Alasannya bukan semata-mata karena ketidakmerataan bersifat tidak manusiawi, tetapi juga - dan bahkan jauh labih penting lagi – karena hal itu secara ekonomi tidak produktif.

Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir ”pihak”(lapisan masyarakat, wilayah, sektor)tertentu. Daya tawar (*bargaining position)* antar pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Dalam hal konsentrasi kekuatan dan kekuasaan berdimensi antarlapisan masyarakat, segmen-segmen tertentu dalam perekonomian akan mengarah ke struktur pasar yang oligopolistik dan bahkan monopolistik. Efisiensi produksi menjadi semu, begitu pula optimalitas alokasi sumber daya. Mengapa demikian? Karena tingginya produktivitas dan harga barang-barang bukan terbentuk oleh proses mekanisme pasar (kekuatan tarik menarik antara penawaran dan permintaan) yang seimbang, melainkan lebih karena ekonomi biaya tinggi akibat kewenang-wenangan pihak yang menggenggam kekuatan dan kekuasaan ekonomi.

# BAB X

# PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL

## I. PENGERTIAN PERDAGANGAN

Perdagangan dalam ilmu ekonomi berarti proses tukar-menukar yang terjadi atas keinginan bersama. Sedangkan internasional berarti antarbangsa. Dengan demikian bahwa perdagangan internasional mempunyai arti sebagai proses tukar-menukar yang terjadi antarbangsa

Sedangkan penyebab terjadinya proses tukar-menukar karena beberapa faktor antara lain:

1. perbedaan sumber daya alam
2. perbedaan selera
3. perbedaan iklim
4. perbedaan pendapatan
5. perbedaan sosial
6. perbedaan kebudayaan
7. adanya komunikasi dan sarana transportasi

Setiap bangsa ingin menegakkan rumah tangganya. Untuk mengatasi hal itu pemerintah suatu negara mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu, khususnya dalam bidang perdagangan. Suatu negara dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya melakukan kerjasama ekonomi antarbangsa. Hal ini merupakan upaya saling memenuhi kebutuhan sehingga timbul bermacam-macam perdagangan internasional.

Perdagangan internasional membawa akibat berikut:

a. tiap-tiap negara berusaha memperoleh keuntungan.
b. dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

c. Terjadinya arus ekspor dan impor yang dapat menambah pendapatan negara, eksportir maupun importir akan membayar bea sehingga merupakan pendapatan bagi suatu negara.

Macam-macam perdagangan internasional

a. ***Perdagangan bilateral***

Perdagangan bilateral yaitu terjalinnya perdagangan antar dua negara.

Contoh: Perdagangan antar Indonesia dengan Birma

**b.** ***Perdagangan regional***

Perdagangan regional merupakan perdagangan yang terjadi dalam satu kawasan

Contoh: Perdagangan yang terjadi pada MEE, dan ASEAN.

**c.** ***Perdagangan multilateral***

Perdagangan multilateral yaitu perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara

## II. PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL

Perkembangan atau pertumbuhan ekspor dari suatu negara sangat berpengaruh terhadap defisit atau surplus neraca pembayaran (*balance of payment)* jumlah utang luar negeri dan besarnya cadangan devisa. Hal ini terbukti di banyak negara berkembang, termasuk juga Indonesia, khususnya selama krisis ekonomi, dimana lesunya ekspor nasional mempunyai andil yang besar terhadap jumlah utang luar negeri dan semakin kecilnya jumlah cadangan valuta asing (valas) yang ada di Bank Indonesia. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan untuk keluar dari krisis ekonomi secepatnya adalah dengan cara menggenjot ekspor sekuat-kuatnya.

Bagi negara-negara berkembang, perkembangan dan pertumbuhan volume atau nilai ekspor sangat penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di dalam negeri. Pertumbuhan ekspor apabila lebih besar daripada

pertumbuhan impor dengan sendirinya akan menambah pemasukan devisa. Sebuah negara berkembang seperti Indonesia yang masih sangat tergantung pada inpor dan masih sangat membutuhkan modal dari luar negeri (termasuk pinjaman) karena tabungan nasional belum bisa diandalkan, tentu sanagat membutuhkan banyak devisa.

Mungkin sudah merupakan salah satu karakteristik penting dari negara sedang berkembang, terutama negara-negara yang tingkat pembangunan ekonomi atau sektor industrinya masih pada taraf awal (*early state of development)*, bahwa jumlah atau laju perkembangan ekspor nonmigas lebih rendah daripada jumlah atau laju pertumbuhan impor nonmigasnya sehingga selalu mengalami defisit neraca perdagangan yang besar. Sementara arus modal masuk, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) relatif kecil. Bahkan banyak negara berkembang yang secara neto neraca modalnya juga selalu negatif. Akibatnya banyak negara berkembang yang mengalami defisit neraca pembayaran terjerumus ke dalam masalah utang luar negeri yang besar.

Akibat krisis ekonomi, jumlah utang luar negeri Indonesia membengkak secara drastis, terutama karena masuknya pinjaman-pinjaman baru dari IMF dan Bank Dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor nonmigas yang selama ini sangat diharapkan sebagai sumber utama devisa negara, ternyata tidak berkembang pesat seperti yang diprediksi oleh teori mengenai dampak positif dari depresiasi nilai tukar mata uang terhadap peningkatan ekspor.

## III. TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

a. Teori Klasik

Teori keunggulan absolut (*absolute adventage)* dari Adam Smith sering disebut sebagai teori murni perdagangan Internasional. Dalam teori ini nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan untuk membuat barang tersebut. Dengan perkataan lain teori ini menggunakan teori nilai tenaga kerja . Dengan asumsi bahwa tenaga kerja sifatnya homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi, menurut teori ini dalam membuat produk X negara A akan lebih efisien daripada negara B yang juga membuat barang yang sama apabila negara pertama jumlah tenaga kerja yang dipergunakan lebih sedikit daripada negara kedua. Artinya, negara A memiliki keunggulan absolut dibanding negara B dalam membuat produk X. Oleh karena itu menurut Adam Smith, negara A sebaiknya melakukan spesialisasi pada produk X, sedangkan negara B pada produk-produk lain di mana negara tersebut secara absolut dapat menghasilkannya dengan ongkos per unit yang lebih rendah daripada negara lain (termasuk negara A)

Suatu negara memiliki keunggulan bisa secara alamiah (*natural advantage)* atau yang dikembangkan (*acquired advantage)*. Keunggulan alamiah yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan sumber daya alam (SDA) dan jumlah tenaga kerja yang berlimpah sehingga upah / gaji per pekerja relatif lebih murah dibanding di negara-negara lain yang jumlah penduduknya (berarti jumlah angkatan / tenaga kerjanya) relatif kecil. Keunggulan alamiah ini sangat mendukung perkembangan ekspor komoditas-komoditas primer Indonesia, seperti minyak dan pertanian, sejak dekade 1960-an hingga 1980-an. Keunggulan yang direkayasa misalnya adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan atau

keterampilan yang tinggi dan masih sangat terbatas di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura dan Taiwan.

Teori keunggulan komparatif *(comparative advantage)* dari J.S Mill menyatakan bahwa suatu negara akan berspesialisasi pada kegiatan mengekspor suatu barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar (suatu barang yang dapat dihasilkan dengan ongkos produksi paling rendah) dan mengimpor barang di mana negara itu memiliki kerugian komparatif (*comparative disadvantage)* (barang yang kalau dibuat sendiri memakan ongkos paling besar)

Teori tersebut diatas sama dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk membuat barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang dipergunakan, dengan upah per orang sudah ditentukan, semakin mahal biaya atau semakin tinggi harga jual barang tersebut

b. Teori Modern

Sebagaimana yang telah dibahas dalam teori klasik tentang perdagangan Internasional memiliki banyak kelemahan, terutama yang berkaitan dengan asumsiasumsinya. Misalnya, salah satu asumsinya adalah bahwa hanya ada satu faktor produksi, yakni tenaga kerja dan faktor produksi homogen. Dalam kenyataan tidak demikian.

Paling tidak ada lima (5) faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja, modal, energi, bahan baku, dan teknologi. Tenaga kerja jelas tidak homogen. Tenaga kerja bisa dibagi ke dalam dua kategori, yakni yang berpendidikan tinggi (*skiled workers)* dan yang berpendidikan rendah (*unskiled workers)* Pembagian ini (melihat faktor produksi tenaga kerja heterogen) ternyata sangat penting dalam membuat analisis-analisis

empiris mengenai perkembangan ekspor suatu negara.Lihat misalnya laju perkembangan dan pertumbuhan volume ekspor barang-barang industri (manufaktur) yang sangat pesat dari negara-negara Asia yang digolongkan sebagai the *newly industrializing countries (NICs)* Negara-negara tersebut memang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat tinggi.

Sedangkan negara-negara di dalam kelompok negara berkembang yang sebagian besar dari jumlah angkatan/tenaga kerjanya masih dari golongan berpendidikan rendah, seperti halnya Indonesia hingga saat ini, memiliki tingkat perkembangan dan laju pertumbuhan volume ekspor manufaktur yang masih relatif rendah. Dengan demikian bahwa ada suatu korelasi positif antara tingkat kemajuan suatu negara dalam ekspor nonmigas (khususnya manufaktur) dan tingkat pendidikan tenaga kerja di negara tersebut.

Di dalam teori keunggulan kopetitif, keunggulan suatu negara di dalam persaingan global selain tergantung pada faktor-faktor keunggulan komparatif (teori klasik) yang dimilikinya dan produksi atau bantuan dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan kompetitif. Dimana keunggulan kompetitif tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, misalnya dalam bentuk kualitas yang tinggi dari SDA yang ada, kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan pengusaha, dan etos kerja masyarakat yang tinggi, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan di dalamnya secara induvidu atau kelompok. Faktor-faktor keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan apabila ingin unggul dalam persaingan pasar dunia adalah terutama tingkat teknologi serta produktivitas yang tinggi dari faktor-faktor produksi yang digunakan di dalam proses produksi, kualitas yang baik dari barang yang dihasilkan, promosi yang meluas, pelayanan teknis maupun nonteknis

yang baik (*service after sale)*, pekerja engan tingkat keterampilan atau pendidikan (SDM) dan etos kerja serta motivasi yang tinggi, adanya skala ekonomi dalam proses produksi, modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup, tingkat kewirausahaan (*entrepreneuship)* yang tinggi, diferensiasi produk, memiliki jaringan distribusi di dalam dan terutama di luar negeri yang luas dan *well-organize, dan* prose produksi yang dilakukan dengan sistem *just-in-time (JIT)*. Faktor-faktor ini semakin penting terutama di pasar internasional dengan persaingan yang semakin tidak sempurna.

## IV. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN NERACA PEMBAYARAN

Di dalam neraca pembayaran (*balance of payments atau BoP)* terdapat neraca perdagangan (*trade balance)* yang berkaitan dengan perdagangan internasional dari negara yang bersangkutan, yakni yang mencatat transaksi ekonomi luar negeri negara tersebut: ekspor dan impor barang (primer dan nonprimer) yang berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu (satu tahun) Sedangkan transaksi berjalan (*current account)* adalah neraca perdagangan ditambah dengan penerimaan neto atas perdagangan jasa dan transfer neto dari luar negeri yang terdiri dari pendapatan bunga dari tabungan atau investasi di luar negeri oleh sektor swasta dan pemerintah (*official transfer)* dan pendapatan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (seperti TKI dalam kasus Indonesia) Apabila ekspor barang lebih besar daripada impor barang, maka saldo neraca perdagangan positif, tetapi belum tentu saldo transaksi berjalan (TB) positif.

Keadaan seperti ini tergantung pada beberapa hal antara lain:

1. Penerimaan atas ekspor atau pemakaian jasa-jasa Indonesia oleh orang asing di dalan negeri (misalnya konsultan nasional, hotel, dan biro perjalanan) maupun di luar negeri (Garuda dengan kantor cabang di

luar negeri) lebih besar daripada pembayaran terhadap pemakaian jasa-jasa asing oleh Indonesia

2. Pembayaran bunga hutang luar negeri Indonesia lebih kecil daripada penerimaan bunga tabungan atau investasi di luar negeri.
3. Pendapatan tenaga kerja Indonesia yang mengalir dari luar negeri lebih besar daripada pendapatan yang dibayar Indonesia terhadap orang-orang asing yang bekerja di dalam negeri.

Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa perkembangan neraca perdagangan dan saldo Transaksi Berjalan (TB) Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dunia atau pertumbuhan pendapatan riil rata-rata perkapita di negara-negara pasar utama ekspor Indonesia dan perubahan ekonomi dalam negeri.

## V. UTANG LUAR NERERI

Sejak krisis utang luar negri dunia yang terjadi pada awal dekade 1980-an masalah utang luar negeri yang dialami oleh banyak negara berkembang tidak semakin baik. Banyak negara berkembang semakin terjerumus kedalam krisis utang sampai terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktur (*structural adjustment)* terhadap ekonomi dalam negeri mereka atas anjuran dari Bank Dunia dan IMF, sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama. Hal ini juga dialami Indonesia sejak munculnya krisis rupiah pada pertengahan tahun 1977 yang kemudian disusul oleh krisis ekonomi.

Walaupun ada kecenderungan bahwa semakin maju perekonomian suatu negara, dilihat misalnya pada tingkat pendapatan riil per kapita yang semakin tinggi atau laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun yang tinggi, semakin kurang ketergantungannya terhadap pinjaman luar negeri, namun banyak kasus, termasuk Indonesia selama ini menunjukkan tidak demikian. Suatu negara yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi atau laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berarti bahwa negara itu dengan sendirinya sudah maju dalam arti *industrialized* dengan struktur ekonomi dan perdagangan luar negeri yang sudah mantap.

Sebagai penyebab besar-kecilnya jumlah utang luar negeri yang dialami oleh banyak negara berkembang antara lain:

1. Defisit transaksi berjalan (TB)
2. Kebutuhan dana untuk investasi yang melebihi jumlah dana yang tersedia (tabungan) di dalam negeri.
3. Inflasi yang tinggi
4. Struktur inefficiencies di dalam perekonomian di negara-negara tersebut.

Defisit transaksi berjalan (TB) mengakibatkan cadangan devisa berkurang. Apabila saldo transaksi berjalan (TB) terus menerus negatif, maka cadangan devisa akan habis, seperti dialami banyak negara sangat miskin di benua Afrika. Negara berkembang sangat membutuhkan devisa, terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa defisit transaksi berjalan (TB) yang berkelanjutan yang dialami oleh banyak negara berkembang hingga sangat ini merupakan penyebab utama negara-negara tersebut terus saja meminjam dari luar negeri, terutama negara-negara yang kondisi ekonomi dalam negerinya tidak menggairahkan investor-investor dari negara-negara maju sehingga sulit bagi negara-negara tersebut untuk mensubstitusi modal dari pinjaman luar negeri dengan modal dari PMA.

Selain itu, defisit transaksi berjalan (TB) yang berkepanjangan yang dibiayai oleh cadangan devisa atau pinjaman luar negeri juga akan mengancam kestabilan perekonomian dan kelanjutan dari proses pembangunan ekonomi negara peminjam. Banyak negara berkembang di Afrika dan Amerika Selatan yang menjadi pengutang-pengutang besar pada

awal dekade 1980-an mengalami stagnasi dalam proses ekonomi mereka> Goerge (1992) mengatakan bahwa utang luar negeri secara pragmatis justru menjadi bumerang bagi negara penerima. Perekonomian negara-negara penerima tidak semakin baik, tetapi semakin hancur. Kemudian Rostow (1985) mengatakan bahwa suatu negara bisa tinggal landas jika tidak lagi tergantung kepada utang luar negeri, hal ini disebabkan karena utang luar negeri merupakan kendala serius bagi banyak negara berkembang untuk bisa masuk dalam tahap *take off (tingal landas)*. Pengamatan ini terjadi selama dekade 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Rostow (1985) berpendapat bahwa banyak negara berkembang yang diperkirakan masuk ke tahap lepas landas justru semakin tergantung dan terjerat utang luar negeri.

# BAB XI

# INFLASI

## I. PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang dihadapi oleh hampir semua perekonomian di dunia, termasuk Indonesia. Mengapa inflasi menjadi suatu masalah? Inflasi merupakan indicator utama adanya ketidakstabilan harga suatu perekonomian. Harga yang stabil akan mampu memberikan jaminan pada investor untuk menanamkan modalnya. Bagi pemerintah, kondisi yang stabil tersebut akan membantu untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan bagi masyarakat umum, kestabilan harga akan membuat masyarakat mampu merencanakan kegiatan konsumsi dan juga kegiatan spekulasi terhadap asset yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat sering mempersepsikan kenaikan harga barang-barang kebutuhan sebagai inflasi, naiknya harga barang-barang akan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian secara keseluruhan dan hal ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat, pengusaha juga pemerintah. Harga di dalam negeri yang stabil akan memberikan kepastian sekaligus jaminan perekonomian yang stabil dan hal ini akan memberikan iklim yang baik terhadap investasi baik yang dilakukan oleh onvestor dalam negeri maupun dari luar negeri

## II. PENGERTIAN DASAR

Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja ( meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:

1. Indeks biaya hidup (comsumer price index)
2. Indeks harga perdagangan besar (wholesale price index)
3. GNP deflator.

Indeks biaya hidup mengukur biaya / pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Banyaknya barang dan jasa yang tercakup dapat bermacam-macam. Di Indonesia dikenal indeks 9 bahan pokok, 62 macam barang serta 162 macam barang. Karena arti penting masing-masing barang dan jasa tersebut bagi seseorang itu tidak sama, maka dalam perhitungan angka indeksnya diberi angka penimang tertentu.

Angka penimbang biasanya didasarkan atas besarnya persentase pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan. Besarnya persentase ini dapat berubah dari tahun ke tahun.

Indeks perdagangan besar menitik beratkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga barang mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga dan sejalan / searah dengan indeks biaya hidup.

GNP deflator adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks di atas, dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila disbanding dengan dua indeks di atas. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan)

$$\text{GNP deflator} = \frac{\text{GNP Nominal}}{\text{GNP riil}} \times 100\%.$$

## III. PENGGOLONGAN INFLASI

Inflasi dapat digolongkan tergantung dari apa tujuan kita untuk membahas inflasi. Penggolongan inflasi yang pertama menurut laju inflasi per tahun. Inflasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ( Boediono, 1982, hal 156):

**1.** Inflasi ringan (dibawah 10 % setahun)

**2.** Inflasi sedang ( antara 10 % - 30 % setahun)

**3.** Inflasi berat ( antara 30 % - 100 % setahun

**4.** Hiperinflasi ( di atas 100 % setahun)

Parah tidaknya inflasi tergantung pada barang apa saja yang mengalami kenaikan harga, dan kelompok masyarakat yang mana yang terkena dampak kenaikan harga tersebut. Jika yang mengalami kenaikan harga adalah barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, baik kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi maupun yang berpendapatan rendah, maka kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah yang paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut. Namun jika yang mengalami kenaikan harga adalah barang-barang mewah yang lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan tinggi, maka sebagian besar masyarakat yang berpendapatan rendah tidak akan merasakan dampak kenaikan harga barang tersebut.

## IV. JENIS INFLASI MENURUT SIFATNYA

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda.

Atas dasar besarnya laju inflasi; dapatlah inflais dibagi ke dalam tiga kategori, yakni: merayap (creeping inflation), inflasi menengah (galloping inflation) serta inflasi tinggi (hyper infltion) Sebenarnya pembagian ke dalam tiga kategori ini tidak ada patokan / standar yang pasti. Biasanya creeping inflation ditandai dengan

laju inflasi yang rendah (kurang dari 10 % per tahun)> kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

Inflasi menengah (galloping inflation) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar ( biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai siat akselerasi. Artinya harga-harga minggu / bulan ini lebih tinggi dari minggu / bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih besar daripada inflasi yang merayap (creeping inflation)

Inflasi tinggi (hyper inflation) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai / ditutup dengan mencetak uang

## V. JENIS INFLASI MENERU SEBABNYA

Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil, perlu terlebih dahulu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi.

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar.

1. Demand – pull inflation.

   Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate demad), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total di samping menaikan harga dapat juga menaikkan hasil produksi (output) Apabila kesempatan kerja penuh (full – employment) telah tercapai;

penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja ( sering disebut dengan inflasi murni)

Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas / melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya “Inflation gap”, hal ini dapat menimbulkan inflasi.

2. Cost-push Inflation

Berbeda dengan demand pull inflation, cost-pust inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Kenaikan biaya produksi dapat timbul karena beberapa factor antara lain:

a. Perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah.
b. Suatu industri yang sifatnya monopolistis, manajer dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga (yang lebih tinggi)
c. Kenaikan harga bahan baku industri. Salah satu contoh yang tidak asing lagi adalah krisis minyak yang terjadi kenaikan harga minyak. Biaya produksi naik, akibatnya timbul stagnasi, yakni inflasi yang disertai dengan stagnasi. Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Kalau proses ini berjalan terus maka timbullah cost pust inflation.

## VI. EFEK INFLASI

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi factor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan: equity effect, sedang efek terhadap alokasi faktor produksi, dan produk nasional masing-masing disebut dengan efficiency dan output effects.

1. Efek terhadap Pendapatan (Equity Effect)

   Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi.

   Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seseorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp 500.000,- pertahun sedang laju inflasi sebesar 10 %, akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp 50.000,-

   Sebaliknya, pihaj-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase lebih besar daripada laju inflasi.

   Adanya serikat buruh yang kuat kadangkala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan persentase lebih besar daripada laju inflasai. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dengan adanya inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain.

2. Efek terhadap Efisiensi (Eficiency Effects)

   Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi factor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai

macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut.

3. Efek terhadap Output (Output Effect)

   Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju ini cukup tinggi (hyper inflation) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output.

   Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

   Intensitas efek inflasi ini berbeda-beda, tergantung apakah inflasi dibarengi dengan kenaikan produksi dan employment atau tidak. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tetapi apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) intensitas efek inflasi makin besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (pure – inflation)

## VII.DAMPAK ADANYA INFLASI

1. Dampak inflasi terhadap perekonomian

Dengan adanya inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif, pada masa inflasi, seseorang akan merasa lebih aman jika menginvestasikan modalnya dalam bentuk pembelian rumah atau barang berharga lain daripada melakukan investasi yang produktif. Kondisi ini tidak akan menaikkan investasi yang akan berdampak terhadap pendapatan nasional.

Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi, dalam kondisi inflasi biasanya pemerintah akan menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Namun kenaikan tingkat bunga tersebut akan menyebabkan investor enggan melakukan investasi karena bunga pinjaman yang harus dibayarkan menjadi lebih tinggi. Pada kondisi ini, investor lebih suka menyimpan dana di Bank dan memperoleh pendapatan dari bunga tabungan.

Menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi dimasa yang akan datang dimana pertumbuhan ekonomi menjadi tidak bisa lagi diramalkan dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian suatu Negara.

Menimbulkan masalah neraca perdagangan, dimana dengan adanya inflasi akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri, karena itu biasanya inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat daripada perkembangan ekspor.

## VIII. DAMPAK INFLASI TERHADAP INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Dengan adanya inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan, karena pada masa inflasi nilai harta-harta tetap seperti tanah atau bangunan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada inflasi, sedangkan masyarakat berpendapatan rendah yang biasanya tidak memiliki harta tetap tersebut akan mengalami kemerosotan nilai pendapatan riilnya. Hal ini akan memperlebar ketidaksamaan distribusi pendapatan.

Jika pendapatan riil merosot sebagian besar tenaga kerja memiliki pendapatan nominal yang nilainya tetap. Dalam masa inflasi kenaikan harga barang-barang akan membuat pendapatan riil masyarakat menjadi turun.

## IX. INFLASI DAN PENGANGGURAN

Pada tahun 1958 AW Phillips seorang profesor di London Schooll of Economics menulis artikel berdasarkan studi lapangan tentang adanya hubungan antara kenaikan tingkat upah dan pengangguran di Inggris pada tahun 1861-1957. Dari hasil studi ini beliau memperoleh hubungan negatif antara persentase perubahan upah dengan pengangguran. Pada saat tingkat pengangguran rendah tingkat upah akan naik dan sebaliknya, pada saat tingkat pengangguran tinggi, kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan turunnya tingkat upah.

Pada waktu pengangguran rendah, perusahaan sulit memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan dan perusahaan menawarkan upah yang lebih tinggi untuk memperoleh tenaga kerja. Jadi upah naik dengan cepatnya pada waktu pengangguran rendah. Disisi lain, pada waktu pengangguran tinggi, para pekerja sulit mendapatkan pekerjaan dan perusahaan dapat dengan mudahnya mengisi kekosongan yang dibutuhkan perusahaannya tanpa perlu menaikan upah.

## X. CARA MENCEGAH INFLASI

Dengan menggunakan persamaan Irving Fisher MV=PT, dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya inflasi maka salah satu variable (M atau V) harus dikendalikan. Disamping ini, volume T ditingkatkan guna mencegah / mengurangi inflasi. Cara mengatur variable M, V dan T tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiscal atau kebijaksanaan yang menyangkut kenaikan produksi.

# BAB XII

# KEBIJAKAN EKONOMI DALAM NEGERI

## I. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. [1]

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu

suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

## II. JENIS-JENIS KEBIJAKAN MONETER

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: [2]

1. Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*)

   Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*)

2. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)

   Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*)

   Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : [3]

3. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

   Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

4. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

   Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

5. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

   Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

6. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

   Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

## III. TUJUAN KEBIJAKAN MONETER

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. [4]

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka

kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

## IV. DEVALUASI MATA UANG

Devaluasi mata uang adalah suatu tindakan penyesuaian nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Otoritas Moneter yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap. Devaluasi tersebut biasanya dilakukan apabila rezim yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap tersebut menilai bahwa harga mata uangnya dinilai terlalu tinggi dibandingkan nilai mata uang negara lain dimana nilai mata uang tersebut tidak didukung oleh kekuatan ekonomi negera yang bersangkutan. Mata uang suatu negara dikatakan mengalami kelebihan nilai dapat dilihat dari perbedaan inflasi kedua negara. Negara yang inflasinya tinggi seharusnya akan segera mengalami penurunan nilai namun dalam sistem nilai tukar tetap proses penyesuaian tersebut tidak berlaku secara otomatis karena penyesuaian nilai tukar tersebut harus melalui penetapan pemerintah.

Tanda-tanda suatu mata uang yang mengalami kenaikan nilai antara lain ekspor yang terus menurun dan industri manufaktur mulai mengalami penurunan kinerja

## V. DEVALUASI DI INDONESIA [1]

**20 Maret 1950**

Pemerintahan Presiden Sukarno , melalui menkeu Syafrudin Prawiranegara (Masyumi, Kabinet Hatta RIS) pada 30 Maret 1950 melakukan devaluasi dengan penggutingan uang. Syafrudin Prawiranegara menggunting uang kertas bernilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya berkurang separuh. Tindakan ini dikenal sebagai "Gunting Syafrudin".

**24 Agustus 1959**

Pemerintahan Presiden Sukarno melalui Menteri Keuangan yang diranagkap oleh Menteri Pertama Djuanda menurunkan nilai mata uang Rp 10.000 yang bergambar gajah dan Rp 5.000 yang bergambar macan, diturunkan nilainya hanya jadi Rp 100 dan Rp 50.

**Tahun 1966**

Imbas dari tindakan embargo yang dilancarkan oleh sekutu Kapitalis dan Imperialis terhadap Indonesia karena berani menentang pembentukan negara boneka di kawasan Asia Tenggara oleh Inggris dan AS, Waperdam III Chairul Saleh terjeblos dalam tindakan ekstrem, mengganti uang lama dengan uang baru dengan kurs Rp. 1000 akan diganti Rp. 1 baru. Akibatnya inflasi tak terkendali dan segera melonjak 650% dan Bung Karno dipaksa untuk mengeluarkan Supersemar 11 Maret 1966 yang semakin mengukuhkan pemberontakan Soeharto sejak menolak dipanggil ke Halim oleh Panglima Tertinggi pada 1 Oktober 1965.

**21 Agustus 1971**

Terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto (Orde Baru) melalui Menkeu Ali Wardhana. AS pada 15 Agustus 1971 harus menghentikan pertukaran dollar dengan emas. Presiden Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas AS

jika dollar dibolehkan terus ditukar emas, dimana 1 troy onz emas = US$ 34.00. Maka untuk menjaga cadangan emas AS, pemerintah AS menghapuskan sistem penilaian dollar yang dikaitkan dengan emas. Soeharto yang sangat tergantung dengan AS mati kutu dan tidak bisa mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi Rupiah pada 21 Agustus 1971 dari Rp. 378 menjadi Rp. 415 per 1 US$.

**15 November 1978**

Masa Pemerintahan Presiden Suharto melalui Menkeu Ali Wardhana. Walaupun Indonesia mendapat rezeki kenaikan harga minyak akibat Perang Arab - Israel 1973, tetapi Pertamina justru nyaris bangkrut dengan utang US$ 10 miliar dan Ibnu Sutowo dipecat pada 1976. Tetap tidak bisa dihindari devaluasi kedua oleh Soeharto pada 15 November 1978 dari Rp. 415 menjadi Rp. 625 per 1 US$.

**30 Maret 1983**

Masa Pemerintahan Presiden Suharto melalui Menkeu Radius Prawiro. Pada saat itu Menkeu Radius Prawiro mendevaluasi rupiah 48% jadi hampir sama dengan menggunting nilai separuh. Kurs 1 dolar AS naik dari Rp 702,50 menjadi Rp 970.

**12 September 1986**

Masa Pemerintahan Presiden Suharto melalui Menkeu Radius Prawiro. Pada 12 September 1986 Radius Prawiro kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47%, dari Rp 1.134 ke Rp 1.664 per 1 dolar AS. Walaupun Soeharto selalu berpidato soal tidak ada devaluasi, tapi sepanjang pemerintahannya telah terjadi empat kali devaluasi.

## VI. PERANAN PEMERINTAH

Peranan pemerintah dalam hal ini adalah campur tangannya terhadap proses perkembangan ekonomi untuk maisng-masing negara mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Seperti di Jepang, Jerman dan USSR pemerintah memegang peranan

penting dalam proses perkembangan ekonomi mereka. Sebaliknya di Inggris dan Amerika Serikat peranan pemerintah boleh dikatakan sedikit sekali. Di Inggris kelas-kelas industri dan pedagang menghendaki kebebasan bergerak dan perkembangan ekonomi yang pesat disebabkan adanya kebebasan sesuai dengan paham liberal. Di Amerika Serikat peranan pemerintah terbatas pada pembuatan jalan kereta api, jalan-jalan raya dan pelabuhan, melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri dengan tarif proteksi dan subsidi.

Kebanyakan negara yang sedang berkembang perlu adanya campur tangan pemerintah demi untuk memperlancar pembangunan, halangan untuk berkembang di negara yang sedang berkembang karena perkembangan ekonomi saat ini tidak bersifat spontan, oleh karena itu pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan.

Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan resikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum)

1. **Strategi Pembangunan**

   Memang secara umum hal-hal tersebut diatas ini dapat disetujui, tetapi setekah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat.

   Misalnya sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, tetapi ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral. Namun pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu: aliran *pertama disebut sebagai "all or nothing approach" (semua atau tidak sama sekali) yang mengatakan bahwa*

*rintangan-rintangan dari perkembangan itu hanya dapat diatasi bila pemerintah mengadakan industrialisasi besar-besaran dan secara cepat* Sedangkan aliran ”gradual approach” yang mengatakan bahwa rintangan pertumbuhan sebaiknya dihilangkan secara bertahap.

Dengan demikian menurut ”all or nothing approach” pemerintah harus mengadakan rencana-rencana serta program-program, dan selekasnya dapat diadakan akumulasi kapital. Perencanaan itu paling sedikit harus mempunyai 4 kelompok target/sasaran yaitu:

a. target produksi yang tegas yang menunjukkan kenaikan produksi barang-barang yang diperlukan.
b. Perhitungan anggaran penanaman modal (investasi) untuk proyek investasi publik seperti jalan-jalan, jembatan, listrik, air dan sebagainya
c. Membuat anggaran untuk ”human invesment” yang meliputi pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam bidang pendidikan dan membuat peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perseorangan swasta, perusahaan-perusahaan besar dan lembaga-lembaga yang membantu pelaksanaannya.

Jadi aliran pertama menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secara besar-besaran. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oleh pemerintah.

Kebanyakan program pembangunan sekarang ini menitik beratkan pada perbaikan-perbaikan pertanian, promosi jasa-jasa sosial, perluasan prasarana dan pendirian industri-industri kecil. Alasan-alasan mengapa titik berat usaha atau program pembangunan pada sektor-sektor tersebut ialah bahwa sektor pertanian dan industri kecil merupakan sektor utama dan sektor yang paling banyak mengalami kemiskinan.

Mengenai ”sosial overhead capital” memang harus diusahakan oleh pemerintah karena sektor swasta tidak tertarik, sedangkan sektor ini sangat perlu untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan dalam pembangunan. Jasa-jasa sosial seperti sekolahan, rumah sakit dan sebagainya yang dapat mengurangi penderitaan penduduk, hendaknya diusahakan oleh pemerintah pula. Sedang pendirian industri kecil karena tidak membutuhkan banyak kapital besar dan relatif membutuhkan sedikit pengetahuan dapat diserahkan kepada pihak swasta> Kebijakan ini cocok di negara yang belum maju, karena kurangnya wiraswasta, dan kurangnya pasar yang mampu menyerap produksi jika terjadi secara besar-besaran. Dengan kata lain rencana pembangunan di negara sedang berkembang hendaknya lebih menitik beratkan pada pertanian, transpor, tenaga listrik dan jasa-jasa sosial untuk pabrik-pabrik Dengan lancarnya perkembangan sektor pertanian, maka pabrik dapat berkembang, sebab bahan makanan cukup tersedia, tenaga dari sektor pertanian dapat dipindahkan ke sektor industri

**Aliran kedua ”*gradual approach*”** mengatakan bahwa pembangunan lebih baik dengan pendekatan secara perlahan-lahan, aliran ini menghendaki adanya perencanaan yang sedikit saja, industrialisasi dilaksanakan secara perlahan-lahan dan mementingkan mekanisme pasar demi berkembangnya usaha-usaha swasta serta memecahkan masalaha pembangunan itu dengan bertahap.

Jadi mengenai pendapat ”gradualist” bahwa pembangunan dilaksanakan secara perlahan-lahan dan campur tangan pemerintah juga dikehendaki, tetapi pada bidang-bidang tertentu saja. **Dengan demikian perbedaan antara aliran *”All or nothing approach*” dengan ”*gradualist*” adalah:**

Aliran all or nothing menghendaki investasi besar-besaran untuk industrialisasi dengan perencanaan pusat. Pemerintah menjalankan pengawasan dan melaksanakan industrialisasi.

Aliran gradualist menghendaki campur tangan pemerintah sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat ”self generating” dan kumulatif.

Dalam praktek masing-masing negara mempunyai batas-batas tersendiri, sektor-sektor yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh swasta tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, laju pertumbuhan ekonomi, besarnya kekuasaan pemerintah dan sebagainya.

**2. Pendidikan dan Kesehatan**

Bantuan pemerintah di bidang jasa-jasa sosial terutama pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Di negara yang sedang berkembang, Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi halangan-halangan untuk berkembang dengan mengurangi keterbelakangan penduduk/masyarakat, menambah-mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi. Ini semua merupakan investasi di bidang kemanusiaan (human invesment) yang dapat meningkatkan kualitas penduduk/masyarakat.

**a. Pendidikan**

Peranan pendidikan sangat luas. Maka disarankan supaya diadakan urutan perioritas antara lain

1. perluasan pendidikan di sektor pertanian (pembangunan Masyarakat Desa, Bimas dan sebagainya)
2. latihan-latihan yang menyangkut pengetahuan tehnik

3. Latihan-latihan dalam bidang pengetahuan tehnik dan administrasi

Dengan demikian dapat diharapkan bahwa sektor pertanian bisa berhasil dan pada tahap berikutnya industri-industri dapat segera didirikan.

Perpindahan pekerja dari sektor pertanian dan lain-lain pekerjaan tradisional ke sektor yang lebih modern dan rasional tidaklah mudah, karena hal ini mempengaruhi pula psikologi serta adat istiadat para pekerja. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan menaikkan tigkat upah, produksi ditujukan pada barang-barang tradisional, pendidikan/latihan-latihan disesuaikan dengan kesenanngan dan adat istiadat mereka.

Dalam hal ini diharapkan setiap perubahan hendaknya berlangsung secara perlahan-lahan. Penghapusan buta huruf akan memudahkan latihan-latihan bagi para pekerja. Perlu dihilangkan sikap mengagungkan lapangan kerja kantor ( white collar prestige occupation) yang mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran intelektual (banyak sarjana yang sukar mencari pekerjaan) Oleh karena itu diharapkan pendidikan hendaknya lebih ditekankan pada pendidikan kejuruan.

Pendidikan di bidang pengetahuan administrasi dan pengawasan juga penting untuk mengadakan koordinasi serta kelangsungan dan kesatuan bertindak. Apabila hal ini tidak ada maka segala program pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

**b. Kesehatan**

Terpeliharanya kesehatan akan menaikkan produktivitas buruh lebih efisien. Makanan harus diperbaiki, penyakit-penyakit harus ditumpas dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan vasinasi periodik, persediaan perumahan sehat dan sebagainya. Kesehatan

dipandang dari segi manfaatnya dalam menaikkan tingkat pendapatan dapat dilihat dari dua cara antara lain;

1. Memperbaiki kualitas angkatan kerja, sehingga mempermudah adanya perkembangan ekonomi.
6. Pertumbuhan jumlah penduduk guna mengimbangi kebutuhan tenaga kerja untuk perkembangan lebih lanjut atau dapat pula dilaksanakan pengendalian kelahiran (*fertility control*) atau pembatasan kelahiran sehingga jumlah penduduk tidak bertambah terlalu banyak, dan kenaikan pendapatan dapat didukung oleh perkembangan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil.

**3. Fasilitas Pelayanan Umum**

Pemerintah uga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan transportasi, komunikasi, tenaga listrik, air dan prasarana-prasarana lain seperti jalan-jalan kereta api, pelabuhan dan telekomunikasi, karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum.

Investasi dalam fasilitas prasrana umum ( social overhead capital) meruapak dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak langsung memberi keuntungan kecuali dalam jangka panjang (gestation periode-nya lama) Karena itu pemerintah harus yang melakukannya. Mengenai bentuk pengerjaannya bisa macam-macam misalnya pemerintah dapat mengontrakkan pembuatan jalan-jalan pada swasta atau ditangani snediri.

Meskipun sebagian besar negara sedang berkembang setuju terhadap peranan pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan public utilities, tetapi kadang-kadang ada perbedaan pendapat dalam peranannya di bidang pertanian, politik fiskal dan moneter.

**4. Perbaikan di Bidang Pertanian**

**a. Penggunaan Teknik Produksi**

Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-lat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian, dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu. Misalnya penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengolahan tanah, penghutanan, atau penghijauan, pemberantasan penyakit dan sebagainya.

Selain itu hendaknya diperhatikan bahwa dalam penggunaan mesin-mesin traktor yaitu apakah di situ banyak pengangguran tak kentara atau tidak. Sebab bila di suatu desa terdapat banyak pengangguran tak kentara, maka penggunan traktor hanya akan menambah jumlah pengangguran.

Untuk memindahkan mereka (para penganggur tak kentara atau tersembunyi) lebih dahulu pemerintah harus merangsang kegiatan-kegiatan lain yang kiranya dapat menampung perpindahan tersebut.

Oleh karena itu, ada prinsip bahwa perbaikan di sektor pertanian hendaknya dibarengi dengan industrialisasi yang sesuai dengan politik"balanced growth" (pertumbuhan seimbang) Juga bila jumlah penduduk sangat langka, mekanisme sangat diperlukan supaya hasil produksi rata-rata pekerja dapat naik. Namun perlu diperhatikan bagaimana luas tanahnya, sebab bila tanah pertanian itu sempit, penggunaan traktor juga kurang efisien di samping harganya mahal. Yang dimaksud dengan penggunaan alat-lat baru belum tentu dengan

mesin-mesin, tetapi misalnya yang dulunya pakai cetok sekarang menggunakan cangkul dan sebagainya, yang penting ada perubahan cara dari yang kurang produktif kepada yang lebih produktif.

*b.* ***Land Reform***

Yang dimaksud land reform adalah redistribusi pemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.

Kegiatan pertanian secara besar-besaran dapat menguntungkan hanya bila sudah ada penggunaan mesin-mesin dan produksi atau tanaman yang dihasilkan adalah sejenis. Maka dari itu kadang-kadang pemilik tanah kecil perlu disatukan, sehingga semua kegiatan dapat dilakukan secara efisien (keuangan, pemasaran, organisasi dan sebagainya) dan dihasilkan output lebih banyak daripada bila kegiatan itu dikerjakan oleh seorang demi seorang.

Kebijakan land reform berbeda-beda di setiap negara, apakah hak milik tanah terlalu sempit atau sebaliknya tergantung pada struktur sosial dan politik yang ada. Pada pokoknya land reform itu ialah distribusi tanah yang efisien sehingga hasil produk yang maksimum dapat tercapai.

Jadi jelas bahwa peranan pemerintah dalam memperbaiki sektor pertanian ialah dengan land reform beserta follow-upnya. Kalau tampak berhasil, maka pemerintah harus segera memikirkan sektor industri sebagai sektor komplementer agar sebagian penduduk di sektor pertanian dapat dipindah, supaya tidak terjadi pengangguran terbuka maupun pengangguran tersembunyi.

## VII. KEBIJAKAN FISKAL

Politik atau Kebijakan fiskal yang efektif perlu dilaksanakan di negara-negara sedang berkembang. Politik ini berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, dan mempunyai 3 (tiga) pengaruh penting untuk perkembangan ekonomi yaitu:

1. dapat mempengaruhi pendapatan nasional
2. memajukan akumulasi kapital
3. dan menahan inflasi ataupun deflasi

Pengeluaran pemerintah untuk suatu sektor tertentu akan menarik faktor-faktor produksi ke sektor tersebut. Sedangkan pajak yang dikenakan pada sektor tertentu akan menghalangi mengalirnya faktor-faktor tersebut ke sektor itu. Karena proses yang demikian, maka pola penerimaan dan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Pajak akan membatasi tumbuhnya industri dan sebaliknya subsidi akan mendorong berkembangnya industri.

## VIII. ADANYA KEWIRASWASTAAN

Mendorong timbulnya semangat wiraswasta merupakan tantangan paling berat bagi pemerintah negara sedang berkembang. Di samping pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta dari luar negeri atau pemerintah sendiri bertindak aktif sebagai wiraswasta. Namun wiraswasta dari luar negeri biasanya tidak disukai, karena seolah-olah ada rasa kolonialisme atau pengaruh luar negeri.

Bila pemerintah bertindak sebagai wiraswasta hendaknya terbatas pada penyediaan fasilitas umum serta pemeliharaannya, agar dengan demikian dapat mendorong wiraswasta di bidang lain sehingga proses perkembangan dapat berjalan dengan sendirinya (***selfstaining***) Meskipun pemerintah dapat mendorong, merencanakan dan mengkoordinir kegiatan-

kegiatan pembangunan, serta memobilitas sumber-sumber produksi tetapi kekurangan wiraswasta harus segera
diatasi. Pemerintah dalam hal ini harus berani membangun proyek-proyek yang dapat menarik usaha-usaha swasta. Pemerintah dapat secara tidak langsung mendorong timbulnya para wiraswasta misalnya dengan pengembangan fasilitas/prasarana umum, jaminanhak milik, stabilitas ekonomi, pajak yang menguntungkan dan menyediakan bantuan kredit.

Kesulitan menumbuhkan wiraswasta terletak pada tidak adanya kemauan mengetrapkan kemampuan organisasi untuk usaha produksi, halangan-halangan adat dan kebiasaan, kurangnya insentif ekonomi, tidak adanya mobilitas vertikal, pandangan rendah terhadap kedudukan para pengusaha, ketidaksempurnaan pasar yang membuat kaum wiraswasta menjadi segan untuk mengusahakan barang baru, dan perubahan-perubahan hukum serta peraturan-peraturan pemerintah menyebabkan keadaan ekonomi tidak pasti bagi wiraswasta.

Pada prinsipnya untuk mengatasi kekurangan jumlah wiraswasta, perlu ditambahkan motivasi dengan cara memajukan kemampuan dan membuat iklim/suasana yang baik bagi adanya wiraswasta. Sudah tentu mengubah motivasi dan kemampuan memerlukan perubahan dalam adat kebiasaan serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Dalam jangka pendek kegiatan-kegiatan wiraswasta dapat didorong dengan jalan mendirikan koperasi, industri kecil, dan industri besar yang dapat disewakan atau dibeli oleh swasta.

Sedangkan dalam jangka panjang kegiatan pemerintah dapat memperbaiki struktur keuangan, perpajakan dan teknik produksi sehinga swasta dapat mengembangkan industri yang cocok dalam perekonomian tersebut. Bila proyek pemerintah ini berhasil berkembang, maka investasi swasta pasti akan bertambah pula.

Bertambahnya semangat untuk menjadi wiraswasta tergantung pada perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam lembaga-lembaga dan struktur sosial yang ada. Meskipun usaha itu dapat dipergiat tapi hasrat ini harus berasal dari negara sedang berkembang itu sendiri dan tidak dapat dipaksakan dari luar.

Yang penting sekarang ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangant dari perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan - kegiatan ekonomi yang produktif.

Jadi ada dua kemungkinan untuk mendorong timbulnya wiraswasta yaitu:

1. Pemerintah mengambil tindakan inovasi.
2. Swasta dapat menirunya

Inovasi teknologi dapat diambil dari luar negeri. Bila perkembangan ini berhasil maka jumlah wiraswasta akan bertambah banya, sebab bila wiraswasta membantu perkembangan, maka perkembangan akan membantu tambahnya wiraswasta pula.

# BAB XIII

# MENEROPONG KONDISI PEREKONOMIAN: EKONOMI KELEMBAGAAN

Aliran ekonomi klasik/neoklasik meneriakkan keberadaan kelembagaan netral, artinya hubungan sosial dan struktur sosial tidak dimasukkan kedalam analisisnya. Paradigma yang diusung pendekatan ortodok ini, berbasis pada efisensi ekonomi, yang berangkat pada asumsi bahwa informasi dapat diperoleh secara sempurna, agen bersikap rasional, dan preferensi pelaku ekonomi sepenuhnya untuk memaksimal utilitas dirinya sendiri. Bahkan, corong indikator kelangkaan sumberdaya yang sepenuhnya diserahkan pada ”harga-mekanisme pasar” melalui ”*invisible hand*,” menafikan kehadiran kelembagaan.

Pengabaian terhadap hubungan dan struktur sosial menempatkan aliran ini sepertinya hidup di dunia abstrak dan tidak berpijak pada kenyataan yang sesungguhnya, didalam menerjemahkan alokasi sumberdaya. Ingat, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai suatu hubungan antara kelangkaan sumberdaya dan alternatif penggunaannya. Atau bagaimana mereka berinteraksi satu dengan lainnya untuk mewujudkan harapan ”kesejahteraan”. Ini berarti, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia sebagai makhluk sosial, yang terikat dengan budaya, berinteraksi dengan politik, dan dijembatani dengan hukum.

## I. KONSEP EKONOMI KELEMBAGAAN

**Lembaga (*institution*)** memiliki arti dalam tiga aspek yang kritis. *Pertama*, lembaga membentuk **hak milik** dan **insentif ekonomi**. Tanpa adanya kesepakatan tentang siapa yang berhak memiliki barang, seseorang tidak akan memproduksi dan tidak akan berusaha memperbaiki keadaan ekonomi mereka sendiri. *Kedua*, lembaga (institusi) dapat **memperkuat aturan main dalam perekonomian**. Dalam hal ini, negara akan menjadi aktor ekonomi yang penting, yakni aktor yang menangani persoalan perdagangan. Atau dalam istilah yang lebih umum,

pemerintah harus menciptakan lingkungan bagi sebagian besar orang agar bermain dengan mengikuti aturan ekonomi, tetapi aturannya tidak menindas para pelaku ekonomi. *Ketiga*, lembaga dalam kaitannya dengan ideologi, atau karena secara psikologis dan sosial, lembaga adalah **pembentuk masyarakat ekonomi**. Institusi menentukan bagaimana orang memandang keadilan dan sikap yang benar. Ini terkait pula bahwa institusi bisa menghalangi ekonomi meraih pertumbuhan potensial. Dan akan terjadi ketika institusi justru memberikan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak produktif. Jika orang memandang imbalan dari lembaga tidak adil dan sewenang-wenang, maka mereka enggan untuk bekerja keras dan pada gilirannya hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (North, dalam Pressman, 2000).

**1. Definisi**

Definisi kelembagaan sangat beragam, Berg (2001) mendefinisikannya sebagai hukum, norma sosial, tradisi, keyakinan agama, dan aturan perilaku lainnya yang sudah mapan yang menyediakan insentif sehingga orang yang rasional akan bereaksi terhadap insentif tersebut. Lembaga menurut Mubyarto (1989) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Johnson dan Nielsen (1998) menganggap kelembagaan sebagai phenomena yang membatasi dan pola perilaku dan bertanggung jawab pada stabilitas daripada sebagai perubahan dalam ekonomi. Hodgson (1993) mendefinisikan konsep kelembagaan adalah pola teladan yang dianut dari perilaku dan kebiasaan berpikir, kebiasaan sehari-hari dan daya tahan alami, yang dikaitkan dengan interaksi individu dalam kelompok atau kolektifitas yang lebih luas. Hayami dan Ruttan (1985) menyebut institusi sebagai peraturan dalam masyarakat atau dalam organisasi yang

memfasilitasi koordinasi antar orang dengan membantu mereka dari ekspektasi dimana setiap orang pantas mengadakan perjanjian dengan yang lain. Sedangkan Yeager (1999), mendefinisikan kelembagaan sebagai **aturan main (*rules of the game)* dalam masyarakat.**

Sungguhpun begitu, definisi kelembagaan yang paling umum disetujui oleh para ahli, adalah **sekumpulan aturan formal** (hukum, kontrak, sistem politik, organisasi, pasar dan lainnya) dan **aturan informal** yang dilaksanakan (norma, tradisi, kebiasaan, sistem nilai, agama, kecenderungan sosiologi dan lainnya) yang memfasilitasi koordinasi atau mengelola (*governance*) hubungan antara individu atau kelompok (Kherallah dan Kirsten, 2000). Oleh karena, pada dasarnya lembaga menyediakan lebih banyak kepastian dalam interaksi manusia dan juga mempengaruhi perilaku seseorang.

## *2.* Ekonomi Kelembagaan dan Ekonomi *Mainstream*

Commons, 1934; dalam Paarlberg (1993) mendefinisikan ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) sebagai pengontrolan tindakan kolektif, pembebasan, dan perkembangan tindakan manusia (*collective action controlling, liberating, and expanding human action*). Dengan penekanan ekonomi kelembagaan mempelajari bagaimana sistem ekonomi disusun (*structured*) dan bagaimana struktur itu berubah dalam merespon tindakan kolektif (Bromley, 1993).

Perbedaaan dan persamaan antara ekonomi kelembagaan dan ekonomi *mainstream*. Persamaan keduanya mencakup (1) menerima dalil bahwa hakekat dari ekonomi adalah bagaimana memproduksi dan mendistribusikan kelangkaan persediaan barang dan jasa (2) mengasumsikan bahwa tujuan keduanya untuk memperoleh kesejahteraan manusia (3) menyadari tentang pentingnya insentif (4) menerima prinsip *diminishing utility* (5) mengakui bahwa jumlah produksi dan

kuantitas permintaan akan menurun dengan adanya peningkatan harga dan (6) mampu menangani persaingan pasar tidak sempurna.

Disisi lain, perbedaan diantara keduanya (ekonomi kelembagaan *vs* ekonomi *mainstream*) yang dapat dilihat pada Tabel 10.1. Dapat disimpulkan, paradigma "neoklasik" menganggap lembaga keberadaannya netral, agen bersikap rasional, dibentuk dengan baik, preferensi tidak beragam atau *institution-free, with perfectly rational agents, well formed and invarian preferences*).

Tabel 10.1. Perbedaan antara Ekonomi *Mainstream d*an Ekonomi Kelembagaan

| Pendekatan | *Mainstream*<br><br>Materialistis | Ekonomi Kelembagaan<br>idealistis |
|---|---|---|
| - Unit pengamatan<br>- Tujuan individu<br>- Hubungan dengan ilmu sosial lain<br>- Konsep nilai<br>- Konsep ekonomi<br><br>- Philosofi<br>- Tingkah laku sosial<br><br>- Postulat | Komoditi dan harga<br>Kepentingan diri<br>Menyempit ke ekonomi<br><br>Nilai dalam pertukaran<br>Sama seperti ilmu eksakta<br>*Pre-Dewey*<br>Percaya dengan keinginan bebas (*free will*)<br>Keseimbangan<br>*Particularism* | Transaksi<br>Diri dan orang lain<br>Mempertimbangkan semuanya<br><br>Nilai yang digunakan<br>Pendekatan budaya<br><br>*Post Dewey*<br>Perilaku<br><br>Ketidakseimbangan<br>*Holism*<br>Kebanyakan |

| | | |
|---|---|---|
| - Fokus | Positivis | normatif |
| - Metode ilmiah | Kebanyakan kuantitatif | Kebanyakan kualitatif |
| - Data | Tertutup | Terbuka |
| - Sistem | Statis | Dinamis |
| - Pandangan ekonomi | Biasanya menawarkan | Sering menentukan |
| - Aturan | pilihan | Dipertimbangkan |
| - Perilaku terhadap tindakan kolektif | Melawan Smith, Marshall | tidak bisa dihindari Veblen, Commons |
| - Pendukung | | |

Sumber: Paarlberg (1993).

### 3. Ekonomi Kelembagaan Tradisional *vs* Ekonomi Kelembagaan Baru

Dalam tahapan perjalannya ekonomi kelembagaan berangkat pada pijakan pertamanya yakni aliran ekonomi kelembagaan lama/ OIE (*old institutional economic)*, dan kemudiaan berkembang menjadi NIE (*new institutional economic* atau ekonomi kelembagaan baru). Kunci perbedaan antara keduanya adalah: pendekatan OIE sangat memfokuskan kajiannya mengenai kebiasaan (*habit*), bagi para ahli OIE menganggap bahwa kebiasaan/perilaku sebagai faktor krusial yang akan menentukan formasi serta kesinambungan (*sustenance*) kelembagaan. Sebaliknya, diujung spektrum lain yang berseberangan, NIE lebih memberikan perhatian kepada kendala yang menghalangi proses penciptaan pengkondisian kelembagaan, dan utamanya memfokuskan kepada pentingnya kelembagaan sebagai kerangka interaksi antar individu. Karakteristik para ahli NIE selalu mencoba menjelaskan pentingnya kelembagaan seperti perusahaan atau negara,

sebagai model referensi bagi perilaku individu yang rasional, untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam interaksi manusia. Faktor penjelasnya adalah dari individu ke kelembagaan, dengan menganggap individu apa adanya (*given*) (Hodgson, 1998; dalam Yustika, 2006).

Tabel 10.2. Empat Sumber Kooperasi

| | Makro | Mikro |
|---|---|---|
| *Egotistic* | Paksaan atau takut pada sangsi dari yang berkuasa (Tuhan, hukum) | Manfaat materi atau kepentingan |
| *Non egotistic* | Etika: nilai/norma yang patut dilaksanakan | Terikat pada persahabatan, kekerabatan dan empati |

Sumber: Nooteboom (1998).

Nooteboom (1998) membedakan antara OIE dan NIE dari sudut "sumber kooperasi" dalam kaitan dengan sumber *egotistic* dan *non egotisic*. Perspektif sosiologi *Neo institutionalist*, yang dikemukakan oleh ahli OIE (*old institutionalist),* oleh Veblem dan Commons tentang masyarakat yang mempertimbangkan perkembangan dan interaksi hubungan serta aturan lembaga sebagai kekuatan budaya dilekatkan yang bisa menghambat dan memandu pelaksanaan dan membatasi oportunitas, sedangkan NIE menggunakan patokan standar ekonomi metodologi individual (Neoklasik) dan fokus pada peristiwa transaksi daripada terhadap hubungan transaksi.

NIE memfokuskan pada sumber egotistic (*egotistic source*), sedangkan *Neo–institutionalism* memfokuskan pada sumber non egotistic (*non-egotistic source*). Sumber egotistic mencakup paksaan atau takut pada sangsi dari yang berkuasa (Tuhan, hukum) dan manfaat materi atau kepentingan, sedangkan *non egotistic* mencakup etika: nilai/norma yang patut dilaksanakan dan terikat pada persahabatan, kekerabatan dan empati. Dari kedua sumber ini dapat mengadopsi tiga dimensi dalam hubungan tata kelola (*governance of relation*): *material (self) interest*, peluang oportunis, kecenderungan terhadap oportunis, dimana *material (self) interest*, dan peluang oportunis merupakan bagian dari ekonomi biaya transaksi (*transaction cost economic/TCE*), yaitu masing-masing diimplementasikan dalam hubungan kontrak (*relational contracting*) dan kontrak *legal* (*legal contracting*). Sedangkan kecenderungan terhadap oportunisme dibatasi oleh adanya kepercayaan (*trust*) (Nooteboom, 1998) (lihat Tabel 10.2).

**Ekonomi kelembagaan baru beroperasi pada dua level yaitu makro dan mikro**. Level makro berhubungan dengan **lingkungan kelembagaan** (*institutional environment*) atau aturan main, yang mempengaruhi perilaku dan performan dari pelaku ekonomi dan dalam bentuk organisasi dan transaksi yang dilekatkan. Williamson mendefinisikan lingkungan kelembagaan sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial dan *legal* yang fundamental yang memapankan basis untuk kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Pada sisi lain analisis level mikro, juga dikenal sebagai **kesepakatan kelembagaan /*institutional arrangement***, yaitu mengenai tata kelola lembaga (*institutions of governance*). Menurut Williamson, mengacu lebih pada bentuk dari mengelola transaksi dan termasuk pasar, kuasi-pasar, dan model hierarki dari kontrak. Fokusnya terletak pada transaksi individu dan pertanyaan berhadapan dengan bentuk organisasi (integrasi vertikal *versus* di luar-kontrak) dianalisis. Kesepakatan kelembagaan didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola berbagai cara agar anggota-

anggotanya dapat bekerjasama dan atau berkompetisi (Kherallah dan Kirsten, 2000).

NIE didefinisikan sebagai bidang yang multidisipliner yang meliputi berbagai cabang ilmu, diantaranya:

1. Ekonomi biaya transaksi : modal sosial, teori hak kepemilikan, ekonomi informasi
2. Ekonomi sosial baru: modal sosial
3. Sejarah ekonomi baru
4. Teori tindakan kolektif
5. Pilihan publik dan ekonomi politik
6. Ekonomi dan hukum

Asumsi dasar NIE (Furubotn dan Richter, 2000):

1. Metodologi individualisme (*individual methodology*); artinya ketika mempelajari phenomena ekonomi, maka harus berangkat pada bagaimana individu itu berperilaku karena individu berbeda dan memiliki perbedaan dalam selera, tujuan, maksud, dan ide. Oleh karena itu, implikasinya bahwa "masyarakat" dipelajari dengan dimengerti berdasarkan entitas agen individual yang ada dan bukan pada entitas kolektif. Sehingga teori phenomena sosial harus memulainya dan mendasarkan pada perilaku anggota-anggota individu
2. *Maximand;* individu diasumsikan memburu kepentingan sendiri untuk memaksimumkan kepuasannya dengan kendala struktur kelembagaan, artinya pembuat keputusan seperti manajer, politisi atau yang lainnya dianggap mengejar tujuannya sendiri dengan dibatasi oleh struktur organisasi dimana dia bekerja.
3. *Individual rationality*; individu memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan tidak mungkin tahu terhadap semua hal. Perspektif ini muncul

karena preferens individu disadari tidak lengkap dan dikendalai oleh perubahan waktu. Keadaan ini disebut *bounded rationality*

4. Perilaku oportunis (*opportunistic behaviour*); dikurangi oleh adanya lembaga, yang mempunyai aturan-aturan formal, konvensi, kode informal perilaku dimana lembaga mendefinisikan dan membatasi kumpulan pilihan individual
5. *Economic society*; Masyarakat ekonomi dapat dikatakan sebagai kumpulan individu dan sekumpulan aturan atau norma yang memberikan sangsi hak kepemilikan (*property right*) kepada setiap anggota masyarakat. Dalam arti luas hak kepemilikan mencakup dua hal. *Pertama*, hak untuk menggunakan atau menambah manfaat dari obyek fisik atau hasil intelektual. *Kedua*, hak meminta suatu perilaku tertentu dari individu lain, atau yang disebut hak kontrak (*contract right*). Dalam ekonomi neoklasik hanya memasukkan tipe khusus masyarakat yang mentransfer hak kepemilikan dengan menggunakan kekuatan fisik atau bentuk paksaan lainnya. Artinya pembentukan atas tekanan kelompok seperti kekuasaan pemerintah dikesampingkan. Hal ini tidak terlepas dari konsep yang mendominasi neoklasik yaitu kompetisi dan pilihan secara bebas
6. Struktur tata kelola (*governance structure*), keberadaan konfigurasi hak kepemilikan dalam ekonomi ditentukan dan dijamin oleh tata kelola dan penataaan (*order*). Dalam ekonomi kelembagaan, hak kepemilikan-pada sistem yang membatasi perilaku individu melalui penggunaan sangsi. Dalam bentuk hukum dan kebiasaan.
7. Kelembagaan diartikan sebagai sekumpulan aturan formal dan informal, yang memasukkan penegakan kesepakatan. Lembaga dibentuk dengan dua cara (1) lembaga tumbuh secara spontan berdasarkan kepentingan individu sendiri, artinya mereka mengorganisasikan tanpa persetujuan, tanpa pemaksaan legislatif atau bahkan tanpa pertimbangan kepentingan publik (2) lembaga merupakan produk yang sengaja didesain. Beberapa penguasa bertindak

dengan pikiran rasionalnya, yang dapat memungkinkan memperkenalkan struktur lembaga yang dianggap sesuai. Dari penekanan ini dapat dikatakan bahwa ekonomi kelembagaan mempelajari karakteristik lembaga dan membuat mereka menjadi elemen integral dalam model ekonomi umum (*general economic model*), artinya memasukkan lembaga sebagai variabel *endogenous*.

8. Organisasi; lembaga bersama dengan orang-orang mengambil manfaat dari organisasi. Atau dengan istilah lain, organisasi merupakan sisi pribadi dari lembaga. Arrow mendefinisikan organisasi: sekumpulan individu yang berusaha untuk mencapai beberapa tujuan bersama atau untuk memaksimisasi fungsi tujuan, Sedangkan menurut Gibson *et al.* (1996:6) organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Dalam ekonomi kelembagaan modern selalu berkaitan dengan lembaga dan organisasi

## 4. Lembaga dan Pertumbuhan Ekonomi

**Lembaga dapat mendorong kegiatan produktif dan pertumbuhan ekonomi**. Agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, lembaga sebaiknya menyediakan insentif bagi individu yang mau bekerja keras dan menyimpan sebagian pendapatannya, untuk wiraswasta yang secara aktif mengambil risiko dalam mengejar kesempatan, untuk perusahaan yang mencari pengurangan biaya dan memperbaiki produknya, dan untuk pembuat kebijakan pemerintah yang menggunakan penerimaan pajak secara efisien, menyediakan barang publik, dan mendesain program biaya yang efektif untuk mencapai kesejahteraan. Artinya lembaga yang paling efektif adalah lembaga yang membuat orang-orang menjadi inovatif atau produktif untuk perspektif jangka panjang sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Karena lembaga pada dasarnya penting untuk

mempengaruhi orang-orang agar tertarik dalam kegiatan produktif yang dapat menambah total output (Berg, 2001).

Lembaga mempengaruhi biaya pelaksanaan pertukaran yang diperlukan dari tangan ke tangan dengan spesialisasi. Menurut North, penyebab utama pertumbuhan ekonomi adalah institusi yang biaya transaksinya lebih rendah (North, 1987). Karena lembaga menyediakan informasi, mengurangi ketidakpastian, memanajeman konflik dan kooperasi, dan menciptakan insentif dan kepercayaan. Fungsi ini tidak hanya memberikan stabilitas dan struktur pada ekonomi, tetapi mereka juga sangat penting untuk inovasi.

Konsep lembaga adalah konsep utama untuk mengerti kohesi sosial dan perubahan yang saling berkaitan. Koneksi antara lembaga dan perubahan ekonomi menjadi sangat jelas, karena lembaga mempengaruhi penciptaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan penghancuran ilmu sejak mereka membentuk visi, interaksi, keputusan dan rutinitas agen-agen ekonomi pada semua level dengan dan di luar organisasi dan pasar; mereka membentuk proses teknis dan perubahan organisasi (Johnson dan Nielsen, 1998). Adapun sumber pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan ekonomi kelembagaan dapat dilakukan secara statis dan dinamis.

Yeager (1999) menyebutkan, bahwa dalam tradisi ekonomi kelembagaan, sumber pertumbuhan ekonomi tidak harus hanya bertumpu pada investasi, meskipun disadari bahwa faktor tersebut memang juga penting. Bahkan, kalaupun faktor teknologi dianggap tidak berubah (*given*), pertumbuhan ekonomi tetap bisa dilakukan. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya perubahan (peningkatan) teknologi inilah yang disebut sebagai pertumbuhan statis (*static case*) yaitu dengan cara ”spesialisasi” yang akan memacu tingkat produktivitas. Seperti upaya meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang diperoleh melalui kenaikan derajat spesialisasi dan pembagian tenaga kerja. Dimana adanya spesialisasi hanya akan menuntut pekerja untuk menguasai

pekerjaan yang spesifik sesuai dengan divisinya masing-masing (spesialisasi). Dengan rentang pekerjaan yang tidak terlalu luas, dipastikan pekerja akan mampu menguasai pekerjaan tersebut dengan baik sehingga tingkat produktivitasnya dan mutu pekerjaan semakin tinggi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, menunjukkan bahwa efisiensi dan produktivitas tidak harus dilakukan dengan menambah sumberdaya maupun teknologi, tetapi cukup dengan mempraktekkan pembagian kerja (spesialisasi). Dengan landasan pemikiran tersebut, tugas penting yang harus dikerjakan agar muncul spesialisasi adalah menciptakan kelembagaan yang efisien, seperti yang terlihat pada Gambar 10.1. Perlu ditegaskan kembali, bahwa **indikator efisiensi kelembagaan bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya biaya transaksi** yang muncul dari kegiatan (transaksi) ekonomi, biaya transaksi rendah menunjukkan kelembagaan yang efisien, demikian sebaliknya. Sementara, persyaratan agar desain kelembagaan ekonomi memunculkan biaya transaksi yang rendah, diantaranya (1) membuat regulasi (formal dan informal) yang menjamin kepastian pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi atau pertukaran (*exchange*) (2) memperkuat sistem penegakan (*enforcement*) apabila terjadi masalah dalam proses transaksi. Di sini nilai informal juga sangat krusial dalam mendorong efisiensi dan produktivitas ekonomi, karena kelembagaan informal, seperti agama, keyakinan, budaya dan *code of conduct* yang kuat dan baik biasanya dalam bentuk menghargai waktu, disiplin, kerja keras, dan jujur juga mempengaruhi tingkat produktivitas.

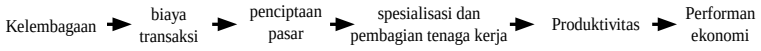


Sumber: Yeager (1999).

Gambar 10.1. Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Statis

Operasional fungsi kelembagaan dalam pendekatan dinamis ini agak berbeda dengan kasus pertumbuhan statis. Kelembagaan (aturan main) dalam pendekatan

dinamis diharapkan bisa mengubah perilaku organisasi, khususnya pada level perusahaan. Ilustrasi yang sederhana bisa digambarkan sebagai berikut, Adanya *creative destruction* (perusakan kreatif). Konsep ini diperkenalkan oleh Schumpeter, yaitu tentang keberanian untuk ”merusak’ konsep lama untuk digantikan penciptaan ide atau konsep baru, khususnya untuk menangkap peluang barang baru yang dibutuhkan konsumen, metode produksi dan transportasi baru, dan bentuk baru dari organisasi industrial. Dimana **”Perusakan kreatif”** ini merupakan fakta paling esensial dari kapitalisme (Schumpeter, 1947).

Gambar 10.2 memperlihatkan, peran penting dari kelembagaan adalah mendesain aturan yang membuat perusahaan mempunyai insentif untuk dapat melakukan ’perusakan kreatif’ yang pada akhirnya berimplikasi kepada penemuan teknologi baru dan memicu pertumbuhan ekonomi.

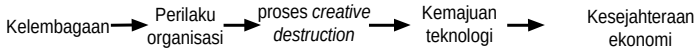


Sumber: Yeager (1999).

Gambar 10.2. Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Dinamis

Model pertumbuhan ekonomi secara gamblang menyebutkan bahwa kemajuan teknologi adalah kunci berlanjutnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sebaiknya tidak hanya mengamati bagaimana lembaga dapat mengatasi peningkatan kompleksitas pertukaran tetapi juga bagaimana ekonomi dapat memperbaiki lembaganya sehingga dapat menawarkan lebih banyak untuk kreasi, penyebaran dan adaptasi ide baru (Berg, 2001). Dimana penciptaan teknologi membutuhkan investasi dan investasi memerlukan penyelenggaraan kontrak, perlindungan hak milik, keamanan nasional.

**5. Lembaga Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Fungsi pemerintah menurut Adam smith: (1) melindungi masyarakat dari pertikaian dan invasi masyarakat lainnya (2) melindungi sebisa mungkin, setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan anggota lain (3) bereaksi dan memenuhi pekerjaan publik tertentu dan membentuk lembaga publik tertentu, yang mana tidak akan pernah individu atau sekumpulan individu tertarik untuk melakukannya. Menurut Kunio (2000), fungsi penting dari pemerintah adalah kemampuannya untuk menyelenggarakan peraturan yang dapat menjaga keamanan personal dan hak kepemilikan.

Pemerintah merupakan lembaga yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dan sistem pasar dapat tidak berfungsi tanpa ada lembaga pemerintah. Pada kenyataannya lembaga yang efisien yang mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan lembaga tertentu, namun kekuasaan pemerintah yang memaksa (sangat kuat) mengantarkan kepentingan individu mudah disalahgunakan (Berg, 2001). Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Tanzi (2001) bahwa peraturan positif yang dikeluarkan pemerintah dalam berbagai cara dan berbagai instrumen berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Easterly (2001) menyatakan, bahwa kelembagaan yang sangat kuat pada suatu negara menyebabkan terjadinya korupsi dan berkurangnya peraturan hukum terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena korupsi dapat mengurangi investasi, seperti terjadinya pengurangan investasi disejumlah negara disebabkan oleh lebih tingginya biaya dan ketidakpastian karena adanya korupsi (Tanzi, 2001), atau menurut Berg (2001), korupsi adalah penyalah gunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.

**6. Hak Kepemilikan**

Hak kepemilikan dalam aset dianggap mencakup hak untuk menggunakan, untuk merubah bentuk dan substansinya, dan untuk mentransfer semua hak dalam aset atau beberapa aset seperti yang diinginkan. Hak kepemilikan adalah hak ekslusif tetapi tidak berarti bahwa kepemilikan bukan tidak dibatasi. Karena itu jelas bahwa property memberi kekuasaan kebebasan menentukan bagi individu atas sumberdaya yang dimilikinya dan menyediakan dasar untuk terbentuknya pasar kompetitif (Furubotn dan Richter, 2000).

Salah satu fungsi penting dari lembaga yaitu memungkinkan ekonomi untuk menyelesaikan masalah transaksi yang komplek dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan cara melindungi hak kepemilikan (*property right*). Adapun manfaat hak kepemilikan (1) membatasi masalah penunggang bebas (*free-rider*) yang tidak dapat dilepaskan dari organisasi dimana ada kepemilikan komunal dan pembagian keuntungan (2) menyediakan lebih besar kebebasan memilih, karena aset dapat diakumulasi sebagai simpanan kesejahteraan, yang dikonversikan kedalam aset lain atau konsumsi ketika kebutuhan meningkat (3) membuat sumberdaya untuk lebih mudah berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain ketika pertumbuhan ekonomi dan perubahan terjadi, karena kepemilikan properti (*property ownership*) memfasilitasi penjualan dan pembelian aset dan faktor-faktor produktif. (4) bertindak sebagai insentif besar untuk inovasi dan investasi, karena inovasi bisa terjadi hanya jika pengusaha dijamin hadiah atas kegiatan inovatifnya (Berg, 2001).

Dalam aturan hukum (*legal*), ada beberapa klasifikasi pengertian dari hak kepemilikan. *Pertama*, hak kepemilikan dalam arti sempit yaitu hak kepemilikan berhubungan dengan obyek fisik atau dapat diukur. *Kedua*, hak kepemilikan dalam arti luas yang berkaitan dengan yang dapat diukur (*tangibles*) atau tidak dapat diukur (*intangibles*). *Intangibles* ini meliputi hak kontrak, paten, hak mengkopi.

*Ketiga*, hak kepemilikan yang dapat diidentifikasi. Individu mempunyai hak tertentu yang tidak tercakup dalam hukum (*law*) tetapi dalam bentuk konvensi yang didukung oleh kekuatan etika, kebiasaan sosial dan pengasingan dari pergaulan (*ostracism*) atau instrumen non *legal* lainnya seperti penegakan otomatis (*self enforcing*) (Furubotn dan Richter, 2000:76).

Analisis ekonomi kepemilikan telah dikonsentrasikan atas dua issue: kepemilikan hak keputusan *residual* (*the possession of residual decision rights*) dan alokasi pengembalian *residual* (*allocation of residual return*). Untuk analisis ekonomi, ini sering bermanfaat untuk menginterpretasikan "kepemilikan aset" yang berarti mempunyai hak *residual* mengontrol (*residual rights of control*) – adalah hak untuk membuat keputusan yang menekankan penggunaan aset yang tidak ekplisit dikontrol oleh hukum atau disetujui terhadap yang lain dalam bentuk kontrak. Sedangkan dalam analisis ekonomi perusahaan seseorang, yang diberi hak untuk menerima beberapa penerimaan bersih dari hasil produksi perusahaan disebut *residual claimant*. Bahwa pemilik diberi hak apapun sisa dari penerimaan yang telah dikumpulkan setelah dikurangi semua hutang, biaya, dan kewajiban kontrak yang lain yang harus dibayar. Pendapatan bersih diperoleh sebagai *residual return*—jumlah penerimaan yang tertinggal setelah dikurangi biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada orang lain (Milgrom, 1992).

## II. KONTRAK, STRUKTUR TATA KELOLA DAN PROSEDUR PENEGAKAN

### 1. Kontrak

Konsep kontrak merupakan sentral untuk memahami semua kegiatan ekonomi, hal ini tidak terlepas bahwa kesepakatan terbentuk tergantung pada persetujuan yang saling menguntungkan - sebagai dasar pertukaran barang dan jasa antara pihak-pihak yang terikut dalam kontrak, misalkan antara perusahaan dan

karyawannya dalam bentuk kontrak tenaga kerja atau antara toko bahan makanan dengan pelanggannya dalam bentuk kontrak implisit (Alchian dan Demsetz, 1972).

Kontrak membuat asumsi komitmen kewajiban, sekali mereka telah diterima secara bebas, tetapi jika tanggungjawab tidak jelas didefinisikan, kontrak tidak akan dihormati dan tidak dilaksanakan. Bahkan sekalipun pihak-pihak yang ada tidak oportunis, tetap akan sulit menepati janji dan sulit menghubungkan kejadian *ex ante* sampai hasil *ex post* (Turvani, 1998). Intinya kontrak berarti untuk melindungi orang-orang dengan insentif yang sepantasnya (*aligning incentives*). Dengan kata lain isue sentral untuk menemukan kesepakatan optimal, bahwa kontrak didesain dengan cara agar agen mempunyai insentif yang cukup untuk mendorong perilaku dalam kepentingan *principal* & hukuman, dan cukup untuk menjaga mereka tetap pada kesepakatan.

Kontrak adalah perjanjian yang dapat diandalkan oleh kedua pihak, (misalkan antara *principal* dan agen) yang mana setiap kewajiban untuk semua kemungkinan yang terjadi dispesifikasikan (Stadler dan Castrillo, 1997). Lebih jelas lagi definisi kontrak yang dikemukakan oleh Milgrom dan Robert (1992), kontrak merupakan kesepakatan yang mencakup sekumpulan setiap tindakan yang dilakukan, pembayaran yang memungkinkan dapat berpindah satu sama lain, peraturan dan prosedur yang digunakan untuk memutuskan masalah-masalah yang akan datang, dan perilaku bahwa setiap kemungkinan yang diharapkan dari orang lain. Tentu saja bahwa kontrak ini akan terjadi apabila pihak-pihak menemukan kesepakatan yang menguntungkan (*mutually advantage*).

Pendekatan utama dalam menganalisa kontrak dapat dibagi dua. *Pertama*, teori kontrak lengkap (*complete contract*) dan yang kedua, teori kontrak tidak lengkap (*incomplete contract*). Teori kontrak lengkap analisisnya dilakukan secara formal, khususnya penentuan kondisi yang diperlukan agar kontrak bisa optimal, sehingga prosedur penegakannya dapat secara otomatis, dan terutama memfokuskan pada faktor *ex ante* (Menard, 2000). Artinya secara prinsip dapat

ditunjukkan bahwa kontrak lengkap dapat memecahkan masalah 'motivasi' karena dia dapat dispesifikasikan secara tepat tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap pihak untuk setiap kemungkinan keadaan dan mengatur distribusi mengenai biaya dan manfaat dari ketidakpastian (*contingency*) sehingga diharapkan setiap individu menemukan kesepakatan yang optimal untuk bisa tetap mematuhi isi kontrak. Jadi pendekatan ini diimplementasikan untuk memperoleh hasil yang efisien. Jika dirunut berdasarkan analis perspektif idealis, dapat disimpulkan bahwa masalah 'motivasi' meningkat hanya karena beberapa kesepakatan tidak dapat digambarkan pelaksanaan kontraknya (*enforceable contract*) secara lengkap (Milgrom *et al.*, 1992).

Persyaratan yang harus dipenuhi, untuk mencapai dan menetapkan kontrak yang lengkap. *Pertama*, setiap pihak harus meramalkan semua kemungkinan yang relevan yang mungkin penting bagi mereka selama dalam kontrak dan yang mana mereka ingin mengadaptasi tindakan yang dispesifikasikan dan pembayaran secara kontrak. Tambahan lagi, mereka harus dapat menggambarkan kemungkinan-kemungkinan secara akurat sehingga mereka tidak bingung dalam menentukan sebelum kenyataan yang memungkinkan dibicarakan. Kedua, mereka harus menginginkan dan dapat menentukan serta menyetujui tindakan-tindakan yang efisien untuk setiap kemungkinan yang terjadi, dan juga pembayaran yang menyertai tindakan. Ketiga, sekali dia masuk dalam kontrak, dia harus bahagia untuk tinggal didalamnya (Milgrom *et al.*, 1992).

Pendekatan kedua, teori kontrak tidak lengkap mempertimbangkan banyak kontrak yang tidak lengkap, sehingga implementasi dan pelaksanaannya membutuhkan alat-alat untuk mengisi kekosongan dan untuk memaksa kendala eksternal dari pihak-pihak yang ikut dalam kontrak. Kontrak ini penekanannya pada perbedaan antara kondisi *ex ante* dan *ex post*: jika kesepakatan dicapai yang mengijinkan perkembangan aset komplementer, peningkatan keadaan yang tidak

bisa diantisipasi dapat terbuka kemungkinan untuk perilaku oportunis, pembuatan penegakannnya sulit dan mendorong pihak-pihak terhadap penyesuaian dan konflik. Dan dalam proses ini, keterlekatan kelembagaan dari kontrak merupakan issue sentral.

Dunia kontrak digambarkan secara beragam (1) perencanaan (2) perjanjian (3) kompetisi, dan (4) *private ordering*. Yang mana diskripsi ini paling dapat diaplikasikan tergantung pada asumsi perilaku yang berkenaan pada pertukaran dan pada atribut ekonomi barang atau pelayanan yang dimaksud (Williamson, 1985).

Klasifikasi tipologi kontrak secara definitif dan stabil belum dapat diterima secara universal (Macneil, 1974), mengklasifikasikan tipologi kontrak berdasarkan dimensi yang melingkupinya: (1) kontrak klasik (*classical contract*) diimplementasikan ketika keterkaitan antar pihak yang bertransaksi sangat lemah atau tidak ada, hal ini terjadi ketika tingkat spesifikasi aset rendah, sehingga memudahkan untuk menemukan penyelesaian alternatif dan memudahkan memperbaharui artinya membuat kesepakatan mudah diperbaharui dengan biaya sangat rendah: jangka waktu kontrak pendek dan *renewal* (dapat diperbaharui) secara otomatis. Oleh karena itu, variabel kunci untuk koordinasi dan penyesuaian transfer hak; *safeguard clause* menjadi relatif formal dan komplet sehingga memudahkan penegakannya. Hukum kontrak klasik sama dengan bentuk pasar autonomous organisasi. (2) kontrak neoklasik (*neoclassical contract*) dijalankan pada spesifikasi aset yang cukup tinggi untuk menbentuk ketergantungan yang saling menguntungkan antar mitra. Jangka waktu kesepakatan menjadi lebih penting. Ketidaklengkapan tipe kontrak menyebabkan perselisihan sering terjadi dan lebih komplek untuk dipecahkan serta lebih sedikit menggunakan penyelesaian dengan penegakan prosedur secara formal. *Neoclassical contract* adalah tipe kesepakatan organisasi hybrid (*hybrid organizational arrangement*) (3) *forbearance law* (*relational contract*) mengacu pada kesepakatan dengan spesifikasi aset yang tinggi uuntuk menciptakan ketergantungan yang saling

berkaitan dan terjadinya risiko oportunis yang mendorong terhadap integrasi. ”*Fiat*” bahwa kapasitas beberapa agen memberi perintah tentang bagaimana dan kapan tugas sebaiknya dilakukan, menjadi model kunci untuk koordinasi, sehingga subordinasi dan pendorong utama. Kontrak ini terlekat dalam dan dikendalikan oleh sistem hierarki, yang meninggalkan ruang untuk kebebasan menentukan keputusan sehingga kontrak sangat tidak lengkap dan jika dapat diverifikasi semua akan membutuhkan biaya yang tinggi.

Furubotn dan Richter (2001) membedakan teori kontrak atas tiga kelompok: (1) teori kontrak agen (*agency-contract theory*), yang menekankan khususnya dengan masalah informasi asimetri yang dimiliki oleh pihak-pihak yang ikut dalam kontrak (2) kesepakatan yang diselenggarakan sendiri (*self-enforcing agreement*) atau teori kontrak implisit, yang berhubungan dengan kesulitan yang meningkat karena kesepakatan tidak dapat diselenggarakan atau tidak sempurna diselenggarakan (3) kontrak relasi (*relational contract*) atau teori kontrak tidak lengkap, yang memfokuskan pada oportunisme yang disebabkan oleh perbedaan dalam transaksi-investasi spesifik yang dibuat oleh pihak-pihak yang bekerjasama dan kesulitan dilakukan di pengadilan dan pihak ketiga lainnya dalam menghadapi pelaksanaan kewajiban kontrak.

Kontrak relasional dapat dikatakan sebagai kontrak yang tidak mencoba menghitung segala kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, tetapi meskipun begitu kesepakatan jangka panjang didasarkan pada masa yang lalu, sekarang dan ekpektasi yang akan datang dari pihak-pihak yang ikut dalam. Oleh karena itu, kontrak seperti ini mempunyai derajat, implisit, informal dan tidak terikat.

Poin yang paling penting dalam pembagian tipologi ini adalah peran utama dalam kontrak *clause dealing* dengan masalah penegakan (*enforcement*). Kontrak menghubungkan para mitra untuk manfaat yang saling menguntungkan, tetapi

pada waktu yang sama dia juga memunculkan risiko kerugian melalui oportunisme, karena kontrak tidak lengkap atau karena kondisi pada waktu implementasinya berbeda dari waktu negosiasinya, dimana hasil yang menggoda untuk satu atau dua pihak ”*hold up.”*

Keragaman dalam kontrak dipengaruhi oleh empat faktor. *Pertama*, perbedaan jangka waktu (*duration*) kontrak. Dalam kebanyakan studi empiris menunjukkan bahwa jangka waktu sangat berkaitan dengan atribut transaksi. Semakin spesifik investasi, semakin berkelanjutan hubungan masalahnya, dan semakin lama jangka waktu dari kontrak. Oleh karena itu, jangka waktu nampak sebagai signal komitmen partner. Kedua, tingkat kelengkapan (*degree of completeness*) yang melingkupi variabel-variabel pada adaptasi terhadap harga, kualitas, kuantitas, penundaan dan hukuman. Kesulitan utama dalam mempelajari kelengkapan kontrak dan penentuannya karena memerlukan banyak akses terhadap sekumpulan kontrak dengan tujuan mengumpulkan data-data yang relevan. Tingkat kelengkapan dalam kontrak meningkatkan aset spesifikasi dan menurunkan ketidakpastian. Ini menyarankan bahwa ada pertukaran antara keamanan (*security)* dan fleksibilitas. Keamanan diperlukan untuk keterikatan substansi, dan fleksibiliti (*flexibility*), diperlukan untuk perubahan keadaan. Ketiga, Perbedaan insentif. Beberapa mekanisme insentif mencakup *piece-rate system*, gaji tiap jam, pembagian distribusi ke pekerja, pengembalian atas aset yang dibayarkan kepada pemilik, dan sewa yang dibagi antara para mitra yang tergabung dalam proyek, dengan linieritas dan non linieritas sebagai karakteristik utama. Keempat, prosedur penegakan (*enforcement procedures*) (Menard, 2000). Disisi lain, keragaman kontrak menurut Williamson (1993) dicirikan atas tiga variabel yaitu harga, spesifikasi aset dan *clause safeguard*. Dimana harga adalah komponen kunci dari insentif, spesifikasi aset menentukan tingkat kelengkapan dan jangka waktu kontrak, sedangkan *safeguard contractual* berarti penegakan.

**2. Struktur Tata Kelola**

Ada tiga tipe struktur tata kelola (*governance structure)*: transaksi yang tidak spesifik, semi-spesifik, dan sangat spesifik. Pasar adalah struktur tata kelola non spesifik klasik dimana "tidak bertemu muka antara pembeli dan penjual— bertemu untuk saat tertentu untuk pertukaran barang yang distandarisasi pada harga keseimbangan. Sebaliknya dengan struktur yang sangat spesifik dibutuhkan adanya transaksi khusus, sedangkan semi spesifik berada diantara keduanya. Beberapa proposisi yang disarankan (1) transaksi yang tinggi standarisasinya tidak memerlukan struktur tata kelola yang khusus (2) hanya transaksi yang berlangsung berulang-ulang akan membutuhkan struktur tata kelola yang sangat khusus(3) meskipun transaksi jarang dilakukan (*occasionally*) untuk jenis yang tidak distandarisasi yang tidak membutuhkan struktur tata kelola yang khusus, meskipun begitu mereka juga memerlukan perhatian yang khusus. Dalam istilah Macneil ada tiga klasifikasi kontrak, *classical contract* merupakan transaksi yang semuanya distandarisasi (apapun frekuensinya), *relational contract* untuk jenis kontrak yang terjadi berulang-ulang dan tidak distandarisasi, dan *neoclassical contracting* dibutuhkan untuk transaksi yang jarang dilaksanakan dan tidak distandarisasi (Williamson, 1996).

Tipe struktur tata kelola ada empat (lihat Gambar 10.3). *Pertama, market governance* ( tata kelola pasar): *classical contracting*. Tata kelola pasar adalah struktur tata kelola untuk transaksi yang tidak spesifik, yang dilakukan satu kali (*occasionally*) atau berulang-ulang. Pasar merupakan model transaksi ini, karena hanya membutuhkan konsultasi dari pengalaman yang dimilikinya dalam memutuskan untuk melanjutkan hubungan pedagangan atau hanya membutuhkan sedikit biaya transisi dan kesepakatan penjulan-pembelian dianggap mudah dilaksanakan. Atau pendekatan ini, mengandalkan atas impersonal transaksi

melalu pasar yang dapat berfungsi secara baik, dimana identitas dari pihak-pihak yang bertransaksi tidak penting, isi substansi ditentukan oleh referensi syarat-syarat formal dari kontrak, dan menerapkan aturan-aturan hukum— pasar merupakan alternatif utama untuk melindungi setiap pihak terhadap oportunitas (Williamson, 1996).

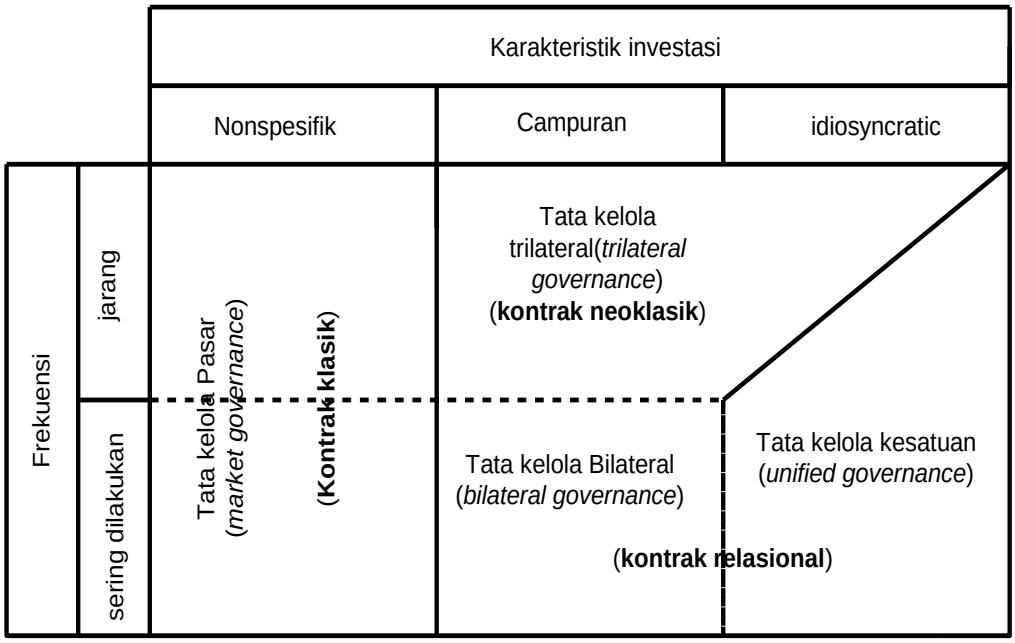


Sumber: Williamson (1996)

Gambar 10. 3. Tata Kelola Efisien

*Kedua, trilateral governance*: *neoclassical contracting*. Digunakan untuk transaksi yang dilakukan hanya satu kali transaksi dengan jenis tipe campuran atau spesifikasi tinggi (*highly idiosyncratic*). Sekali *principal* terikat dalam kontrak, disana ada insentif yang kuat untuk melihat kontrak melalui penyelesaian. Dalam situasi ini, mengandalkan hanya pada pasar tidak akan memuaskan karena biaya substansial diasosiasikan dengan perpindahan dari mitra bisnis. Bantuan pihak

ketiga digunakan untuk membantu menyelesaikan perselisihan dan mengevaluasi performan para pelaku.

*Ketiga, bilateral governance: obligational contracting*. Spesifikasi transaksinya tinggi dimana aset manusia dan aset phisik yang diperlukan untuk produksi secara ekstensif spesifik. Dengan kata lain struktur tata kelolanya spesifik dan transaksinya berlangsung berkali-kali yang didukung oleh investasinya campuran atau jenis yang spesifikasinya tinggi. Hal ini terjadi karena secara alami transaksinya tidak dapat distandarisasi. Dalam kesepakatan bilateral ini, otonomi dari masing-masing mitra dagang ditentukan, dan organisasi independent tidak muncul dalam satu entitas. Oleh karena itu, *relational contracting* merupakan tipe kontrak untuk mencapai penyelesaian yang optimal.

*Keempat, Unified governance*: *internal organization*. Dalam kasus integrasi vertikal yang mana unit-unit individu menyerahkan otonominya dengan tujuan untuk membuat seperti maksimisasi keuntungan bersama yang mengganti dan mengadaptasi untuk perubahan kondisi ekonomi akan berjalan.

### 3. Prosedur Penegakan

Berbagai macam prosedur penegakan dalam kesepakatan kontrak dan kecenderungannya karakteristik prosedur, ditentukan oleh tingkat formalisme dan dan tingkat yang mana mereka dibuat ekplisit, biasanya umumnya tergantung pada tingkat ketidakpastian yang melingkupi transaksi dimana kontrak didesain. Menard (2000) membagi tiga bentuk prosedur penegakan kontrak, yakni: *Self enforcing, credible commitment, dan private ordering*.

Kontrak otomatis (*Self enforcing contract* atau *self enforcing clause* dalam kontrak), dibangun dalam mekanisme dengan karakteristik yang spesifik: (1) implementasinya menggunakan prosedur yang otomatis untuk menyelesaikan dan

mengakhiri tanggungjawab pihak-pihak dalam kontrak (2) struktur *clause* yang digunakan didasarkan pada persetujuan dalam hubungan yang saling menguntungkan antar mitra tanpa menggunakan arbitrary dalam implementasinya dan oleh karena itu, tidak membutuhkan intervensi pihak ketiga (3) selalu berkaitan dengan kontrak lengkap (*completeness*), dimana mempunyai *clause* yang spesifik dalam mengantisipasi situasi yang berbeda atau memiliki *clause* kondisional yang detail yang memasukkan penyesuaian terhadap perubahan situasi pada waktu implementasinya (4) *self enforcing* ini cocok khususnya untuk kondisi lingkungan yang relatif stabil yaitu tidak ada konsekuensi ketidakcocokan antara kondisi *ex ante* dan *ex post* artinya ketidakpastian diantisipasi pada waktu kesepakatan (5) cocok untuk transaksi yang beroperasi melalui pasar.

*Credible commitment* merupakan kontrak yang dilakukan karena adanya risiko yang tinggi untuk terjadinya oportunis, dengan ciri-ciri yang melingkupinya (1) investasi yang dilakukan spesifik sehingga menempatkan pihak-pihak yang bertransaksi dengan risiko tinggi karena kondisi lingkungan yang berubah sehingga membuka kemungkinan terjadinya perilaku opurtunis, sedangkan untuk mengganti pihak yang telah mengikuti kesepakatan dalam transaksi membutuhkan biaya (2) adanya asimetri informasi atau keadaan yang tidak bisa diamati oleh kedua pihak karena investasinya spesifik (3) dalam prosedur penegakan ini memungkinkan pihak ketiga untuk mengintervensi dalam menghalang tindakan pihak-pihak yang tidak mematuhi kesepakatan (4) cocok untuk kondisi relatif tidak stabil (*relative unstable condition*) dengan mekanisme *clause* ada yang formal dan ada sebagian yang informal artinya yang disebut clause formal adalah didesain secara eksplisit perjanjian terhadap perubahan-perubahan yang penting selama implementasi kontrak, sedangkan informal clause kebalikan dari *clause* formal (5) cocok untuk transaksi yang beroperasi melalui bentuk organisasi hybrid atau tipe neoklasik.

*Private ordering*, yang dilakukan minimal ketika dua pihak memutuskan atas prosedur untuk menyelesaikan konflik melalui secara murni menggunakan

peralatan internal (*purely internal device*), sehingga penyelesaian potensi perselisihan misalkan tentang masalah kualitas barang dan jasa tidak menggunakan pihak ketiga. Hierarki merupakan bentuk yang berlaku ketika derajat ketidakpastian dan derajat ketidakpastian aset cukup tinggi sehingga memerlukan integrasi atau tipe *relation*. Ketika ketidakpastian sangat tinggi dan atau pembuatan *safeguard clause* membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk didesain, sehingga prosedur penegakannya menggunakan mekanisme informal atau *tacit* yang dimasukkan dalam kontrak tanpa ada *clause* eksplisit atau formal. Isi kontrak hanya memasukkan kerangka yang umum atau bahkan kesepakatan implisit. Contoh yang dapat disebutkan adalah persetujuan verbal (kata-kata tertentu yang mempunyai kekuatan hukum)-ketika kontrak akan memerlukan banyak waktu dan atau banyak biaya jika ditulis, dan juga karena keputusan harus dibuat secepat mungkin atau karena banyaknya ketidakpastian, apabila dispesifikasikan secara detil.

### 4. Teori Agensi

Hubungan bilateral dapat digambarkan sebagai berikut: salah satu pihak mengkontrak yang lain untuk melaksanakan beberapa kegiatan atau mengambil beberapa tipe keputusan. Dimana *principal* adalah orang yang memberi kontrak (kontraktor), dan orang yang dikontrak disebut agen. Agen dan *principal* ini bisa individual, lembaga, organisasi atau pusat keputusan. Dan biasanya selalu diasumsikan *principal* yang mendesain kontrak dan kemudian menawarkannnya kepada agen. Agen setelah mempelajari isi kontrak, harus memutuskan apakah ditandatangani/disetujui atau tidak. Dan agen akan menerima kontrak *principal* apabila *utilitas* yang diperoleh lebih besar daripada *utilitas* yang agen dapatkan daripada tidak menanda tangani/menyetujui kontrak (Stadler *et al*, 1997).

Situasi yang digambarkan dalam kontrak adalah sebagai berikut (Stadler *et al*, 1997):

(i) *principal* mendesain kontrak/ sekumpulan kontrak, yang dia tawarkan kepada agen

(ii) agen menerima kontrak jika dia sukai, artinya jika kontrak menjamin *utilitas* yang diharapkan lebih besar daripada oportunitas lain yang tersedia padanya

(iii)agen melakukan tindakan atau usaha atas kepentingan *principal*.

Masalah *principal*-agen yang sering terjadi yaitu, meskipun *principal* dapat memonitor tindakan agen, tetapi dalam pengawasan membutuhkan biaya untuk mendapatkan informasi dan itupun tingkat informasi yang diperoleh tidak optimum, sehingga hasil yang ada masih asimetri informasi, misalkan agen tidak dapat diamati secara sempurna oleh *principal* (Douglas, 1995). Atau dengan kata lain esensi dari masalah informasi asimetri adalah pekerja dapat memilih tingkat usahanya, tetapi pemilik tidak dapat mengamati secara sempurna pekerjanya. Pemilik harus mengira-ngira usaha (*effort* dari pekerja) dengan cara mengamati output, dan mendesain rencana insentif yang optimal harus merefleksikan masalah yang dihadapi (Varians, 1993a). Dan fungsi *utilitas principal* adalah output dikurangi biaya pembayaran insentif, dan fungsi *utilitas* agen adalah pembayaran insentif dikurangi biaya tindakannya. Esensinya *principal* ingin memilih fungsi yang dapat memaksimumkan *utilitas*nya dengan kendala perilaku optimum agen.

Keadaan ini, didalam teori dapat dikatakan bahwa *principal* "buta" sebagai pengawas langsung dari agen atau dengan cara lain bahwa *principal* mengetahui informasi yang lengkap tentang agen, karena itu cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut yaitu *principal* dapat mendesain sistem penggajian untuk agen yang dapat mempengaruhi atau menyogok agen untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi *principal* (Furubotn dan Richter, 2000).

Varians (1993b) menyebutkan, bahwa ada dua kendala yang dihadapi *principal* dalam menghadapi agen (1) agen bisa mempunyai oportunitas lain yang

tersedia baginya yang dapat memberi agen beberapa tingkat reservasi *utilitas* (*reservation level of utility*) dan *principal* harus menjamin bahwa agen mendapatkan paling sedikit tingkat reservasi agar mau berpartisipasi. Biasanya ini disebut kendala partisipasi atau kendala rasionalitas individu (2) kompatabilitas insentif: *principal* tidak dapat memilih tindakan agen secara langsung, tetapi hanya dapat mempengaruhi tindakan dengan pilihannya melalui pembayaran insentif.

Beberapa tipe dari model yang muncul ketika terjadi asimetri informasi, yaitu *moral hazard*, *adverse selection* dan *signaling*. Masalah Moral hazard terjadi ketika asimetri informasi meningkat setelah kontrak telah ditanda tangani. Varians (1993a) menyebutkan bahwa *Moral hazard* adalah keadaan dimana salah satu pelaku pasar tidak dapat mengamati tindakan pelaku pasar yang lain. Untuk alasan ini *moral hazard* kadang-kadang disebut sebagai masalah aksi yang tersembunyi (*hidden action problem*).

*Adverse selection* terjadi ketika agen mempunyai informasi pribadi yang relevan sebelum kontak ditanda tangani. Atau dengan kata lain *Adverse selection* adalah suatu keadaan dimana agen tidak dapat mengamati sehingga satu sisi pelaku pasar harus memperkirakan tipe kualitas dari produk didasarkan pada perilaku pelaku lain dari pasar. *Adverse selection* kadang-kadang disebut sebagai masalah informasi yang tersembunyi (*hidden information problem*). Pasar yang *adverse selection* sangat sedikit terjadi transaksi dalam perdagangan. Namun dalam kenyataannya ada institusi sosial yang membantu menyelesaikan inefisiensi pasar tersebut, seperti pemerintah mengeluarkan aturan yang memaksa agar mereka mau melakukan transaksi.

*Signaling* terjadi ketika pihak yang diinformasikan dapat memperoleh informasi pribadi melalui perilaku individual sebelum keputusan diformalkan. *Signaling* mengacu pada kenyataan bahwa ketika terjadi *adverse selection* atau *moral hazard*, beberapa agen akan berkeinginan menginvestasikan dalam

menandakan (sebagai signal) yang akan membedakan mereka dari agen yang lain (Varians, 1993a).

Dua tipe dari *principal* atau agen yaitu *risk averse* dan *risk neutral*. *Risk averse* (penolak risiko) adalah ketika perasaan seseorang yang tidak senang karena kehilangan sejumlah penghasilan tertentu lebih besar daripada kesenangan karena mendapatkan jumlah penghasilan yang sama. Orang yang biasanya penolak risiko, lebih memilih hal yang pasti daripada tingkat konsumsi yang tidak pasti; orang lebih memilih hasil dengan ketidakpastian yang lebih sedikit dan nilai rata-rata yang sama (Samuel dan Nordhaus, 2001). Seorang yang *risk averse* akan mengambil risiko hanya jika pada waktu yang sama mengharapkan tambahan keuntungan yang cukup besar jumlah keuntungan (*utility).* Semakin besar risiko yang dihadapi, maka harus semakin besar keuntungan yang diperoleh dan sebaliknya. Sedangkan *Risk Neutral* adalah individu yang tidak berbeda (*indifferent*) terhadap risiko, baik dia menerima *utilitas* atau tidak menerima atau kita katakan individu yang *risk neutral* adalah individu yang menerima apa adanya (Douglas, 1995).

## 5. Hubungan antara Tipe Kontrak - Struktur Tata Kelola-Prosedur Penegakan

Hasil studi empiris dan teoritis menyebutkan ada ikatan yang kuat antara struktur tatakelola (*governance structure*) yang dianalisis dalam ekonomi biaya transaksi dengan kelas dari kesepakatan kontrak, dan tipe prosedur penegakan (*enforcement procedure*) (Gambar 10.4) Menard (2000) mengungkapkan kalau spesifisitas aset (*asset specificity*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) memainkan

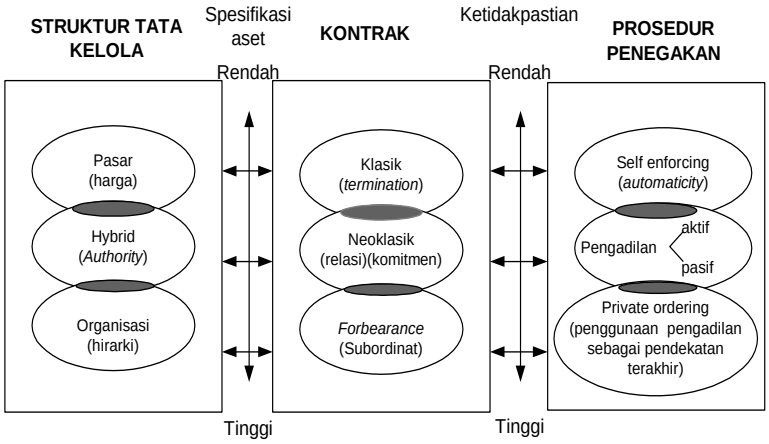


Sumber: Menard (2000)

Gambar 10.4. Hubungan antara Tipe Kontrak-Struktur Tata Kelola-Prosedur Penegakan

peranan dalam menentukan perbedaan ketiganya. Biasanya ada kecenderungan bahwa spesifisitas aset umumnya menentukan struktur tata kelola dan kaitannya dengan kesepakatan kontrak, sedangkan ketidakpastian adalah berpengaruh utama pada hubungan antara kontrak dan kaitannya dengan prosedur penegakan.

## III. BIAYA TRANSAKSI

Williamson (1985) mengemukakan ide dasarnya, bahwa **masalah yang terjadi dalam ekonomi, hukum dan organisasi dapat diselesaikan dengan asumsi bahwa lembaga-lembaga tersebut berorientasi terhadap kondisi yang secara efisien mengurangi biaya transaksi.** Ekonomi biaya transaksi ini, berlainan dengan ekonomi neoklasikal yang menganggap tiap orang dalam aktivitas ekonomi, tidak mengalami hambatan yang berarti dalam lingkungan ekonomi, karena mempunyai informasi yang sempurna (Anwar, 1995) atau bisa dikatakan bahwa **paradigma neoklasik tidak memasukkan hubungan sosial**

**dan struktur sosial** kedalam analisisnya (Damsar, 2003). Padahal biasanya setiap proses pertukaran ekonomi banyak mengalami hambatan informasi karena kecenderungan individu memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan tidak mungkin tahu semua hal. Oleh karena itu, untuk berjalannya sistem ekonomi selalu membutuhkan biaya transaksi.

Artinya, biaya transaksi selalu ada ketidakmampuan melihat apa yang akan terjadi nanti dengan sempurna sehingga ada ketidakpastian dan adanya informasi asimetri, maka masalah kepemilikan mempengaruhi hasil ekonomi, yaitu struktur kepemilikan mempengaruhi insentif. Atau dengan kata lain menyebutkan bahwa alokasi hak kepemilikan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi insentif dan hasil ekonomi, sedangkan performan ekonomi kebanyakan ditentukan oleh struktur insentif (Olson, 1996).

## 1. Konsep dan Definisi Biaya transaksi

Arrow (1969; dalam Williamson 1985:8) mendefinisikan biaya transaksi adalah biaya untuk berjalannya pelaksanaan sistem ekonomi atau *cost of running the economic system***.** Milgrom dan Robert (1992) mengartikan biaya transaksi merupakan biaya untuk berjalannya sistem: biaya koordinasi dan motivasi. Biaya transaksi digambarkan oleh Coase (1998) sebagai "mencari dan biaya informasi, *bargaining* dan biaya keputusan, kebijakan dan biaya penyelenggaraan". Sedangkan Cheung (1998), menyebutkan bahwa biaya transaksi harus didefinisikan semua biaya yang tidak ada dalam ekonomi Robinson Crusoe. Adapun suatu transaksi akan terjadi ketika barang atau jasa dipindahkan melalui teknologi yang dihubungkan secara terpisah (Williamson, 1985).

Biaya transaksi dibedakan atas tipe *ex ante* dan *ex post*. *Ex ante* adalah biaya konsep, negosiasi dan perlindungan suatu persetujuan. *Ex post* meliputi (1) biaya kesalahan adaptasi yang terjadi ketika adanya penyimpangan transaksi dari

kesepakatan kontrak (2) tawar menawar biaya terjadi jika usaha bilateral dibuat untuk mengkoreksi *ex post* yang tidak tepat (*misalignment*) (3) aturan dan biaya menjalankan dikaitkan dengan struktur tata kelola (sering bukan di pengadilan) dimana perselisihan terjadi (4) biaya pengikatan untuk menjamin keamanan komitmen (Williamson, 1985). Atau dengan kata lain biaya transaksi dapat digolong-golongkan kedalam biaya informasi, biaya negosiasi, biaya kontrak dan biaya monitoring atau biaya pelaksanaan (*enforcement cost*). Biaya informasi bersifat *ex ante* sebelum pertukaran terjadi. Biaya negosiasi merupakan biaya-biaya dari pelaksanaan secara fisik dari transaksi yang dilakukan seperti: biaya komisi, biaya-biaya dari pelaksanaan secara fisik tentang isi syarat-syarat perjanjian dalam pertukaran, dan biaya formal dalam merumuskan kontrak—kontrak dalam kegiatan bisnis. Biaya *enforcement* dan biaya monitoring terjadi secara *ex post* kepada suatu transaksi dan ini merupakan biaya untuk meyakinkan bahwa perjanjian yang menyangkut transaksi yaitu seperti standar kualitas atau pengaturan mengenai pembayaran yang mengikat kepada pihak lain dalam transaksi (Anwar, 1995).

Faktor yang kompleks dari biaya *ex ante* dan *ex post* saling berkaitan. Mereka harus ditempatkan secara simultan daripada dalam bentuk rangkaian. Juga biaya dari kedua tipe ini sering sulit dihitung, meskipun begitu bahwa biaya transaksi dapat dinilai dalam perbandingan cara kelembagaannya, yaitu bentuk kontrak diperbandingkan satu sama lain (Williamson, 1985).

North (1987) menyebutkan ada empat variabel yang paling penting menentukan biaya transaksi. Empat variabel tersebut adalah (1) biaya pengukuran nilai barang dan jasa yang dipertukarkan (2) ukuran pasar (3) biaya penyelenggaraan (4) ideologi dan keyakinan atau hukuman (*conviction*). Variabel pertama dikaitkan dengan biaya informasi tentang barang atau jasa dan juga informasi tentang orang yang bertransaksi, kejujurannya, kemampuannya untuk membayar dan kemungkinan bahwa mereka akan menghormati persetujuan.

Variabel kedua berhubungan dengan impersonal pasar: semakin besar pasar, semakin mungkin transaksi terjadi antara orang yang tidak mengetahui satu sama lain dan dua orang mungkin tidak pernah bertransaksi lagi untuk yang akan datang, dan dengan begitu tidak ada pengalaman masa lalu untuk menggambar dan tidak membutuhkan reputasi yang mapan dalam transaksi. Variabel ketiga mengingatkan kita bahwa ketika transaksi menjadi impersonal, seperti mereka lakukan di pasar besar, badan hukum, pengadilan dan kekuatan yang memaksa dari penguasa (*authority*) untuk menyelenggarakan pengadilan menjadi perlu dilaksanakan jika transaksi yang komplek terjadi. Variabel keempat yaitu transaksi akan lebih mudah bahkan di pasar impersonal jika orang-orang yang bertransaksi membagi keyakinan tentang keadilan dan kecocokan sistem sosial dan ekonomi dimana mereka bertindak. North juga menyarankan "spesialisasi dan divisi tenaga kerja memproduksi persepsi yang *divergen* dalam realitas dan hal tersebut merupakan gambaran yang kontras dan konflik yang wajar dan keadilan pengaturan kelembagaan yang dapat meningkatkan biaya transaksi.

Ciri-ciri ekonomi biaya transaksi (1) lebih mikro analisis (2) lebih pada kesadaran diri tentang asumsi perilaku (3) memperkenalkan dan mengembangkan pentingnya ekonomi kekhususan aset (4) lebih mengandalkan perbandingan analisis kelembagaan (5) berhadapan dengan perusahaan bisnis sebagai struktur tata kelola (*governance structure*) daripada fungsi produksi (6) menempatkan penekanan yang lebih besar pada *ex post* lembaga kontrak, dengan penekanan khusus pada *private ordering* (sebagai perbandingan dengan *court ordering*) (Williamson, 1985).

**Tipe biaya transaksi** dapat dibagi atas (1) **biaya koordinasi**. Di bawah sistem pasar, biaya transaksi dihubungkan dengan masalah koordinasi yang meningkat karena kebutuhan untuk menentukan harga atau hal detail lainnya dari transaksi, untuk membuat eksistensi dan lokasi potensial agar pembeli dan penjual bisa mengenal satu sama lain, dan untuk membawa pembeli dan penjual

bertransaksi. Contoh, dalam biaya transaksi pasar, yang dikeluarkan penjual seperti produk penelitian pasar untuk menentukan selera pembeli, dan belanja periklanan dan pemasaran untuk membuat produk atau jasa diketahui (2) **biaya motivasi**. Biaya transaksi yang dikaitkan dengan motivasi ada dua jenis. Tipe pertama adalah dari biaya yang diasosiasikan dengan ketidaklengkapan informasi dan asimetri (*informational incompleteness and asymmetries*)— yaitu situasi dimana pihak-pihak yang berpotensi atau melakukan transaksi aktual tidak mempunyai semua informasi yang relevan yang dibutuhkan untuk menentukan apakah isi dari persetujuan dapat diterima karena persetujuan tersebut saling menguntungkan dan isinya benar-benar dapat mewakili kepentingan pihak-pihak yang bertransaksi. Tipe kedua, biaya transaksi yang dikaitkan dengan masalah motivasi yaitu komitmen yang tidak sempurna (*imperfect commitment*)— ketidakmampuan pihak-pihak untuk mematuhi kesepakatan yang mereka buat sendiri dalam bentuk ancaman atau janji. Dengan kata lain perbedaan bentuk organisasi, kelembagaan dan kesepakatan kontrak yang berbeda menggambarkan perbedaan dalam penyelesaian koordinasi dan motivasi. Masalah ini memberi peningkatan biaya transaksi, yang dimanifestasikan secara berbeda dalam kontek yang berbeda (Milgrom dan Robert, 1992).

## 2. Asumsi Perilaku Manusia dalam Ekonomi Biaya Transaksi

Salah satu asumsi yang penting dalam analisa ekonomi adalah bahwa manusia rasional. Perilaku rasional artinya manusia membuat situasi terbaik bagi dirinya sendiri. Dengan asumsi rasionalitas ini mereka dapat menentukan apa yang ingin dia lakukan pada situasi tertentu untuk memaksimumkan kesejahteraannya. Walaupun begitu perilaku rasional tidak menjamin bahwa hasil yang diperoleh akan optimal (Berg, 2001:). Karena manusia menghadapi (1) **keterbatasan**

**rasionalitas** (*boundedly rational*). Oleh karena keterbatasan rasionalitas seperti dalam menerima informasi dan kemampuan mengolah informasi, artinya individu memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan tidak mungkin tahu semua hal. Perspektif ini muncul karena preferens individu disadari tidak lengkap dan dikendalai oleh perubahan waktu (2) orang-orang kadang-kadang atau seringkali akan menunjukkan kearah **perilaku oportunis** (*opportunistic behaviour*) (Williamson, 1975).

Senada dengan yang dikemukakan Williamson (1985). Menurut paparannya ekonomi biaya transaksi mencirikan manusia secara alami: keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality)* atau diakui sebagai pembatasan kompeten *kognitif*) dan oportunis atau pencarian akan kepentingan diri (*self interest*). Pengertian *bounded rationality* adalah suatu keadaan bahwa kapasitas manusia dalam mengambil pilihan yang diinginkannya, meskipun tujuannya untuk mencapai tingkatan hasil yang optimal, namun karena keterbatasan dalam menentukan keputusan pilihan tersebut dia disebut *bounded* oleh kemampuannya untuk mengolah informasi, maka orang yang bersangkutan memilih keputusannya yang mengarah pada hasil yang tidak optimal (*non optimal outcome*) (Anwar, 1995). Perilaku yang opurtunistik adalah orang yang kesenangannya mencari keuntungan sendiri secara licik (*self interest seeking with guile*) dan suka memberi pernyataan dan sikap yang sulit dipercaya (*self disbelieved statement*), meskipun begitu tidak menganggap semua orang berperilaku oportunis, melainkan hanya mengasumsikan bahwa kadang-kadang orang dapat berperangai oportunis, dan perilaku seperti ini sangat sulit atau tidak mungkin untuk dapat dibedakan secara *ex-ante*. Atau dapat dikatakan, rasionalitas terbatas dari individu mencoba memaksimumkan tetapi untuk mendapatkan itu butuh biaya dan individu tidak dapat untuk mengantisipasi segala ketidakpastian, dan juga menyadari ketidakmampuan untuk menyediakan *ex ante* untuk (hampir tidak bisa dielakkan) waktu *ex post* ketika *contingency* yang tidak terlihat akan meningkat.

Fernandez (2000) menyebutkan, bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan rasionalitas dan perilaku oportunis tetapi juga ”*intersubjective mental models*”. Mental model ini didefinisikan sebagai cara dimana pelaku-pelaku yang bersangkutan dan publik dalam ”melihat” masalah. Model ini sebagian diwarisi dari kebudayaan, sebagian dipelajari dan sebagian diturunkan dari pengalaman. Sedangkan Schramm (2000) menyebutkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh keterbatasan rasionalitas, perilaku oportunis dan *atmosphere* (*atmosphere* didefinisikan sebagai tambahan yang diinginkan individu bukan berupa uang dalam penghitungan maksimisasi) atau—atau keterlekatan sosial (*social embeddedness*).

Perilaku oportunis dikurangi oleh adanya lembaga, yang mempunyai aturan-aturan formal, konvensi, kode informal perilaku: dimana ‘lembaga mendefinisikan dan membatasi kumpulan pilihan individu (North, 1990). Adanya aturan ini, dan hukuman untuk menghalangi, kendala perilaku orang yang bertransaksi pasar dan hal tersebut dapat mengurangi tindakan oportunis.

### 3. Dimensi Biaya Transaksi

Wlliamson (1991) mengidentifikasi tiga dimensi kritis pemilihan untuk mengurangi biaya transaksi dalam pengaturan kontrak: **ketidakpastian** atau *uncertainty* (contoh, yang mempengaruhi kuantitas, kualitas atau harga), **kekhususan aset** atau *asset specificity*, dan frekuensi (transaksi terjadi berulang-ulang). Ketidakpastian (dihubungkan dengan kekurangan informasi, terikat rasionalitas, dan scope oportunitas oleh pihak-pihak lain yang bertransaksi) adalah elemen utama yang mempengaruhi biaya pengumpulan informasi dan risiko. Ketidakpastian dan kekhususan aset adalah kunci utama pengaturan kontrak.

*Asset specificity* dari suatu transaksi pertukaran diartikan sebagai derajat spesifikasi dari transaksi ekonomi yang memerlukan dukungan aset yang mampu menyertai transaksi agar pertukaran ekonomi tersebut dapat berjalan baik. Suatu aset disebut mempunyai spesifikasi khusus, jika aset (*physical*) tersebut tidak dapat dipindahkan atau diganti dengan mudah kepada penggunaan alternatif yang lain, tanpa mengurangi nilai produktivitas dari aset yang bersangkutan. *Asset specificity* ini dapat berbentuk *material asset* atau *human asset*. (Anwar, 1995).

**4. Determinan Biaya Transaksi**

Beckman, 2000; dalam Yustika (2006) menyebutkan bahwa ada empat determinan biaya transaksi: (Lihat Gambar 10.5)

1. Atribut perilaku yang melekat pada setiap pelaku ekonomi (*behavioral attributes of actor*), mencakup rasionalitas terbatas dan oportunisme
2. Atribut transaksi (*attributes of transactions*) yaitu spesifisitas aset, ketidakpasatian dan frekuensi
3. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi (*governance structure*), yaitu pasar, hibrid, hierarki, dan pengadilan, regulasi, birokrasi publik
4. Faktor yang berdekatan dengan aspek lingkungan kelembagaan (*institutional environment*), yaitu hukum kepemilikan, kontrak, dan budaya.

Dalam praktiknya, keempat determinan tersebut dapat diturunkan menjadi variabel-variabel yang dapat menuntun setiap peneliti untuk melakukan pengukuran (*measurement*). Sayangnya, tetap saja tidak mudah untuk melakukan pengukuran tersebut, meskipun variabel-variabel telah jelas. Namun, seperti yang dinyatakan Williamson, meskipun dibutuhkan deskripsi yang lebih rinci ketimbang yang dilakukan neoklasik, penilaian/ pengukuran yang relatif kasar (*crude assestment*) saja sudah cukup (Yustika, 2006).

Untuk memudahkan menderivasi determinan tersebut kedalam pengukuran biaya transaksi, akan dikutip kembali sebagian pustaka yang telah panjang lebar disebutkan sebelumnya. Pemaparan ini memang terkesan menyederhanakan kompleksitas kelembagaan, meskipun begitu setidak-tidaknya terlihat jelas kaitan determinan tersebut dengan biaya transaksi.

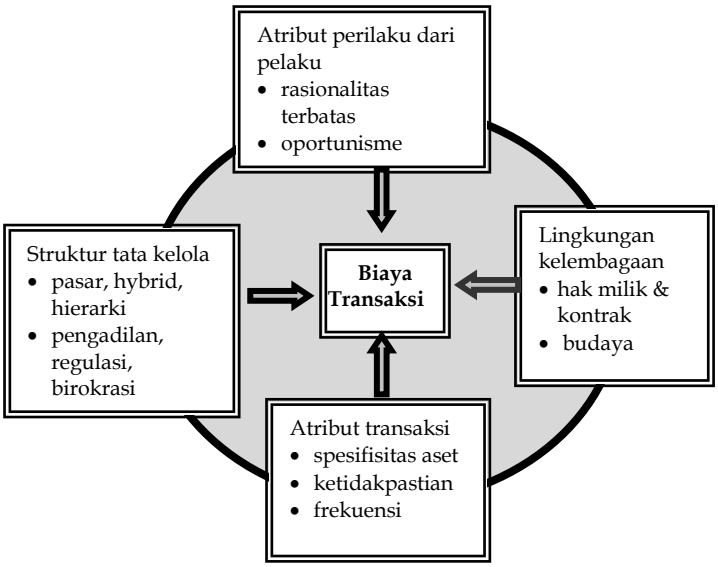


Sumber: Beckman, 2000; dalam Yustika (2006)

Gambar 10. 5. Determinan Biaya Transaksi

Atribut perilaku dari pelaku terdiri atas rasionalitas terbatas dan oportunisme. Rasionalitas terbatas artinya individu memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan tidak mungkin tahu terhadap semua hal. Perspektif ini muncul karena preferensi individu disadari tidak lengkap dan dikendalai oleh perubahan waktu (Furubotn dan Richter, 2000). Contoh dalam teori agensi



Sumber: Yustika (2006), yang diolah berdasarkan konseptualisme Beckmann (2004)

terjadinya asimetri informasi antara *principal*-agen. Meskipun *principal* dapat memonitor tindakan agen, tetapi dalam pengawasan membutuhkan biaya untuk mendapatkan informasi, dan itupun tingkat informasi yang diperoleh tidak optimum, sehingga hasil yang ada masih asimetri informasi (Douglas, 1995). Perilaku yang oportunis adalah orang yang kesenangannya mencari keuntungan sendiri secara licik dan suka memberi pernyataan dan sikap yang sulit dipercaya dan perilaku seperti ini sangat sulit dibedakan pada saat *ex-ante* (Williamson, 1985). Artinya aktor ekonomi tidak jujur dan ini memberi konsekuensi biaya yang tinggi untuk pengawasan agar mereka mematuhi kesepakatan kontrak.

Lingkungan kelembagaan yang mencakup hak kepemilikan, kontrak, dan budaya. Alokasi hak kepemilikan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi insentif dan hasil ekonomi (Berg, 2001), sedangkan kontrak didesain dengan cara bagaimana agen mempunyai insentif yang cukup untuk mendorong perilaku dalam kepentingan *principal* dan hukuman yang diberikan untuk menjaga mereka tetap pada kesepakatan (Turvani, 1998). Intinya kontrak dan hak kepemilikan untuk melindungi orang-orang dengan insentif yang sepantasnya.

Kunio (2000) mendefinisikan budaya dalam pengertian secara luas adalah cara berpikir suatu masyarakat dan aturan yang ada didalamnya, dimana aturan-aturan tersebut mempengaruhi kelembagaan. Untuk lebih memudahkan, salah satu aplikasinya adalah modal sosial. Modal sosial cakupannya norma, kepercayaan dan jaringan yang memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan. Dalam transaksi yang dimediasi modal sosial akan mempunyai pengaruh menguntungkan dan juga bisa merugikan. Efek positif modal sosial adalah: (1) sebagai sumber kontrol sosial (2) sebagai sumber dukungan keluarga (3) sebagai sumber manfaat melalui jaringan ekstra familial. Sedangkan kerugian aktual modal sosial terhadap biaya transaksi jika ada pembatasan akses oportunitas, pembatasan kebebasan individu, klaim yang berlebihan terhadap kelompok, norma yang cakupannya menyempit (Portes, 1998).

Atribut transaksi meliputi spesifikasi aset, ketidakpastian dan frekuensi. Semakin spesifik suatu aset dan semakin tinggi ketidakpastian akan membutuhkan kesepakatan yang lebih kompleks karena harus menspesifikasi kontrak yang diharapkan setiap pihak. Untuk frekuensi transaksi yang dilakukan berulang–ulang dan dengan durasi yang lama membutuhkan mekanisme khusus untuk mengurangi biaya transaksi (Milgrom dan Robert, 1992).

## IV. MODAL SOSIAL

Sejarah persoalan ekonomi tidak hanya menyangkut ekonomi *an sich* tetapi ia berkait dan melekat pada institusi-institusi lain dari masyarakat seperti agama, pemerintah, dan budaya. Dengan kata lain persoalan ekonomi haruslah mempertimbangkan institusi-institusi tersebut untuk dapat memperlancar atau menghambat aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (Damsar, 2002). Seperti yang diungkapkan oleh Lapavitsas dan Fine (2004) bahwa pembangunan (*development*) tidak lagi hanya masalah perubahan hubungan ekonomi tetapi juga perubahan norma non–ekonomi dan kelembagaan yang melingkupi ekonomi. Dari runutan ini dapat digarisbawahi bahwa konteks ekonomi tidak dapat dielakkan kaitannya dengan bidang ilmu sosial dan politik. Adapun salah satu kajiannya dari gabungan ketiga bidang ilmu ini adalah teori modal sosial yang pengejewantahannya dalam bentuk kepercayaan, norma dan jaringan.

### 1. Definisi Modal Sosial

"*It's not what you know, it's who you know*" (bukan apa yang kamu ketahui tetapi siapa yang kamu ketahui) ini adalah ungkapan yang umum banyak ditemukan dalam kebijaksanaan konvensional tentang modal sosial (Woolcock dan

Narayan, 2000). Kata-kata bijak ini muncul dari ide dasar modal sosial yang menekankan pada keluarga, teman dan asosiasi sebagai aset yang penting untuk memperoleh kepentingan yang diinginkannya dan pengaruh untuk mendapatkan tambahan materi, — biasanya untuk individu, bahkan juga untuk pegangan kelompok — artinya ikatan sosial dapat menjadikan sebagai kewajiban dan juga sebagai aset. Atau dengan kata lain menggunakan istilah Lapavitsas dan fine (2004), bahwa konsep modal sosial menyisakan anggapan bahwa koneksi antar personal dapat berpengaruh baik untuk memperoleh tujuan hasil ekonomi yang tertentu.

Modal sosial adalah konsep yang rancu dan banyak definisinya. Untuk merangkum banyaknya pendapat tentang modal sosial dapat dilihat pada Tabel 10.3. Dari Tabel tersebut dapat ditarik benang merah bahwa modal sosial dapat didefinisikan sebagai norma, kepercayaan dan jaringan yang terlekat dalam struktur sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan.

Tabel 10.3. Definisi, Indikator, Persyaratan dan Pengaruh Modal Sosial Terhadap Biaya Transaksi

| Modal sosial | Portes, (1998) | Putnam, *et al*. (1993; dalam Wallis *et al.*, 2004) | Minten dan Fafcha ms (1999) | Fukuyama (2002; Fukuyama, dalam Ancok, 2005) |
|---|---|---|---|---|
| Definisi | Kemamp uan para pelaku untuk | Corak organisasi so-sial, yang dapat | sebagai jumlah dan tipe hubung | Serangkaian nilai/norma informal yang dimilki bersa-ma di antara para anggota suatu kelom-pok |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | mempero leh manfaat melalui keanggot a-an dalam jaringan atau struktur sosial lain | memperba iki efisiensi dengan memfasilit asi tindakan-tindakan koordinasi . | an yang digunak an oleh pedaga ng-pedaga ng untuk tujuan bisnisn ya | masya-rakat yang memungkin-kan kerjasama |
| Cakupa n/ Indikat or | Jaringan | Norma, kepercaya an, jaringan | Hubung an sosial/j ari-ngan | Norma, kepercayaan, jaringan |
| Persyar atan | Struktur sosial | Organisasi sosial | Hubung an sosial | Kehidupan sosial |
| Pengaru hnya terhadap biaya transaksi | Mengurangi biaya transaksi → meningkatkan pertumbuhan ekonomi | | | |
| | Meningk atkan biaya transaksi | | | |

Dari banyak definisi di atas dapat dikatakan bahwa modal sosial mempunyai arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Tidak ada konsensus atas sumber asalnya dan proses pembentukannya. Meskipun begitu ada kesadaran yang muncul tentang pentingnya peranan modal sosial dalam pembangunan (Dhesi, 2000). Namun perlu digaris bawahi bahwa untuk memiliki modal sosial maka harus ada interaksi sosial. Sehingga untuk membingkai banyaknya definisi modal sosial ini, Lin (2002) mendefinisikan modal sosial dalam bentuk yang agak sederhana dan secara langsung: *Investment in social relations with expected return in the marketplace*.

Menurut Coleman, 1990; dalam Lapavitsas dan Fine (2004) percaya bahwa pilihan rasional adalah persyaratan yang fundamental bagi analisis sosiologi. Meskipun begitu validitas rasionalitas ekonomi diterima, tetapi juga dikondisikan oleh spesifikasi konteks sosial dalam mana keputuasan dibuat karena modal sosial mengacu pada sumber "struktur sosial" yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat dan beroperasi sebagai modal untuk individu dalam artian bahwa mereka dapat memfasilitasi tindakan rasional individu. Dengan kata lain modal sosial sebagai sumberdaya terlekat dalam struktur sosial yang diakses atau dimobilisasi dalam tujuan tindakan. Dan untuk itu perlu tiga komponen yang harus ada untuk analisis: sumberdaya, terlekat dalam struktur sosial dan tindakan (Lin, 2002).

Berdasarkan perspektifnya, modal sosial adalah barang publik sehingga dapat membentuk tindakan agen-agen individu dan juga mempengaruhi pembentukan agen-agen kolektif dan tindakan yang dimilikinya. sumber "struktur sosial" (struktur adalah aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya, yang terlibat dalam artikulasi *institusional* sistem sosial (Giddens, 1984), sedangkan bentuk-bentuk struktural yang dimiliki masyarakat seperti, kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan, dengan suatu derajat dinamika tertentu yang menyebabkanpola-pola perilaku yang berbeda, yang

tergantung pada masing-masing situasi yang dihadapi. (Soekanto, 2005)) yang berdasarkan modal sosial biasanya tergantung pada jumlah 'norma yang diinternalisasi' (*internalized norms*) yang membantu tindakan individu terhadap kepentingan kolektif, pembentukan ini merupakan dasar dari tindakan kolektif. Tipikal 'norma yang dinternalisasi' adalah kepercayaan dan keyakinan hubungan yang saling menguntungkan antar agen–agen ekonomi (pribadi dan publik). Masyarakat dengan kumpulan substansi modal sosial diperkirakan menyebar keseluruh bagian oleh iklim kepercayaan, keyakinan, dapat diandalkan, dan kewajiban moral antar anggota-anggotanya. Konsekuensinya, individu dapat mengambil keputusan ekonomi yang berpadu dengan kepentingan kolektif. Dengan kata lain pendekatan Coleman mempunyai dua atribut, fungsionalis dan pilihan rasional.

Modal sosial sebagian besar diwariskan dari generasi ke generasi. Ini berarti memasukkan dari waktu ke waktu melalui interaksi yang mengijinkan untuk membangun kepercayaan dan norma. Seperti semua bentuk lain dari modal, modal sosial memerlukan waktu dan energi dalam penciptaannya. (Dhesi, 2000).

## 2. Sumber Modal Sosial dan Dampaknya: Positif *vs* Negatif

Putnam (1993, dalam Ancok 2005) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi dengan kehadiran modal sosial. Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan baik apabila ciri-ciri berikut ini dimiliki oleh masyarakat: (1) hadirnya hubungan yang erat antar anggota masyarakat (2) adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarkat bukan sebagai penguasa: adanya rasa saling percaya dan kerjasama di antara unsur masyarakat.

Efek modal sosial bisa positif dan bisa negatif (Lapavitsas dan Fine, 2004). Fungsi dasar dari modal sosial (efek positif), dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks (1) sebagai sumber kontrol sosial (2) sebagai sumber dukungan keluarga (3) sebagai sumber manfaat melalui jaringan ekstra *familial*. Lin (2002) menyebutkan, bahwa sumber daya yang terlekat dalam jaringan sosial dapat meningkatkan hasil pada tindakan, karena dapat (1) memfasilitasi aliran informasi. Biasanya situasi pasar tidak sempurna, ikatan sosial menempatkan di lokasi strategis tertentu dan atau posisi hierarki yang dapat menyediakan informasi yang berguna tentang pilihan dan kesempatan pada individu (2) ikatan sosial mempengaruhi agen-agen yang memainkan peranan kritis dalam keputusan atau memberi bobot tertentu dalam proses pembuatan keputusan mengenai individu (3) ikatan sosial dan hubungan yang diakuinya pada individu dapat dianggap oleh organisasi atau oleh agennya sebagai sertifikat dari kepercayaan sosial individu, yang bisa merefleksikan kemampuan akses individu melalui jaringan sosial dan hubungan—modal sosialnya (4) ikatan sosial diharapkan dapat memperkuaat identitas dan pengakuan. Jadi empat elemen ini yaitu informasi (*information*), pengaruh (*influence*), kepercayaan sosial (*social credentials*) dan penguatan kembali (*reinforcements*) yang dapat memperkuat pencapaian tindakan.

Sedangkan empat konsekuensi negatif dari modal sosial yaitu (1) eksklusif (*exclusive*) dari orang luar artinya hubungan sosial akan terbentuk solidaritas yang terbatas dan kepercayaan dan hal ini mempunyai konsekuensi pada upaya mempermudah dan efisiensi pada pertukaran ekonomi antar anggota komunitas namun secara implisit membatasi orang luar (2) ekses tuntutan atas anggota kelompok, pembatasan kebebasan individu, penurunan tingkat norma (Portes, 1998). Yang ditegaskan oleh Streeten (2002) bahwa jaringan dan interaksi sosial dapat menyebabkan sifat yang cenderung melanggar hukum (*illegitimacy*), penyuapan, korupsi, nepotisme, kroniisme, dan kejahatan.

## V. PERTANYAAN DAN MASALAH

1. Apakah yang dimaksud kelembagaan dan berilah contohnya?
2. Apa persamaan dan perbedaan ekonomi kelembagan tradisional dan ekonomi kelembagaan baru?
3. Ekonomi kelembagaan baru beroperasi pada dua level, yaitu makro dan mikro, Jelaskan?
4. Apakah persamaan dan perbedaan antara ekonomi klasik/neoklasik dengan ekonomi kelembagaan?
5. Kelembagaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi?
6. Kebijakan pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menghambat pengembangan ekonomi. Bagaimana itu bisa terjadi
7. Sebutkan dan terangkan dimensi biaya transaksi

## VI. DISKUSI

1. Ekonomi klasik/neoklasik memiliki cacat bawaan dalam menganalisis permasalahan ekonomi. Jelaskan secara seksama pernyataan ini
2. Kelembagaan yang efisien dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jelaskan persyaratan yang harus dilaksanakan agar kelembagaan suatu organisasi/negara bisa efisien
3. Apa yang dimaksud biaya transaksi dan kaitannya dengan organisasi

**referensi**

1. http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/kebijakan-moneter-derfinisi-dan.html
2. http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya
3. http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya
4. ^http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/

# BAB XIV

# PENGUATAN KELEMBAGAAN DI PEDESAAN DALAM UPAYA MENGURANGI KEMISKINAN
## (Studi Kasus Lembaga Pesantren di Kabupaten Pamekasan)

## I. LEMBAGA, PEDESAAN, DAN KEMISKINAN

Lembaga-lembaga dalam masyarakat desa ada yang bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dalam maupun dari luar masyarakat desa (Mubyarto, 1995). Biasanya lembaga lokal yang didirikan masyarakat pada prinsipnya akan berjalan secara optimal apabila memenuhi empat hal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yaitu sistem norma, kelakuan berpola, personil pendukung dan fasilitas pendukung (Setyaningsih dan Partini, 2003). Menurut Hanani *et al.* (2003), pemerintah berperan penting dalam mengembangkan kelembagaan dalam masyarakat pedesaan. Dan lembaga ini mencakup warga komunitas, pemerintah dan badan sosial atau ekonomi yang terkait dalam pembangunan pedesaan guna mengentas kemiskinan.

Dengan adanya lembaga lokal, maka ada solidaritas yang dalam sosiologi disebut *we are feeling a group*, perasaan "ke kitaan", perasaan yang membawa seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok (Rahadjo, 1999). Oleh sebab itu,

---

[1] Bab ini dikutip dari hasil penelitian penulis. Pertama, analisis modal sosial dan biaya transaksi pengembangan agribisnis di pesantren. Disertasi. Kedua, pemberdayaan kelembagaan ekonomi pesantren dan strategi pengembangannya di Kabupaten Pamekasan.

dengan dibentuknya sebuah lembaga lokal mempunyai fungsi mendorong terjadinya suatu perubahan sosial yang memungkinkan orang yang dulunya tidak berdaya akan semakin berdaya (Setyaningsih dan Partini, 2003). Dan seseorang atau sebuah keluarga yang miskin acapkali mampu tetap *survive* dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan (Suyanto, 1996). Ditegaskan oleh Hanani *et al*. (2003), bahwa fungsi-fungsi pokok lembaga sosial ekonomi di pedesaan (1) pengatur pola hubungan kerja antara para pelaku ekonomi pedesaan, baik antara kelompok-kelompok anggota komunitas, maupun dengan komunitas lainnya (2) menghimpun kekuatan untuk memobilisasi sumberdaya secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan ekonomi (3) pengatur arus informasi pembangunan (4) permusyawaratan pembangunan sosial ekonomi pedesaan (5) memberikan pedoman umum kepada warga komunitas tentang pola aktivitas sosial ekonomi yang lebih baik.

Pranadji (2003) mengungkapkan, sistem kelembagaan (ekonomi) suatu masyarakat jika dibiarkan rapuh, maka program pengembangan teknologi, inovasi dan investasi apapun tidak akan mampu menjadi mesin penggerak kemajuan ekonomi yang tangguh, karena kemajuan perkonomian suatu masyarakat, termasuk pedesaan, banyak ditentukan oleh faktor *non-productive resourches*, terutama sistem kelembagaan yang dikembangkan dalam masyarakat tersebut. Ada semacam anggapan yang meluas bahwa tidak majunya masyarakat pedesaan disebabkan oleh "kematian" budayanya. Ini semua terjadi terutama disebabkan oleh ketidaktepatan pendekatan (perekayasaan) yang digunakan selama ini atau sebelumnya.

Selain itu, dia menyebutkan bahwa kelembagaan pemerintahan atau politik, komunal dan ekonomi pasar pada dasarnya bisa saling diintegrasikan hingga terbentuk model transformasi tunggal, karena elemen yang mengisi ketiga kelembagaan pedesaan tidaklah berbeda. Oleh karena itu, kelembagaan pemerintah harus diberdayakan untuk bersama-sama dengan kelembagaan komunal menyusun

kembali tatanan ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan.

Adapun usaha yang penting dari para perencana pembangunan masyarakat desa adalah untuk selalu mengembangkan kepentingan-kepentingan lokal, yang dapat mengembangkan lapangan-lapangan sosial dengan ruang lingkup lokal (Koentjaraningrat, 1984). Ada lima elemen sosio-budaya utama yang harus dikembangkan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan, yaitu: kompetensi SDM, kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian (dan manajemen) usaha tingkat desa dan struktur sosial (Pranadji, 2004).

Kondisi ekonomi masyarakat pedesaan, yang umumnya masih mengandalkan pertanian sebagai tulang punggungnya, dewasa ini bisa dikatakan semakin menyedihkan dan tanpa langkah-langkah strategis dan terencana dari pemerintah diperkirakan dalam satu atau dua dekade mendatang keseluruhan perekonomian masyarakat pertanian dan pedesaan Indonesia, yang diidealkan berbasis kerakyatan, akan mengalami kemunduran yang semakin parah. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal itu, antara lain: daya dukung yang semakin menurun, prasarana dan kelembagaan ekonomi yang terbelakang, sumberdaya manusia yang tidak tergarap dengan baik, tata nilai yang belum sepenuhnya mencerminkan daya saing yang bisa diandalkan, dan organisasinya petani yang tidak berkembang sehat. Gejala yang menarik untuk dikemukakan bahwa saat ini hampir tidak ada organisasi (ekonomi) petani mampu bertahan hidup dan mampu mengembangkan diri dengan baik atau dapat dikatakan bahwa organisasi petani di pedesaan relatif rapuh. Kerapuhan ini diperkirakan menjadi salah satu sebab serius mengapa kehidupan dan perekonomian masyarakat pedesaan semakin terbelakang dan berkubang dengan kemiskinan (Pranadji dan Hastuti, 2004).

## II. POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN

Potensi yang terlekat pada pesantren dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi ada empat. *Pertama*, aspek norma merupakan potensi paling tinggi yang memberikan motivasi bagi para santri, ustad, masyarakat dan kiai untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi. *Kedua*, jumlah santri mencapai ribuan, sehingga ini merupakan peluang ketersediaan tenaga kerja. *Ketiga*, santri sebagai hasil didikan pesantren minimal sudah dibekali pendidikan yang memudahkan mereka untuk menyerap inovasi yang diintrodusir oleh pemerintah. *Keempat*, kecenderungan gampang terbentuk kemitraan antara pesantren dengan masyarakat, sehingga memudahkan pemerintah dalam proses pengawasan dan pencapaian tujuan program pemerintah.

Dalam perjalanannya kegiatan ekonomi pesantren tidak terlepas dari masalah yang melingkupinya, tentu saja ini dapat menghambat untuk lebih berkiprah dalam pengembangan ekonomi. *Pertama*, SDM (sumber daya manusia) merupakan penghalang paling utama karena disadari bahwa penekanan selama kurun waktu awal sampai sekarang dari keberadaan pesantren, jenjang pendidikan lebih dekat kepada keagamaan, sedangkan hal-hal yang menyangkut masa depan jarang dilaksanakan.

*Kedua*, pengaruh kiai sangat kuat dalam manajeman kegiatan ekonomi pesantren. Pola manajeman yang digunakan kebanyakan pola manajeman lama atau dikatakan pola manajeman *salaf*, yang mendasarkan semua keputusan ditangan kiai, dan pengurus hanya *sami'na wa ata'na*. Biasanya kiai dan *lora* (putra kiai) selain sebagai dewan pengasuh, juga merangkap sebagai pengurus dalam kegiatan ekonomi. Kondisi seperti ini, sering kali menutup kesempatan pengurus non keluarga pengasuh untuk bisa kreatif dan bekerja optimal, karena tradisi di pesantren seorang santri atau ustad tidak akan berani mengkritik mereka.

Sungguhpun begitu, *Alhamdulillah* beberapa tahun terakhir ini, sudah ada beberapa pesantren yang mendelegasikan penanganan ekonomi kepada pengurus non keluarga kiai seperti ustad atau santri/wali santri kepercayaan, sehingga berangsur-angsur memberi nuansa berkembangnya kreatifitas.

Masalah *ketiga*, jaringan kerja terutama pemasaran masih terkesan tradisional. Hasil-hasil dari pertanian, peternakan masih mengalami fluktuasi harga yang tidak menentu, karena masih belum adanya agen atau kontrak yang menjamin pemasaran produknya. *Keempat*, permodalan terbatas. Rasanya kesulitan bagi pesantren dapat mengembangkan ekonominya tanpa dikawal oleh pemerintah. Tapi tidak berarti pemerintah dengan serta merta membagi-bagikan uang tanpa dibarengi pembinaan dan pengawasan bantuan. *Kelima*, jalan sebagai mata rantai transportasi juga ikut menyumbang kesulitan ruang gerak ekonomi pesantren.

**Bantuan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Kabupaten Pamekasan**

**Program-program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi pesantren diantara (1) kementerian Koperasi dan UKM menggelontorkan program KUKP melalui koperasi pesantren (koppontren) dalam bentuk dana bergulir konvensional, dana bergulir syariah dan dana pengembangan koperasi (2) modal usaha agribisnis yang ditransfer langsung ke rekening ketua kelompok yang dibentuk pesantren, dengan pola bantuan pinjaman langsung masyarakat (3) bantuan lainnya yang secara insidental sesuai dengan kebutuhan yang bisa dikembangkan pesantren (4) usaha-usaha pelatihan: pengelolaan pertanian, batik, kerajinan, dan manajeman pengelolaan koperasi dan (5) bantuan peralatan.**

Bentuk Keterlibatan Pesantren dalam Kegiatan Ekonomi

Adapun bentuk keterlibatan pesantren dalam kegiatan ekonomi saat ini: *pertama*, menjadi fasilitator program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Sebagai salah satu contoh dapat di lihat pada pelaksanaan program pengembangan agribisnis peternakan bantuan pinjaman langsung masyarakat dalam bentuk program pengembangan sapi potong. *Kedua*, program kemandirian ekonomi pesantren (1) koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dalam model *baitul maal wa tamwil* (BMT) (2) koperasi pertokoan (3) usaha kecil seperti mebel dan batik tulis (4) dapur umum santri (5) pengolahan: pabrik tahu dan pabrik es (6) pelayanan jasa. *Ketiga*, keterlibatan secara tidak langsung, melalui pengajian, dakwah, dan bulletin. Dengan cara memasukkan unsur-unsur pemberdayaan ekonomi dan. *Kempat*, kursus-kursus keterampilan-wirausaha.

## III. PESANTREN, PEMBANGUNAN, DAN KEMISKINAN

Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai islami. Berdasarkan data statistik tahun 2003, jumlahnya di Indonesia mencapai 14.067 (Depag, 2004), dengan 30.000 kiai dan 3,1 juta santri (Kompas, 2004). Tahun 2005 meningkat sekitar 17.000 pesantren (Ridwan, 2005).

Keberadaan lembaga pesantren tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menunjukkan keterlibatannya dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat (Ghazali, 2001). Sementara, bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial pesantren, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga pesantren dan masyarakat. Dengan kata lain, **pesantren harus mandiri dan bisa membantu persoalan-persoalan ekonomi masyarakat, serta keberadaannya tidak boleh membebani umat tetapi memberi kemaslahatan bagi umat.**

Tugas mulia pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendapat sambutan dan bantuan pemerintah. Bantuan itu, secara yuridis dipicu terbitnya surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Tahun 1991 tentang pengembangan agribisnis di pesantren. Pada Tahun anggaran 1997/1998, Departemen Koperasi melaksanakan Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) (Syahyuti, 1999; Depag, 2004). Tahun 2006 Kepmenkop menyalurkan P3KUM (program pembiayaan produktif koperasi usaha mikro) (Bisnis Indonesia, 2007), sedangkan Deptan melanjutkan program pengembangan agribisnis (Deptan, 2006).

Kebijakan pemerintah tersebut telah cukup lama dilaksanakan. Ziemek (1986) menyebutkan penyaluran bantuan pemerintah sudah dimulai sekitar tahun 1973. Meskipun begitu, penyelenggaraan programnya banyak mengalami hambatan (Depag, 2004). Hal ini di karenakan perhatian pesantren masih cukup rendah dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut sangat kentara dari potret yang membingkai ekonomi masyarakat di sekitar pesantren, di mana kantong-kantong kemiskinan cukup terlihat jelas. Keadaan ini pun diperparah dengan benturan ketersediaan tenaga kerja para lulusan pesantren, yang disebabkan ketertinggalan di bidang pendidikan umum yang dihadapi anak-anak keluarga pesantren (Tohari, 2007). Data statistik menyebutkan hanya 10 persen santri yang lulus menjadi kiai, pegawai negeri, dan guru (Bisnis Indonesia, 2006). Di tambah lagi, ketertinggalan dalam mengakses jalur ekonomi, sehingga pesantren kesulitan menutupi biaya operasionalnya (Tohari, 2007).

Menurut Hidayat *et al.* (1995), konsep sistem kelembagaan pesantren produktif, dalam kaitannya dengan fenomena kemiskinan di perdesaan dapat dilihat dalam Gambar 6.1.

Dari aspek historis pesantren selalu terikat dengan nilai-nilai keislaman dan keaslian (*indigenous*) corak Indonesia. Dan sampai saat ini dianggap sebagai suatu

*sub culture* yang unik, dengan cakupan ciri-ciri yang melekat: (1) orientasi kuat terhadap kiai (Luqman, 2003; Aldi *et al*., 2002). Dalam tradisi pesantren, guru dianggap sebagai penyalur barokah dan tercerminnya kepatuhan absolut kepada seorang guru (Dhofier, 1982) (2) sifat tertutup dan solidaritas yang tinggi antara sesama pesantren (Wahid, 1988) (3) wawasan terbatas, spesialisasi tidak berkembang (Billah, 1985) (4) kedudukan terpenting dalam tata nilainya adalah pencapaian penerimaan di sisi Allah (Wahid, 1988) (5) masyarakat lingkungannya umumnya di pedesaan dengan pengikut utama adalah kaum petani dan pedagang (Rahardjo, 1988) (6) watak pribadi seperti kemandirian, kesederhanaan dan kesetiakawanan (Billah, 1985) (7) jaringannya cukup solid (Farchan dan Syarifudin, 2005). Karakteristik yang dimiliki ini akan mempengaruhi struktur sosial dan interaksi sosial masyarakat sekitar pesantren, dan di dalam struktur sosialnya melekat modal sosial pesantren.

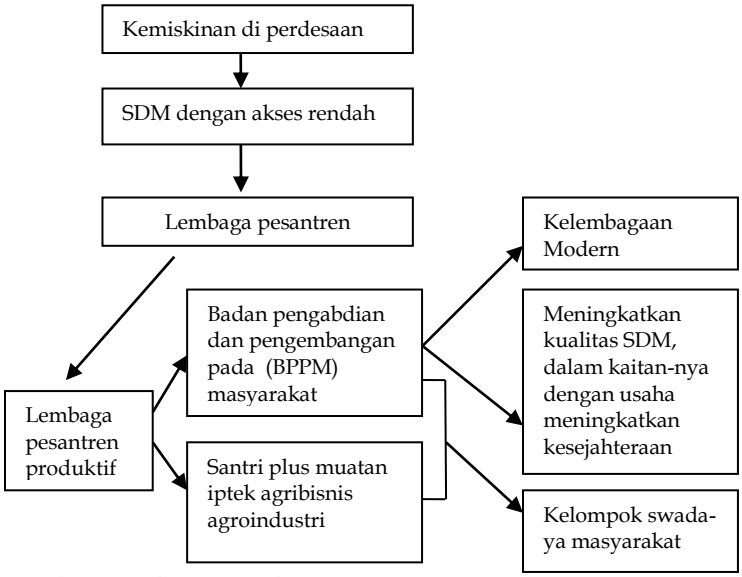


Sumber: Hidayat *et al.* (1995).

Gambar 4.1. Konsep Sistem Kelembagaan Pesantren Produktif, dalam Kaitannya dengan Fenomena Kemiskinan di Perdesaan

Modal sosial adalah jaringan (*network*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) yang memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan, di mana modal sosial terlekat (*embededness*) dalam struktur sosial masyarakat (Chaplin, 1999; Sen,1999; Johnson dan Nielsen, 1998). Sungguhpun begitu, modal sosial tidak selalu mendukung pelaksanaan transaksi (Portes, 1998)

Teori ekonomi kelembagaan menyebutkan, peranan kelembagaan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena: (1) lembaga membentuk hak milik dan insentif ekonomi (North, dalam Pressman, 2000) (2) memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan, karena adanya modal sosial (Sreeten, 2002; Chaplin, 1999; Johnson dan Nielsen, 1998) (3) memperkuat aturan main dalam perekonomian seperti memanajeman konflik, mengurangi ketidakpastian dan kerjasama.

Modal sosial penting sekali dalam pembangunan, karena jika merujuk pada inti dasar dari "kelembagaan" adalah bagaimana aturan formal, dan aturan informal di implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan pada realitasnya dalam kegiatan ekonomi pesantren terikat dengan struktur sosialnya, artinya struktur sosial pesantren mempengaruhi bagaimana para pelaku ekonomi berperilaku untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dan tambahan materi (*profit*) yang diinginkan. Mengutip pernyataan Sen (2007) bahwa sangat penting memasukkan persepsi dan pemahaman tentang identitas bersama, ketaatan terhadap norma kedalam karakterisasi pilihan dan perilaku dalam ilmu ekonomi. Atau merunut istilah yang sering dipaparkan dalam teori ekonomi kelembagaan, bahwa sebuah kemustahilan memahami ekonomi terpisah dari nilai-nilai budaya, norma, dan struktur sosial masyarakat (Fukuyama, 2002; Damsar, 2002; Nooteboom 1998; Kunio, 2000; Coase, 2002; Coleman, 1990; dalam Lapavitsas *et al.*, 2004).

Berdasarkan pemaparan di atas, peran lembaga pesantren penting bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Dan sepak terjangnya terlekat modal sosial (*social capital*) yang dimilikinya.

## IV. METODOLOGI

**Pemaparan Bab ini dikutip dari hasil penelitian penulis. Pertama, analisis modal sosial dan biaya transaksi pengembangan agribisnis di pesantren. Disertasi. Kedua, pemberdayaan kelembagaan ekonomi pesantren dan strategi pengembangannya di Kabupaten Pamekasan. Adapun metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena berkaitan dengan studi *setting* kelembagaan, yang memusatkan perhatian pada struktur dan aturan informal (modal sosial) untuk menerangkan apa yang dilakukan keluarga pesantren. Di samping itu pertimbangan yang lebih penting, agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi dampak modal sosial pesantren bagi pertumbuhan ekonomi, serta strategi mengimplementasikannya dalam upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan. Oleh karena kegiatan ekonomi pesantren terikat dengan struktur sosialnya, artinya modal sosial yang terlekat dalam struktur sosial pesantren mempengaruhi bagaimana keluarga pesantren dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pesantren berperilaku untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dan tambahan materi (*profit*) yang diinginkan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, pada bulan Januari 2007. Pesantren yang dijadikan target adalah pesantren yang termasuk kategori besar (santri mencapai ribuan dan jaringannya cukup luas sampai ke Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep) di Kecamatan Palengaan, kategori sedang (jumlah santri ratusan) di Kecamatan Pakong dan kategori kecil (jumlah santri puluhan) di Kecamatan Larangan. Sedangkan, untuk interview dengan menggunakan kuisioner

terhadap 131 petani, pesantren yang terpilih adalah pesantren Sumber Bungur Kecamatan Pakong dan Pesantren Darul Ulum Kecamatan Palenga'an.

Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*, atau disebut *judgement sampling*. Sampel *judgement*nya adalah kiai, ustad, santri, masyarakat/petani yang tinggal disekitar pesantren, ketua kelompok dan pengurus asosiasi pengembangan ekonomi pesantren di Kabupaten Pamekasan, serta para petugas pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi pesantren, seperti Dinas Koperasi, Departemen agama, dan Dinas Peternakan. Penentuan informan-informan tersebut ditentukan secara bergulir, dan terus bergulir menggunakan tehnik *snowball sampling*.

Teknik pengumpulan data dengan cara *in-depth interview* dan pengamatan jarak dekat selama enam bulan dengan mengamati sebagian kegiatan program ekonomi pesantren dan masyarakat di sekitar lokasi pesantren. Sementara, untuk memberi penekanan seberapa besar pengaruh modal sosial pesantren terhadap masyarakat, dalam penelitian ini dilakukan survey terhadap 131 masyarakat petani yang tinggal disekitar pesantren, dengan perincian 73 petani yang mengikuti program BPLM (program pemerintah dalam bentuk bantuan pinjaman langsung masyarakat yang dimediasi pesantren) dan 58 petani lepas. Pengambilan sampel petani dengan *cara cluster random sampling*. Alasan pengambilan petani sebagai sampel adalah untuk merepresentasikan seberapa mengakar modal sosial pesantren dalam masyarakat. Karena sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar pesantren di lokasi penelitian adalah petani.

Analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis studi ini mengacu pada analisis data yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles (1994).

## V. MODAL SOSIAL PESANTREN

Dhesi (2000) menyebutkan bahwa modal sosial penting dalam pembangunan, karena modal sosial menyediakan informasi/jaringan, norma, sangsi/kewajiban dan kepercayaan atau dengan kata lain memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan, di mana modal sosial terlekat (*embededness*) dalam struktur sosial masyarakat (Chaplin, 1999; Johnson dan Nielsen, 1998; Levi, 2000; Lin, 2001; Isham *et al*, 2002). Sen (2007) menyebutkan, bahwa sangat penting memasukkan persepsi dan pemahaman tentang ketaatan terhadap norma, identitas bersama atau rasa tanggungjawab terhadap pihak lain kedalam karakterisasi pilihan dan perilaku dalam ilmu ekonomi. Dan lebih tegas lagi dikemukakan oleh North (1990) yang mengungkapkan bahwa biaya transaksi terpaut dengan norma sosial, masyarakat dengan norma yang mendukung kejujuran dan integritas akan menghasilkan biaya transaksi yang rendah. Bank Dunia bahkan telah mengakui bahwa modal sosial sebagai alat yang bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan (Wallis *et al.*, 2004). Meskipun begitu, modal sosial ini tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Fine dan Lapavitsas, 2004; Portes, 1998).

Modal sosial yang berpengaruh positif dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks: sebagai sumber kontrol sosial, sebagai sumber dukungan keluarga dan sebagai sumber manfaat melalui jaringan ekstra *familial* (Portes, 1998). Lin (2002) menyebutkan modal sosial dapat meningkatkan hasil pada tindakan, karena memfasilitasi aliran informasi, mempengaruhi agen-agen memainkan peranan kritis dalam keputusan, kepercayaan sosial individu, dan memperkuat identitas dan pengakuan. Dari sisi lain, Portes (1998) menyebutkan kerugian aktual biaya transaksi yang dimediasi modal sosial, jika ada pembatasan akses oportunitas, pembatasan kebebasan individu, klaim yang berlebihan terhadap kelompok, dan norma yang cakupannya menyempit. Sementara Sreeten (2002) menyebutkan jaringan dan interaksi sosial dapat menyebabkan sifat yang cenderung melanggar hukum (*illegitimacy*), penyuapan, korupsi, nepotisme, dan kroniisme.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa modal sosial pesantren seperti norma, jaringan, dan kepercayaan yang melingkupi pesantren akan dapat memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan. Namun, modal sosial pesantrenpun tidak selalu memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, artinya ada beberapa aturan informal dan hubungan sosialnya kurang mendukung pengembangan ekonomi.

Sebagai gambaran umum, bahwa pesantren merupakan tempat memperdalam Ilmu Islam, sehingga gerak langkahnya selalu dan berusaha pada koridor aturan Islam. Aturan formal sumber hukum Islam (syariah) tersebar dalam kitab-kitab keagamaan, dengan rujukannya pada empat sumber hukum Islam: *Al-Qur'an*, s*unnah* dan *hadits*, *ijma'*, *qiyas* dan *ijtihad*. Aturan lainnya yang sedikit banyak tentunya dipengaruhi oleh budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam implementasinya, pemahaman dalam bermuamalah di pesantren condong pada intrepretasi dan aplikasi klasik (kitab-kitab klasik peninggalan *fuqaha salaf* atau disebut kitab kuning)

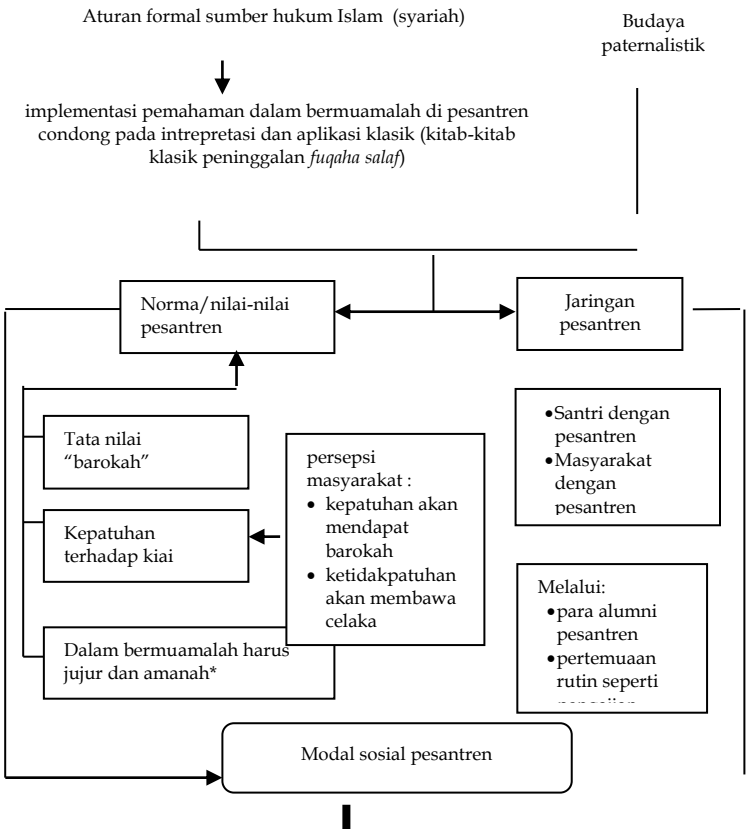

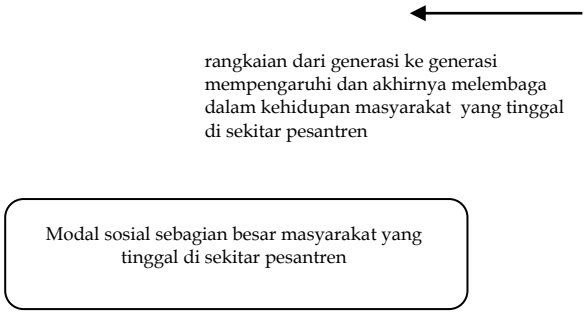


Sumber : Kutsiyah (2008a)

* Dengan norma dalam bermuamalah harus jujur dan amanah akhirnya terbentuk kepercayaan antara masyarakat dengan pesantren.

Gambar 4.1. Modal Sosial Pesantren & Modal Sosial sebagian Besar Masyarakat yang Tinggal di Sekitar Pesantren

Budaya paternalistik dalam kehidupan masyarakat Jawa juga ikut andil dalam membentuk perilaku masyarakat pesantren. Umumnya setiap tindak tanduk mereka selalu *sami'na wa ata'na* terhadap kiai. Mengutip tulisan Madjid (1997) bahwa tekanan pada hal yang bernilai mistik lebih banyak terasa. Tampak sekali hubungan kiai-santri banyak merupakan kelanjutan konsep hubungan "guru-*cantrik*" yang ada sebelum Islam datang di Jawa. Karena itu sifatnya banyak dipengaruhi oleh warisan konsep-konsep Hindu Budha, atau sekurang-kurangnya konsep stratifikasi masyarakat Jawa sendiri. Adapun dua faktor utama yang melanggengkannya, karena kiai orang berpengetahuan luas, yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan dan biasanya kiai berasal dari keluarga berada. Dua faktor ini membuat kiai dipandang sebagai tokoh elite di desa Jawa (Turmudi, 2004).

Berdasarkan perpaduan syariah Islam dan budaya paternalistik dan melalui rangkaian waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, modal sosial pesantren menjadi modal sosial santri dan penduduk yang tinggal di sekitar pesantren dalam menjemput kebutuhan materi untuk kelangsungan kehidupannya. Adapun modal sosial tersebut: (1) norma atau suatu tata nilai yakni, keinginan untuk mendapatkan barokah, kepatuhan terhadap kiai dan kepercayaan sebagai pengejawantahan nilai-nilai yang selalu dikumandangkan, dalam bermuamalah harus jujur dan dapat dipercaya (2) jaringan yang solid antara santri, kiai, dan penduduk yang tinggal di sekitar pesantren. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4.1.

Norma

Aturan informal (tidak tertulis) yang terinternalisasi dalam kehidupan santri dan masyarakat dalam lingkup pesantren yang tradisional adalah, rata-rata tujuan dasar mereka untuk mendapatkan barokah. Makna barokah, yang terangkum dari 131 responden yakni: meraih kesempurnaan hidup, keberkahan dunia akherat dan kehidupan yang diridhoi Allah swt, mudah mendapatkan rejeki dan diri selalu merasa cukup, serta mudah terkabulnya doa. Dapat dikatakan, keyakinan petani terhadap barokah sangat kuat, sehingga tidak mengherankan ketika ada dua pilihan penawaran antara materi dan barokah, maka sebagian besar mereka akan memilih barokah, meskipun jika dipandang dari sudut ”*utilitas* materi” akan merugikannya. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4.1.

Pemahaman “makna barokah”, jika ditilik lebih lanjut ternyata sangat beragam, bahkan yang terangkum dari beberapa nara sumber, adanya pemahaman

yang salah kaprah. Sebagai ilustrasi, rata-rata santri dan penduduk berinteraksi dengan pesantren untuk memperoleh barokah kiai. Penafsiran barokah kiai diyakini seolah-olah atau seperti kemampuan luar biasa yang dimiliki kiai, yang memiliki makna positif dan negatif. Santri sowan minta barokah, agar tujuan yang diinginkanya dapat tercapai, sedangkan yang melawan keputusan kiai akan kualat-celaka atau tidak diterima ditengah-tengah masyarakat sebagai sisi negatif. Senada dengan yang dikemukakan Madjid (1997) santri akan selalu memandang kiai dalam pengajian sebagai orang yang mutlak harus membawa keberuntungan (berkah/barokah) atau celaka (*malati*, mendatangkan mudharat).

Barokah adalah anugerah dari Allah swt, di mana manusia tidak mengetahui secara pasti. Dalam tataran ini, barokah mutlak milik Allah. Oleh karena itu, kiai tidak bisa memberikan barokah, tetapi fungsi kiai sebatas fasilitator. Artinya ketika santri sowan terhadap kiai, maka kiai akan memeberikan motivasi, mendoakan, memberikan arahan-arahan, pengetahuan, cara bergaul dalam masyarakat. Namun akhirnya jalan pintas yang diyakini masyarakat mengkaitkannya, seolah-olah kiai memberikan *kun fa yakun*. Padahal, dalam implementasinya, kiai hanya mengarahkan kepada perilaku yang baik, kemudian memberi jalan keluar terhadap masalah-masalah yang melingkupi masyarakat. Artinya kiai tidak secara otomatis menjadi jimat sehingga ketika meminta kepada kiai menjadi *super power* atau bisa langsung mendapatkan apa yang dikehendaki masyarakat. Sebagai penegasan, makna barokah adalah representasi atau refleksi kebaikan yang bersifat ilahi yang tidak diketahui sebelumnya kecuali oleh Allah. Dan dari makna ini dapat dikembangkan secara luas pemaknaannya. Semua kebaikan, kebajikan. Barangkali makna barokah kiai yang dikatakan masyarakat adalah kebaikan yang diperoleh mereka..... pemahaman masyarakat barokah kiai adalah kebaikan kiai.

Tabel 4.1. Makna barokah dalam perspektif masyarakat

| Nama | Pekerjaan/status | Makna barokah |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Samin, Sae, sahi | Petani | *kesempurnaan hidup dunia dan akherat* |
| Bunarwi, Adnami | Petani | *keridhoan kiai* |
| Juri, Tahir, Samah | Petani | *sesuatu yang membuat hati tenang* |
| Jehra | Petani | *merasa senang dengan barokah seorang kiai* |
| Rahmadi, Hanaroh | buruh tani | *ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat* |
| Samsul arifin | Santri | *suatu kebajikan yang bisa mengubah perilaku sesorang* |
| Kholis erfan | Santri | *suatu kebajikan dan kebaikan* |
| Moh norul | Santri | *doa, berkat doa kiai insya Allah akan dapat barokah* |
| Sahri | petani/pengurus | *selamat dunia dan akherat* |
| M kurniawan | petugas depag | *satu hal yang bisa membuat diri kita merasa cukup* |

Sumber : Kutsiyah (2008b)

Barokah biasanya terkait dengan karomah. Mereka yang mempunyai karomah dapat memberikan barokah, yakni akibat positif yang timbul dari interaksi dengan orang suci. Kehidupan yang dipenuhi barokah secara sederhana berarti hidup yang cukup. Singkatnya, barokah adalah sifat yang muncul dalam diri beberapa orang, seperti kiai, yang dianugerahi karomah. Para pengikut kiai percaya bahwa ia mampu memberikan barokah, khususnya jika ia sendiri mendoakan mereka (Turmudi, 2004). Merunut istilah Dhofier (1982), kiai dianggap sebagai penyalur barokah. Namun, seperti yang disebutkan di atas, pemahaman yang

diterima masyarakat bahwa seakan-akan barokah adalah seperti yang dikehendaki oleh kiai, karena itu diyakini sekali, bahwa kiai akan membawa keberuntungan (barokah), apabila mereka taat atau akan mendatangkan kualat-celaka, apabila melakukan perbuatan yang tidak direstuinya.

Tabel 4.2. Hubungan patron (kiai)-klien (santri/masyarakat)

| Nama | Pekerjaan /status | Infaq ke pesantren | Bantuan yang diberikan ke pesantren | Bantuan dari kiai |
|---|---|---|---|---|
| Mino | petani | Beras | Pembangunan pondok | *Sering membantu dan guru anak saya* |
| Sayuth | petani | Kayu bakar | Pembangunan madrasah & pondok | *Memberi ilmu dan bisa jadi panutan* |
| Mae | petani | Uang, beras | Pembangunan pondok | *Jika diundang selalu hadir* |
| Sirut | petani | Uang, beras | Bertani, pembangunan pondok | *selalu menolong dalam masyarakat* |
| Husni, Faruq, | petani | Uang, beras,k | Pembangunan | *Sebagai guru* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mudassir, Hasan, Sahru | | ayu | pondok | |
| Toyib, Arifin, Samsul | santri | mengabdi pada kiai | | *Makanan, pondok dan biaya kebutuhan di pesantren* |
| Badrus salam | santri | mengabdi pada kiai, dengan memelihara ternak, yang dimiliki pesantren | | *Biaya sekolah/ pesantren, kebutuhan sandang-pangan, biaya perkawinan* |

Sumber : Kutsiyah (2008b)

Norma yang kedua, kepatuhan terhadap kiai. Ada empat alasan yang mendasari kepatuhan ini. *Pertama*, budaya patron dengan klien. Seorang patron menurut definisi Scott (1981) adalah orang yang berada dalam posisi membantu klien-kliennya. Meskipun klien-klien seringkali berusaha sebisa-bisanya untuk memberikan arti moral kepada hubungan itu. Oleh karena mereka dalam menghadapi patron seringkali lemah sekali. Gambaran seperti ini nampak sekali terlihat dalam interaksi kiai dengan petani. Kiai sering memberikan arahan dan pengetahuan tentang keagamaan, memberi bantuan dalam bentuk pinjaman uang serta bantuan-bantuan lain seperti menghadiri pernikahan, selametan, menyediakan pekerjaan atau membantu permasalahan antar masyarakat. Situasi ini memberi perasaan hutang budi, sehingga mereka berusaha dalam berbagai keadaan untuk membalas kebaikan kiai. Bentuk balas budi, seperti sebagian besar petani setiap tahun, 1 sampai 3 kali datang ke pesantren dengan membawa beras, uang, kayu atau hasil pertanian lainnya. Bentuk balas budi lainnya mereka seringkali

membantu pembangunan di pesantren. Adapun gambaran patron-klien sebagian masyarakat disajikan pada Tabel 4.2.

*Kedua,* keyakinan terhadap barokah kiai. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. *Ketiga,* kitab-kitab klasik yang merupakan buku ajar dan pola pendidikan di pesantren-pesantren tradisional condong pada penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap guru. Pola pendidikan pesantren memfokuskan pada wahana sosialisasi dan legitimasi mazhab, yang tidak lepas dari wacana ideologis tentang mainstream takzim (penghormatan, cenderung pengkultusan) terhadap kiai, sehingga berimbas pada proses transformasi ilmu maupun aspek lainnya. Contoh, kitab *Ta'limu al-Muta'alim* merupakan pegangan di pesantren sebagai pedoman yang secara tidak resmi menjadi standar pola pendidikan pesantren. Kitab tersebut menjadi rujukan karena sistematika penulisan dan isi materinya amat bagus. Hanya saja implementasi paparan buku ini acapkali lebih mengedepankan pengkultusan sang kiai (Farchan & Syarifuddin, 2005). Beberapa kutipan dari buku *ta'limu al-muta'alim* (Zarnuji, 1963) adalah sebagai berikut: *Sebagian dari memuliakan guru, ialah janganlah berjalan di depannya, jangan duduk di tempat duduknya, jangan memulai bicara kecuali mendapat izin darinya, tidak banyak bicara, dan janganlah mengajukan pertanyaan, jika guru sedang dalam keadaan tidak enak, dan jagalah waktu, jangan sampai mengetuk-ketuk pintunya. Tetapi sabarlah sebentar, tunggu sampai dia keluar….Ketahuilah, sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan kemanfaatannya, kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya, dan memuliakan guru….. Aku tahu bahwa hak seorang guru itu harus diindahkan melebihi segala hak. Termasuk memuliakan guru, ialah menghormati dan memuliakan anak-anak serta famili-familinya.* Sementara, sebagian pendapat santri tentang kitab ini (lihat Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Pemahaman para santri tentang kitab *ta'limu al-muta'alim*

| Nama | Pemahaman tentang kitab *ta'limu al-muta'alim* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Salam | *Cara berbakti pada agama, cara tunduk pada guru, cara memilih teman, cara memilih ilmu dan cara mencari rejeki* |
| Moch syafei | *Cara berbakti ke agama, cara tunduk ke guru* |
| Abdul mokit | *Memilih ilmu, guru dan teman* |
| Sus | *Perilaku terhadap guru* |
| Muzali | *Tentang syarat-syarat untuk memperoleh ilmu: syarat punya akal, ketenangan, sabar, tabungan akherat, belajar ke guru* |

Sumber : Kutsiyah (2008b)

*Keempat*, keyakinan bahwa menjadi miskin dan tidak beruntung karena kurang iman. Hasil penelitian Horikoshi (1987) menyebutkan ada keyakinan yang dipercayai bahwa menjadi miskin dan tidak beruntung adalah disebabkan kurangnya iman dan ketidakmahiran dalam aktivitas ekonomi serta agama membuat orang desa secara terus menerus berhutang dan merasa malu terhadap dirinya. Konsekuensi sikap yang lazim di antara orang-orang desa terhadap ulama ditandai dengan ekspresi segan yang sering dipergunakan. Hubungan ”segan” antara ulama dan orang-orang desa nampak dalam hidup keseharian mereka.

## 1. Kepercayaan

Sebagian etika bertransaksi dalam syariah Islam yang secara umum selalu dikumandangkan adalah *siddiq*, dan *amanah.* Bakhri, (2006) memaknainya bahwa seorang muslim dalam bertransaksi haruslah jujur (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah).* Mengutip dari PWNU Jawa timur, (2007), sebagai salah satu sifat Rasulullah, *al-Shidqu*, berarti jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, satunya hati-

kata-perbuatan, oleh karena itu dalam bermuamalah dan bertransaksi harus memegangi sifat *al-Shidqu* ini sehingga lawan dan kawan kerjanya tidak khawatir tertipu. *Al amanah* adalah dapat dipercaya memegang tanggung jawab dan memenuhi janji.

Terkait dengan kepercayaan, masyarakat terhadap pesantren, mereka melihat bukti.yakni Akhlakul karimah yang mengerucut pada semua aspek kehidupan". Selama ini masyarakat mengenal pesantren sebagai lembaga keagamaan yang mengedepankan norma, akhlak, moral dan ketaqwaan. Jujur dan amanah merupakan salah satu norma pesantren. Ketika pesantren mengadakan kerjasama dengan masyarakat, maka citra tersebut yang melekat. Dengan norma dalam bermuamalah harus jujur dan amanah akhirnya terbentuk kepercayaan antar masyarakat dengan pesantren. Mengutip Fukuyama, (2002) bahwa kepercayaan, pada gilirannya merupakan produk dari komunitas-komunitas yang telah ada sebelumnya yang telah memiliki norma-norma atau nilai-nilai moral bersama.

## 2. Jaringan

Jaringan pesantren sangat solid. Potret ini dapat dilihat dari realitas ketika adanya pendistribusian bantuan ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi, dan terutama sekali yang sangat kentara pada saat pemilihan umum. Jaringan ini terbentuk dari kekerabatan pesantren dengan santri-alumni. Adanya kekerabatan santri-alumni karena suatu keterikatan atau hubungan emosional antara kiai dengan santri. Ketika seorang santri telah lulus, dia selamanya akan tetap menjadi santri. Ada suatu ungkapan bahwa sekali dia menjadi santri maka seumur hidupnya tetap menjadi santri.

Jaringan pesantren juga dapat dilihat dalam bentuk pertemuan-pertemuan rutin seperti pengajian/haul/istighozah. Keberadaan pengajian bisa dimaknai

sebagai ajang *silaturrahim* untuk memelihara semangat keagamaan masyarakat. Pengajian tersebut lebih banyak diisi dengan ritual keagamaan yang biasanya mendatangkan kiai. Mengutip Farchan dan Syarifudin (2005) Jaringan pesantren terbentuk: kekerabatan dengan alumni-santri-wali santri, adanya pertemuan rutin atau perayaan seperti pengajian, *haul, istighozah, mujahadah*, dan *inti hanan/akhir sanah.*

### 3. Bukti Empiris Modal Sosial Pesantren Melembaga dalam Kehidupan Masyarakat di Sekitar Pesantren

Manfaat pesantren bagi masyarakat adalah tempat mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama, tempat memperbaiki moral, serta tempat memperkuat imam. Dengan harapan yang tertanam dengan adanya pesantren untuk mendapatkan barokah, alasan patuh terhadap kiai untuk mendapatkan barokah dan pemberian sumbangan/infaq ke pesantren juga untuk mendapatkan barokah.

Hasil survei terhadap 131 responden tentang tata nilai dalam mempengaruhi harapan dan keputusan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.4. Data tersebut mengindikasikan harapan masyarakat terhadap keberadaan pesantren proporsinya 83,8 % untuk mendapatkan barokah. Disusul untuk mendapatkan ilmu 29%, dan responden yang memilih ilmu dan barokah sekitar 22,9 %. Kepatuhan terhadap kiai juga didasari untuk mendapatkan barokah yang mencapai 84,5 %. Dan lebih menarik lagi di atas 94% responden menjawab “selalu patuh” terhadap perintah & larangan kiai.

Sudah hal yang lumrah, masyarakat silaturahmi ke pesantren satu sampai tiga kali pertahun. Dan biasanya, mereka membawa hasil pertaniannya, seperti beras, jagung, uang dan lainnya. Kadangkala mereka memberikan uang atau kayu pada saat pesantren membangun pondok dan masjid. Adapun “bungkus” pemberiannya,

juga didasari tidak luput untuk mendapatkan barokah, walaupun proporsinya tidak sampai 47 %.

Tabel 4.4. Tata Nilai "Barokah" dalam Mempengaruhi Harapan dan Keputusan Masyarakat

| Uraian | Jumlah (orang) | Mendapat Barokah (%) | Mendapat ilmu (%) | Pembangu-nan pesantren (%) | Lainnya (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Harapan terhadap pesantren | 130 | 83,8 | 23 | - | 1,54 |
| Alasan patuh terhadap kiai | 131 | 84,5 | 29 | - | 0,76 |
| Tujuan pemberian infaq ke pesantren | 115 | 47 | - | 28,7 | 24,3 |

Sumber : Kutsiyah (2008a)

Seluruh responden menjadikan pesantren sebagai alternatif untuk membantu penyelesaian masalah. Secara umum antara masyarakat dengan kiai ada hubungan patron-klien. Didasari oleh dua kelebihan yang dimiliki kiai, dalam aspek pengetahuan dan aspek kekayaan. Kiai merupakan patron masyarakat yang sebagian besar terlilit dalam kemiskinan dan kurang pengetahuan. Sementara, bagi orang desa kiai merupakan guru bagi dirinya dan anak-anaknya, orang yang alim, bijaksana, panutan dalam kebaikan, selalu menolong masalah dalam masyarakat, berilmu, dan memberi pekerjaan.

Tabel 4.5. Kepatuhan Terhadap Kiai dan Mengandalkan Pesantren dalam Penyelesaian Masalah

| No. | Uraian | Jumlah masyarakat | Selalu | Kadang-kadang | Tidak pernah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kepatuhan terhadap kiai | 131 | 128 | 5 | 0 |
| 2. | Mengandalkan pesantren dalam penyelesaian masalah | 131 | 22 | 109 | 0 |

Jaringan pesantren sangat kuat sekali. Para alumni di daerah tetap terjalin, meskipun sampai puluhan tahun. Adapun keterikatan ini tetap akan langgeng karena kondisi yang membingkai, baik itu atas nama silaturahmi atau secara spesifik pengajian dan kerjasama dibidang ekonomi. 61,07% masyarakat mengikuti pengajian 1-7 kali dalam seminggu, dan selebihnya 38,93% menghadiri pengajian satu kali dalam sebulan atau kurang dari satu kali dalam sebulan. Keadaan ini berarti tidak ada satupun masyarakat yang tidak menghadiri pengajian.

Pengajian (*koloman*) merupakan ciri khas ikatan komunitas lokal dilokasi penelitian- Pamekasan terutama di daerah pedesaan. Keberadaan *koloman* ini bisa dimaknai sebagai ajang silaturrahim untuk memelihara semangat keagamaan masyarakat. *Koloman* tersebut lebih banyak diisi dengan pengajian dan ritual keagamaan lainnya (Balitbangda, 2007), di mana setiap pertemuan kadang-kadang mendatangkan salah satu kiai atau ustad.

Pemaparan diatas mengindikasikan bahwa ada tiga ciri khas yang dimiliki masyarakat ketika berinteraksi dengan pesantren (1) rata-rata niat kuat untuk mendapatkan barokah (2) ada rasa sungkan – *taboo* serta penghormatan yang berlebih-lebihan ketika mereka berinteraksi dengan kiai dan keluarganya (3) kecil sekali untuk menipu pesantren.

**Berdasarkan gambaran di atas, modal sosial pesantren sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren. Kondisi ini merefleksikan norma atau nilai-nilai yang mendarah daging di lingkup pesantren, dalam kurun waktu lama akhirnya menjadi norma yang melekat terhadap masyarakat. Hal yang sama terbentuk karena jalinan erat yang berlangsung puluhan tahun antara kiai, santri, wali santri dan masyarakat dengan pola *patronase* dan nilai-nilai yang mengikat di antara mereka, akhirnya membentuk jaringan. Artinya, norma, nilai dan budaya pesantren yang menjadi ciri khas pesantren lambat laun menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat dalam bermuamalah. Dampaknya modal sosial pesantren akhirnya menjadi milik sebagian besar masyarakat (lihat alur pada Gambar 4.1).**

**Dampak Positif dan Negatif Modal Sosial Pesantren dalam Kerangka Ekonomi dan Strategi Mengimplementasikannya dalam Pengentasan Kemiskinan di pedesaaan**

**Keuntungan yang bisa dikatakan"keuntungan terbesar" yang dimiliki pesantren dalam upaya mensukseskan pengembangan ekonomi pesantren dan pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar pesantren adalah modal sosial yang dimilikinya. Tetapi juga bisa dinilai bahwa "kerugian" yang dipunyai**

**pesantren dalam pengembangan ekonomi adalah modal sosial yang dimilikinya juga.**

Persediaan modal sosial yang tinggi biasanya suatu komunitas menjadi lebih lebih baik dalan pengelolaan, daripada yang modal sosialnya rendah, karena biasanya anggota-anggotanya dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik, penegakan kesepakatan kontrak lebih mudah, penggunaan sumber yang ada lebih efisien, penyelesaian perselisihan lebih bersahabat, dan respon kesadaran warganya lebih cepat (Putnam, 1995; dalam Woolcock, 1998). Meskipun begitu, modal sosial yang dimiliki bisa berakibat negatif, dalam beragam bentuk. *Pertama*, jika yang berkembang norma yang memberi kelanggengan struktur sosial yang tidak adil. adanya eksploitasi beberapa orang yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan terhadap anggota komunitas yang kebanyakan memiliki posisi lemah baik dalam ekonomi dan pengetahuan. *Kedua*, solidaritas komunitas yang kuat, dan menjungjung tinggi pengorbanan atas sebuah nilai yang telah melembaga dalam suatu komonitas, sehingga kebebasan atau kreatifitas individu jumud. *Ketiga*, ekslusif kelompok karena adanya perasaan dan nasib yang sama dalam kelompok sehingga mengisolir diri.

Empat aspek positif modal sosial pesantren dalam pengembangan ekonomi. *Pertama*, etika bertransaksi jujur dan amanah. Dalam tataran ekonomi umumnya masyarakat yang bekerjasama atas nama pesantren, jarang sekali untuk oportunis, karena adanya ikatan emosional atas nilai-nilai yang diyakininya, sehingga biaya pengawasan dan penegakan kecil. Bukti empiris, dari hasil survei terhadap 185 petani yang mendapat BPLM melalui lembaga pesantren, hanya 1 orang yang sepenuhnya tidak mematuhi kesepakatan dengan menghilangkan secara sengaja aset yang dipinjamnya.

**Kondisi tersebut, kontras apabila dibandingkan dengan program pemerintah, yang langsung ditangani perangkat pemerintah. Tidak bisa**

**dipungkiri bahwa "kegagalan" program-program pemerintah melalui badan/instansi pemerintah sering terjadi, salah satunya disebabkan tidak adanya kepercayaan antara masyarakat-petugas-perangkat desa, sehingga banyak dana yang disalah gunakan akibat kongkalikong di antara mereka. Sikap oportunis para perangkat pemerintah rata-rata tinggi, biasanya tujuan tindakannya untuk kepentingan diri sendiri (*self interest*), dan buntut demi kepentingan politik. Mengutip dari Usman (2004) kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan kemampuan pemerintah pada saat ini berada pada titik yang paling rendah.**

Meskipun begitu, tidak bisa menjamin bahwa program yang disalurkan melalui lembaga pesantren tidak oportunis. Salah satu faktor utama penyebabnya, berbagai program bantuan terhadap pesantren sering memiliki nuansa politis. Ujung-ujungnya terlalu sering tidak bisa ditebak tentang bagaimana penyelesaiannya ketika kesepakatan kontrak tidak dipatuhi. Kondisi ini dikemukakan hampir seluruh responden yang berstatus pegawai pemerintah. Rataan mereka mengeluhkan aturan pemerintah tentang kontrak terhadap pesantren dan bantuan pemerintah dimaknai hiba. Jadi istilah bantuan dikira cuma-cuma sehingga tidak perlu dikembalikan. Padahal model kesepakatannya formal, yang mewajibkan pesantren untuk mengembalikan. Di samping itu Unsur politis selalu mengiringi bantuan yang diberikan. Dampaknya sistem *punishment* dan *blacklist* hampir tidak pernah dilaksanakan ketika bungkus politik yang menjadi tujuan pemberian bantuan. Keadaan ini memberi ruang yang lebar untuk oportunis dan semakin menyuburkan makna hibah terhadap bantuan/pinjaman yang digelontorkan pemerintah.

Kepercayaan (*trust)* memainkan peranan dalam mengurangi biaya transaksi, karena kepercayaan yang dapat diselenggarakan (*enforceable trust*) berdampak kewajiban dapat dilaksanakan, penegakannya tidak melalui wacana hukum tetapi menggunakan kekuatan dari komunitas setempat (Levi, 2000; Portes, 1998;

Woolcock, 1998). Sebaliknya jika dalam masyarakat tidak ada kepercayaan satu sama lain atau mencoba berbohong, menipu dan mencuri maka banyak sumberdaya yang harus dikeluarkan untuk menspesifikasi dan penegakan kontrak. Merunut paparan Nooteboom (1998), sifat yang dapat dipercaya (*trustwothiness*) atas lembaga dalam bentuk aturan etika atau norma atau ikatan emosional, akan membatasi terjadinya kecenderungan peluang oportunistik.

*Kedua*, kiai mudah memobilisasi dan mengarahkan masyarakat pesantren (santri, ustad, wali santri dan masyarakat sekitar pesantren). Pengaruh budaya paternalistik dan persepsi harapan untuk mendapatkan barokah mendorong mereka mematuhi perintah dan larangan kiai. Dengan kepatuhan terhadap kiai sangat mudah memobilisasi dan mengarahkan santri dan murid-murid madrasah beserta masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Ada anggapan kuat dari petugas pemerintah: "jika kiai yang menyarankan, biasanya masyarakat langsung mengikuti, sedangkan apabila dari pemerintahan, walaupun mengatakan sepuluh kali atau seratus kali belum tentu didengar". Seorang responden mengungkapkan bahwa Koperasi dibeberapa pondok pesantren cukup maju, karena adanya keterkaitan pengasuh pondok (kiai) untuk mengembangkan ekonomi di pondoknya. Sebagai penegasan, dikutip dari Bakhri (2004) kesuksesan koperasi *Baitul maal wat thamwil* di pesantren Sidogiri-Pasuruan, tidak terlepas memanfaatkan budaya paternalistik untuk kemajuannya yaitu dalam bentuk himbauan terhadap murid-murid dan santri untuk menabung.

Wahid (1988), menyebutkan berdirinya pesantren sebagai bagian dari transformasi kulturil dalam jangka waktu yang sangat panjang dan kiai sebagai tokoh sentral, diharapkan berperan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Supriyono, 2003). Oleh karena itu, pesantren dapat menjadi fasilitator pemerintah atau pelaku aktif dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan dengan urun rembug dalam program pembangunan yang disalurkan pemerintah. Serta membuang jauh-

jauh pemahaman, bahwa pesantren notabene hanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan *an sich*, pendidikan dan akhlak tanpa ada keharusan untuk berperan serta dalam memajukan kehidupan ekonomi pesantren dan masyarakat

*Ketiga*, jaringan pesantren yang solid, sehingga memudahkan transfer informasi dan penyaluran program-program kerjasama ekonomi yang dilaksanakan melalui ranting atau kordinator daerah dengan para alumninya/masyarakat. Bentuk-bentuk konkretnya seperti (1) adanya rapat umum pesantren yang merupakan pertemuan antara alumni, wali santri dan pengasuh (2) pesantren di setiap daerah memiliki korda (koordinator daerah) yang merupakan kepanjangan tangan kiai yang mewadahi baik kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial dan politik pesantren. Tujuan korda ini terutama sekali memecahkan persoalan di bawah, dan memayungi kegiatan pengajian didaerah (3) kunjungan masyarakat yang dikehendaki secara bebas (4) haul besar per tahun sebagai bentuk pertemuan antara wali santri, dan pada saat itu juga untuk mengumpulkan infaq.

*Keempat*, dengan modal sosial yang mengakar dalam kehidupan masyarakat sekitar pesantren, maka keberadaan lembaga pesantren beserta elemen-elemennya tahu dan minimal memahami lingkungan kelembagaan dan kesepakatan kelembagaan yang menjadi ciri khas masyarakat setempat. Keuntungannya, pesantren bisa menerapkan "fleksibilitas aturan main (*rules of the game*)" dengan mengedepankan tingkat kebutuhan terbaik yang bisa dilaksanakan pesantren. Contoh kongkretnya, ketika ada bantuan dari pemerintah (bantuan langsung ke pesantren atau mediator pemerintah dalam pengentasan kemiskinan), pesantren tidak terjebak pada aturan yang kaku yang ditetapkan pemerintah dalam hal operasional kelembagaan. Meskipun begitu, "pesantren harus tetap menjunjung tinggi kesepakatan kontrak". Artinya pesantren harus mematuhi kesepakatan kontrak tentang kewajiban yang sudah disepakati bersama.

**Aturan terlalu kaku yang ditetapkan pemerintah, pada program-program pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu penyebab**

**kegagalan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Petugas lapang selalu berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Sedangkan para petugas orientasinya lebih kepada mengikuti peraturan daripada menjawab kebutuhan kelompok sasaran di lapang, sehingga berakibat, tujuan pemberdayaan masyarakat relatif sulit dicapai. Usman (2004) mengemukakan, masyarakat (petani) dibiasakan bekerja dengan *blue print* yang diinstruksikan dari atas, dan hampir tidak memiliki peluang terlibat pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Kalaupun dilibatkan, hanya pada proses merumuskan keputusan bukan eksekusi keputusan. Contoh, perangkat pemerintah yang semula diharapkan menjadi pendamping petani ketika menemui masalah-masalah yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, sebagian justru menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Atau menggunakan istilah yang umum: pelaksanaan bersifat *top down* (Dwiyanto, 1995), sehingga sifat "keharusan" mengikuti pedoman umum, surat keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.**

Ulasan dampak negatif modal sosial pesantren dalam tulisan ini, tidak bermaksud menggiring, bahwa makna atau esensi dari keberadaannya negatif. Tetapi, penekanannya untuk memosisikan struktur sosial, yang didalamnya melekat modal sosial pesantren agar lebih memberi ruang kreatifitas, kemudahan akses informasi/teknologi, dan jaminan kepastian para pelaku ekonomi di/melalui lembaga pesantren dalam pelaksanaan transaksi. Kondisi ini perlu diterapkan, karena pertumbuhan ekonomi bisa dicapai, diantaranya (1) efisiensi kelembagaan dan (2) mengubah perilaku organisasi, sehingga dapat menawarkan lebih banyak untuk kreasi, penyebaran dan adaptasi ide baru (Yeager, 1999; Berg, 2001; North, 1987; Furubotn dan Richter, 2000).

*Pertama*, orientasi kuat terhadap kiai dan dia merupakan hierarki kekuasaan satu-satunya yang secara ekplisit diakui di lingkungan pesantren dan masyarakat di sekitar lokasi pesantren. Norma ini memberi kelanggengan struktur sosial yang tidak simetris. Implikasinya didalam realitas sosial, dalam bentuk penyerahan diri santri/ ustad/masyarakat sepenuhnya kepada kiai dan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap manajeman yang diterapkan.

Kiai/*lora* (putra kiai) biasanya sebagai pemilik pesantren. Di samping itu mereka juga merangkap sebagai pengurus dalam kegiatan ekonomi. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan kinerja ekonomi, karena: (1) sering kali menutup kesempatan pengurus non keluarga pengasuh untuk bisa kreatif dan bekerja optimal, karena tradisi di pesantren, seorang santri atau ustad tidak bakalan akan berani mengkritik mereka. Perbuatan yang tabu apabila menentang kiai/putra-putri kiai dan bisa tidak mendapatkan barokah atau kena kualat berdasarkan kerangka tradisi pesantren (2) kiai tidak mungkin mahir dalam semua hal seperti ekonomi, dan pengetahuan teknis lainnya tentang bidang tertentu sehingga manajeman yang diterapkan banyak yang tidak sesuai dengan pengelolaan/ manajeman yang semestinya dalam bidang ekonomi.

Kongkretnya, seringkali pola manajeman yang digunakan kebanyakan pola manajeman yang mendasarkan semua keputusan ditangan kiai, dan pengurus hanya *sami'na wa ata'na*. Lebih parah lagi, jika manajeman yang diperintahkan kiai kurang tepat. Dengan kata lain, aspek pengelolaan yang kurang tepat, tetapi berdasarkan perspektif kiai benar, maka manajeman tersebut yang dilaksanakan, meskipun jelas-jelas kurang efisien. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi sebaiknya didelegasikan kepada pengurus melalui biro/departemen bidang ekonomi, sedangkan pengasuh/ keluarga kiai sebatas pengawas. Pada kondisi ini memberikan ruang yang lebar dan nyaman bagi pengurus beserta perangkat-perangkatnya, sehingga dia dapat berkreasi, bekerja keras, belajar dan puas dengan hasil yang diperoleh.

Hasil observasi mengindikasikan, pedelegasian tugas terhadap pengurus telah dilakukan oleh beberapa pesantren dan trend kinerjanya cukup bagus. Seperti di Pontren Panyepen dan pontren Darul Ulum Banyu anyar Kecamatan Palengaan.

Bukti lain, pendelegasian tugas melalui biro/ departemen ekonomi dilakukan oleh beberapa pesantren yang cukup sukses mengembangkan bisnis dengan pendapatan milyaran per tahun di Indonesia. Contoh, Pontren Sidogiri Pasuruan – yang sukses membentuk *baitul maal wa tamwil*. Kiai memberikan wewenang penuh kepada pengurus koperasi untuk menjalankan roda usaha (Bakhri, 2004; Depag, 2004; Republika, 2006), di Pontren Al-Amien Sumenep (PP. Al-Amien, 2004).

*Kedua*, pemahaman insentif bagi santri, ustad, wali santri dan masyarakat sekitar pesantren adalah insentif non materi (*barokah*) dan insentif materi. Dalam implementasinya, mendapatkan barokah jauh lebih diharapkan, dibandingkan insentif materi, ketika mereka bermuamalah dengan pesantren. Dampaknya, insentif materi tidak diperhatikan oleh kiai/keluarga kiai, karena mesyarakat tidak mengeluhkan insentif (materi) yang diberikan kiai. Bahkan, seringkali biaya operasional ditanggung oleh santri, ustad, wali santri dan masyarakat sekitar pesantren. Sudah mafhum, dalam kehidupan pesantren, *taboo* bagi santri/ustad/ pengurus untuk mengeluh atas apa yang diberikan kiai dan harus merasa selalu cukup, meskipun realitasnya sangat tidak memuaskan.

Insentif "materi" dalam kerangka ekonomi sangat krusial, dan merupakan salah satu kunci yang mendasari pelaku ekonomi bekerja. Merujuk pada Turvani (1998), Stadler dan Castrillo (1997) bahwa untuk menemukan kesepakatan optimal, maka kontrak di desain dengan cara bagaimana agen mempunyai "insentif" yang cukup untuk mendorong perilaku dalam kepentingan *principal*. Tidak bisa dipungkiri dalam kegiatan ekonomi dalam lingkup pesantren yang lebih menonjol dihitung dalam bentuk *utilitas* non materi yaitu *barokah* dan tabungan akherat.

Meskipun begitu, tidak semua para pelaku akan mendasarkan semua tindakannya pada *utilitas* non materi, jika subsistensinya (kebutuhan hidupnya) dan kepentingan lainnya diabaikan. Oleh karena itu, pesantren sebaiknya memberi insentif selayaknya atau minimal sama dengan insentif yang diterima pengurus/pembantu/koordinator ketika bekerja dengan non pesantren, karena tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini kepuasan materi (material *utility*) yang diberikan pesantren sangat rendah dan ”tidak memuaskan”. Dan faktor ini sangat mempengaruhi produktivitas.

*Ketiga*, ekslusif pesantren yang memprioritaskan jaringan pesantren (alumni-santri), karena adanya perasaan, ciri dan nasib yang sama dalam kelompok, sehingga mengisolir diri. Keadaan ini membatasi akses bagi pihak luar (akademisi-perguruan tinggi-pemerintah-LSM) mengintro-duksi pengetahuan atau teknologi secara optimal baik dari aspek pemberdayaan, pelatihan dan kegiatan lainnya. Di samping itu, solidaritas komunitas yang kuat, yang menjungjung tinggi pengorbanan atas sebuah nilai yang telah melembaga dalam komunitas pesantren, sehingga kebebasan atau kreatifitas individu (santri, ustad) tidak berkembang atau *jumud*. Kondisi ini tidak memberi ruang bagi mereka menyimpang dari koridor yang sudah baku berdasarkan pemahaman komunitas pesantren. Padahal dalam titik tertentu yang selalu berkaitan dengan konteks sosial selalu mengalami perubahan mengikuti ruang dan waktu. Ditambah lagi, tindakan yang berbeda dari tradisi yang melingkupi seringkali menjadi inovasi yang memberi perbaikan terhadap lingkungannya. Sebagai penegasan, yang dikemukakan Tohari (2007) bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi pesantren saat ini, ketertinggalan dalam mengakses ke jalur ekonomi, sehingga membuat banyak pesantren mengalami kesulitan dalam menutup biaya operasional.

Dari hasil interview terhadap berbagai pihak (petugas pemerintah/masyarakat/orang dalam pesantren) ada keluhan yang selalu muncul, seperti: kesan”curiga” dan sifat tertutup kerap terjadi, perasaan sungkan para

petugas untuk menanyakan secara mendalam saat monitoring kegiatan program, lambat sekali dalam mengambil keputusan, sehingga hitungan mingguan bahkan butuh waktu bulanan baru bisa ditetapkan. Seperti yang dikemukakan Wahid (1988) salah satu ciri pesantren adalah sifat tertutup pesantren.

Beberapa responden beranggapan bahwa adanya indokrinisasi pesantren dengan pola *ascetisme* telah membuat masyarakat dalam menghadapi panggilan di dunia menunjukkan kesederhanaan yang tidak produktif. Anggapan ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut, karena data empiris/sekunder, yang secara kongkret dalam kaitan dengan pernyataan tersebut, sepengetahuan penulis belum ada. Sementara, hasil penelitian Hidayat (2007) tentang kemiskinan dalam perspektif masyarakat desa tertinggal yang religius di desa Kamoning Kabupaten Sampang (Kabupaten yang ada di Pulau Madura), tidak menyebutkan keberadaan pengaruh pesantren secara ekplisit. Sungguh pun begitu, proposisi hasil penelitiannya menyebutkan "*Bahwa orang, kelompok, masyarakat luar telah memberikan label/cap kepada keluarga miskin dengan masyarakat miskin, namun dalam realitasnya ternyata tidak demikian, disebabkan orang tersebut memiliki perasaan, pandangan, atau persepsi yang sangat dipengaruhi unsur-unsur dan nilai-nilai agama"*. Atau jika merujuk istilah Nugroho (1995), kondisi tersebut berarti dalam masyarakat kadang ada orang yang secara kuantitatif atau obyektif tergolong miskin tetapi karena tinggal dalam lingkup budaya tertentu, orang tersebut merasa tidak miskin. Bahkan merasa cukup dan justru berterima kasih pada nasibnya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan (1) modal sosial pesantren mencakup norma atau suatu tata nilai: keinginan untuk mendapatkan barokah, kepatuhan terhadap kiai dan etika dalam bermuamalah jujur dan dapat dipercaya. Serta adanya jaringan yang cukup solid antara masyarakat/santri dengan pesantren (2) modal sosial pesantren mengakar dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di

sekitar lokasi pesantren. Dampaknya modal sosial tersebut akhirnya menjadi modal sosial sebagian besar masyarakat (3) Dampak positif modal sosial pesantren dalam pengembangan ekonomi: etika bertransaksi jujur dan amanah; kiai mudah memobilisasi dan mengarahkan keluarga pesantren dan masyarakat sekitar pesantren dalam pengembangan ekonomi, sebagai refleksi norma kepatuhan terhadap kiai; jaringan pesantren yang solid, sehingga memudahkan transfer informasi dan penyaluran program-program kerjasama ekonomi; dan pesantren, minimal memahami lingkungan kelembagaan dan kesepakatan kelembagaan masyarakat setempat (4) Dampak negatif modal sosial pesantren dalam pegembangan ekonomi: orientasi kuat terhadap kiai, sehingga kekuasaan dan kepengurusan ekonomi pesantren sepenuhnya ditangan kiai, pemahaman insentif bagi keluarga pesantren dan masyarakat sekitar pesantren adalah insentif non materi (*barokah*) dan insentif materi. Dalam implementasinya, mendapatkan barokah jauh lebih diharapkan, dibandingkan insentif materi. Dampaknya, insentif materi yang diberikan pesantren cukup rendah terhadap orang-orang yang membantunya; ketertutupan pesantren dan solidaritas komunitas pesantren yang sangat erat, sehingga kebebasan dan kreatifitas individu jumud dan kurang komunikatif.

Oleh karena itu, pesantren sebaiknya (1) mengaplikasikan modal sosial pesantren yang berdampak positif dalam aktivitas ekonomi (2) memberi insentif ”materi” selayaknya kepada masyarakat yang bekerja/membantu ekonomi pesantren (3) kegiatan ekonomi pesantren didelegasikan kepada pengurus melalui biro/bidang ekonomi (4) tidak menutup diri (5) memberi ruang kebebasan atau kreatifitas bagi keluarga pesantren (6) menjadi pelaku aktif dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan dengan urun rembug dalam program pembangunan yang digelontorkan pemerintah dan menerapkan “fleksibilitas aturan main (*rules of the game*)” dengan mengedepankan tingkat kebutuhan terbaik yang bisa dilaksanakan pesantren dan atau masyarakat. Maksudnya, tidak terjebak pada aturan kaku yang

ditetapkan pemerintah dalam hal operasional kelembagaan. Meskipun begitu, "pesantren harus tetap menjunjung tinggi kesepakatan kontrak".

## VI. PERTANYAAN DAN MASALAH

1. Dengan adanya lembaga lokal, maka ada solidaritas yang dalam sosiologi disebut *we are feeling a group*, perasaan "ke kitaan", perasaan yang membawa seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok. Apa maksud pernyataan ini.
2. Apa yang dimaksud modal sosial?
3. Bagaimana kaitaan antara modal sosial dengan pembangunan, Jelaskan?
4. Apa dampak positif dari modal sosial pesantren terhadap kinerja ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tempat pesantren berada?

## VII. DISKUSI

1. Bagaimana cara agar pesantren memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para santri dan masyarakat sekitar pesantren. Jelaskan!
2. Umumnya potret kemiskinan masyarakat yang tinggal di area sekitar pesantren sangat kentara terlihat. Menurut anda apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?